

Dr. Suswandari, M.Pd.

Peranan
GOLONGAN KETIGA
Dalam
REVOLUSI PRANCIS 1789

Pengantar
Prof. Dr. Syofyan Saad, M.Pd.



Peranan
GOLONGAN KETIGA
Dalam
REVOLUSI PRANCIS 1789

Peranan
GOLONGAN KETIGA
Dalam
REVOLUSI PRANCIS 1789

SUSWANDARI

UHAMKA PRESS

Peranan Golongan Ketiga dalam Revolusi Prancis 1789

Dra. Suswandari, M.Pd.

Copy Editor Sugeng Riadi

Setting Nur Shodiqin

Cetakan Pertama, Maret 2004
Cetakan kedua, November 2009

ISBN 979-8405-72-2

Hak cipta **dilindungi** undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penerbit

UHAMKA PRESS

Jl. Limau II, Kebayoran, Jakarta 12130

E-mail: uhamkaperss@yahoo.com.

PENGANTAR

Dr. H. Syofyan Saad, M.Pd.

Revolusi Prancis yang terjadi tahun 1789 merupakan salah satu revolusi terbesar dalam panggung sejarah dunia, di samping dua revolusi sebelumnya, yakni Revolusi Industri yang terjadi di Inggris (1769) dan Revolusi Amerika (1775). Ketiga revolusi tersebut banyak membawa perubahan bagi kehidupan manusia di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Apabila Revolusi Industri di Inggris ditandai sejumlah temuan mesin-mesin produksi, Revolusi Amerika melahirkan kemerdekaan Amerika tahun 1776, maka Revolusi Prancis memberikan kontribusi kepada hak-hak manusia yang lebih demokratis.

Penyebab utama revolusi ini adalah sistem pemerintahan rezim lama yang bersifat feodalistik absolut yang sangat merugikan rakyat. Dalam pemerintahannya, rezim lama membagi struktur masyarakat menjadi tiga golongan, yaitu: gereja, bangsawan, dan rakyat. Golongan rakyat terdiri dari dua kelompok, yaitu Borjuis dan Proletar. Dari tiga golongan tersebut, golongan rakyat, yang dikenal sebagai Golongan Ketiga, diperlakukan secara tidak adil. Padahal golongan ini merupakan golongan terbesar di banding dua golongan lainnya. Diperkirakan Golongan Ketiga mencapai 98 persen dari seluruh rakyat Prancis.

Perlakuan yang tidak adil inilah kemudian menyulut terjadinya protes dan perlawanan Golongan Ketiga (Borjuis dan Proletar) terhadap pemerintahan rezim lama (*ancient regime*). Bentuk protes dan perlawanan Golongan Ketiga ini adalah dalam bentuk revolusi yang menghancurkan bangunan dan lambang-lambang

absolutisme. Salah satu puncaknya adalah penyerbuan penjara Bastille. Revolusi Prancis yang digerakkan oleh Mirabeau tidak lain bertujuan untuk membentuk suatu tatanan baru yang demokratis dan menghargai hak-hak manusia. Dengan mengusung semangat pencerahan (*Aufklarung/ Enlightenment*) serta slogan (kebebasan, persamaan, dan persaudaraan (*liberte, egalite, dan fraternite*), golongan ketiga dapat menumbangkan pemerintahan rezim lama pada 14 Juli 1789.

Sumbangan-sumbangan positif Revolusi Prancis sangat besar artinya, baik bagi Prancis sendiri maupun, bagi dunia. Terutama yang berkaitan dalam bidang sosial dan politik. Terbentuknya negara-negara modern, konsep kedaulatan rakyat, dan konsep negara kebangsaan (*nation state*), merupakan sumbangan sangat penting dari Revolusi Prancis tersebut.

Terbitnya buku ini diharapkan dapat memberikan gairah kembali bagi masyarakat untuk mempelajari sejarah, khususnya, sejarah dunia. Dengan tumbuhnya kembali minat mempelajari sejarah, diharapkan kita mengetahui proses dialektika segala peristiwa dan kejadian dunia. Dengan mengetahui proses dialektika, kita juga dapat memahami proses transformasi nilai-nilai yang terus berlangsung. Dengan memahami transformasi nilai-nilai yang terus berlangsung ini, paling tidak, kita dapat mengetahui kecenderungan-kecenderungan yang sedang terjadi. Apabila kecenderungan-kecenderungan tersebut mengarah ke pada hal-hal yang negatif, maka kita perlu mengendalikannya ke arah positif, ke arah yang bermanfaat bagi berlangsungnya kehidupan manusia.

Sebagai contoh, misalnya, Revolusi Industri yang terjadi di Inggris, melahirkan hal-hal yang positif dalam bentuk temuan-temuan alat produksi yang memudahkan dan kenyamanan manusia. Namun sebaliknya, hal-hal negatif dari revolusi tersebut juga tak dapat dihindari, yakni eksploitasi manusia atas manusia

dan eksploitasi manusia atas lingkungan alam, yang hingga kini terus berlangsung.

Begitu pula dengan Revolusi Prancis, ia juga melahirkan hal-hal positif dan negatif. Hal positifnya adalah dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan persaudaraan, serta kebebasan, Revolusi Prancis menggaungkan wacana bahwa manusia adalah sama dalam berkesempatan mengeluarkan pemikiran dan pendapat (demokrasi). Namun demikian Revolusi Prancis juga membawa efek negatif, yakni kebebasan yang tak terkendali, yang pada akhirnya kembali melahirkan sisi-sisi gelap kemanusiaan yakni eksploitasi manusia atas manusia. Perkembangan yang terakhir ini adalah bentuk lahirnya zaman kebebasan baru yang dikenal dengan neoliberalisme. Berkembangnya neoliberalisme yang tengah berlangsung saat ini, jelas merupakan transformasi nilai-nilai yang cenderung negatif bagi umat manusia secara keseluruhan. Dan terjadinya neoliberalisme jelas merupakan produk yang turut ditentukan oleh sejarah masa lampau, salah satunya adalah Revolusi Prancis. Dengan kata lain bentuk dan keadaan dunia saat ini juga ditentukan oleh masa lampau.

Dengan terbitnya buku ini saya berharap dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi para pembaca tentang benang merah peristiwa sejarah yang terus berlangsung dan selalu berkaitan. Khususnya dalam Revolusi Prancis, ada dua hal, kita diingatkan. Pertama adalah agar penguasa tidak sewenang-wenang memerintah dan memperlakukan rakyatnya, dan kedua, kekuatan rakyat tetap menjadi kekuatan yang ampuh untuk menumbangkan penguasa yang sewenang-wenang, karena suara rakyat adalah suara Tuhan.

Akhirnya saya menyambut gembira dengan terbitnya buku ini. Mudah-mudahan, upaya penulis buku ini, Saudari Suswandari, yang telah menghadirkan kembali sekelumit potret sejarah dunia melalui sejarah Revolusi Prancis dalam bentuk buku ini, diikuti oleh penulis-penulis lain di lingkungan UHAMKA. □

dan eksploitasi manusia atas lingkungan alam, yang hingga kini terus berlangsung.

Begitu pula dengan Revolusi Prancis, ia juga melahirkan hal-hal positif dan negatif. Hal positifnya adalah dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan persaudaraan, serta kebebasan, Revolusi Prancis menggaungkan wacana bahwa manusia adalah sama dalam berkesempatan mengeluarkan pemikiran dan pendapat (demokrasi). Namun demikian Revolusi Prancis juga membawa efek negatif, yakni kebebasan yang tak terkendali, yang pada akhirnya kembali melahirkan sisi-sisi gelap kemanusiaan yakni eksploitasi manusia atas manusia. Perkembangan yang terakhir ini adalah bentuk lahirnya zaman kebebasan baru yang dikenal dengan neoliberalisme. Berkembangnya neoliberalisme yang tengah berlangsung saat ini, jelas merupakan transformasi nilai-nilai yang cenderung negatif bagi umat manusia secara keseluruhan. Dan terjadinya neoliberalisme jelas merupakan produk yang turut ditentukan oleh sejarah masa lampau, salah satunya adalah Revolusi Prancis. Dengan kata lain bentuk dan keadaan dunia saat ini juga ditentukan oleh masa lampau.

Dengan terbitnya buku ini saya berharap dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi para pembaca tentang benang merah peristiwa sejarah yang terus berlangsung dan selalu berkaitan. Khususnya dalam Revolusi Prancis, ada dua hal, kita diingatkan. Pertama adalah agar penguasa tidak sewenang-wenang memerintah dan memperlakukan rakyatnya, dan kedua, kekuatan rakyat tetap menjadi kekuatan yang ampuh untuk menumbangkan penguasa yang sewenang-wenang, karena suara rakyat adalah suara Tuhan.

Akhirnya saya menyambut gembira dengan terbitnya buku ini. Mudah-mudahan, upaya penulis buku ini, Saudari Suswandari, yang telah menghadirkan kembali sekelumit potret sejarah dunia melalui sejarah Revolusi Prancis dalam bentuk buku ini, diikuti oleh penulis-penulis lain di lingkungan UHAMKA. □

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	9
BAB I PENDAHULUAN	11
BAB II MONARKI ABSOLUT	15
Proses Terbentuknya Monarki Absolut	15
Masa Pemerintahan Louis XV-XVI	18
Sistem Kemasyarakatan	24
Rakyat sebagai Golongan Ketiga	30
Beban Kaum Petani	34
BAB III PENCERAHAN DAN GOLONGAN KETIGA	38
Pencerahan dan Zaman yang Mendahuluinya	38
Pencerahan di Prancis dan Tokoh-tokohnya	42
Pengaruh Pencerahan Bagi Golongan Ketiga	49
BAB IV GOLONGAN KETIGA DAN REVOLUSI PRANCIS	52
Golongan Ketiga dan Penyebab Revolusi	52
Sidang Dewan Perwakilan Golongan	58
Mirabeau Salah Satu Sosok Wakil Golongan Ketiga dalam Dewan Perwakilan Golongan	65
Kekuatan Rakyat dalam Revolusi Prancis	69
Penyerbuan ke Penjara Bastille	72
BAB V BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN MONARKI ABSOLUT	76
Jatuhnya Bastille dan Hapusnya Hak-hak Istimewa	76
Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan Warga Negara	80
Zaman Baru di Prancis	83
BAB VI PENUTUP	88
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	100
TENTANG PENULIS	108

Bab 1

PENDAHULUAN

Revolusi Prancis merupakan reaksi terhadap sistem pemerintahan rezim lama yang bersifat feodalistik absolut, terutama ditujukan kepada penghancuran struktur feodal dan kerajaan (Soedjatmoko, 1989:5) atas nama kemerdekaan (Nicolle, 1955:155).

Terdapatnya 'penyakit masyarakat' yang menimbulkan krisis kemasyarakatan (Soedjono, 1981:105) yakni pertentangan sosial pada masa pemerintahan rezim lama yang cenderung membagi-bagi rakyat ke dalam golongan gereja, bangsawan dan rakyat jelata, dengan hak dan kewajiban yang diberi batasan secara jelas (Furet and Richet, 1989:19).

Revolusi Prancis memiliki arti penting bagi terbentuknya negara modern yang didasarkan pada konsepsi kedaulatan rakyat dan konsepsi negara kebangsaan atau *the nation state* (Soedjatmoko, 1989:6). Revolusi Prancis telah membuktikan bahwa peristiwa tersebut membawa perubahan mendasar dalam bidang politik dan sosial dunia dalam jangka waktu yang lama (Schieder, 1958:2).

Golongan Ketiga, pada awalnya merupakan istilah yang dikenakan pada masyarakat nonbangsawan dan nongereja dalam Parlemen Prancis masa rezim lama. Dalam Parlemen Prancis rezim lama dikenal perwakilan tiga golongan, yaitu kaum gereja, bangsawan, dan rakyat kebanyakan yang kemudian dikenal dengan golongan ketiga. Menurut Furet dan Richet (189:28), golongan ketiga adalah penduduk Prancis di luar golongan gereja dan bangsawan. Menurut perhitungan mereka berjumlah sekitar

98 persen dari seluruh rakyat. Meskipun golongan ketiga namun dalam kenyataannya mereka merupakan golongan yang paling banyak memiliki kewajiban tetapi banyak dirugikan. Golongan ketiga banyak dibebani oleh kewajiban yang sangat memberatkan mereka dibandingkan dengan hak yang mereka terima.

Di dalam golongan ketiga, masih terbagi lagi dalam beberapa kelompok yang antara lain didasarkan pada jenis pekerjaan. Secara garis besar ada dua kelompok golongan ketiga. *Pertama*, kaum borjuis, mereka adalah bagian dari golongan ketiga yang bergerak dalam lapangan perdagangan. Kaum borjuis dikatakan sebagai golongan ketiga yang paling beruntung, karena dari hasil perdagangan telah mengantarkan mereka menjadi orang-orang kaya dan berpendidikan. *Kedua*, kaum petani, yaitu bagian dari golongan ketiga dengan pekerjaan utama mengolah tanah untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya. Kaum petani jumlahnya paling banyak di antara golongan ketiga yang lain. Diperkirakan jumlah kaum petani mencapai 90 persen dari seluruh penduduk Prancis (Malet dan Isaac, 1989:18).

BATASAN PENGERTIAN

a. Revolusi

Dalam rangka untuk memudahkan pengertian, kata Revolusi Prancis dipecah menjadi dua bagian, yaitu revolusi dan Prancis. Istilah revolusi untuk pertama kalinya digunakan di Inggris pada tahun 1660. Pada waktu itu istilah revolusi mempunyai pengertian politik yang dihubungkan dengan restorasi kerajaan Inggris (Suyatno, 1983:52). Dalam perkembangannya istilah revolusi menjadi suatu konsep dan terminologi yang sangat populer dan pada akhir abad 18. Pada umumnya konsep revolusi mempunyai pengertian yang luas, oleh karena itu, kata revolusi sulit diberi definisi secara tepat.

Konsep revolusi tidak berespek tunggal, tetapi mempunyai aspek ganda, antara lain meliputi aspek politik, sosial, dan ekonomi. Hal ini menyebabkan ciri serta tujuan revolusi

berbeda-beda (Suyatno, 1984:64). Menurut Leon Trotsky perkataan revolusi itu tidak lebih dan tidak kurang adalah suatu perubahan yang baik sifatnya (Brinton, 1962:13). Suyatno (1984:64) menyatakan bahwa revolusi adalah pergolakan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang membawa perubahan fundamental terhadap tatanan yang ada. Selanjutnya Richard A. Preston (1979:4) menilai: *The act revolution had laid down principles for a new form of society and government. Indeed, the principle of revolution itself was considered a virtue.*

Barangkali definisi kata revolusi yang lebih lengkap dikemukakan oleh Sigmund Neumann dalam buku Bruce (1968:7) sebagai berikut:

Revolution is a sweeping fundamental change in political organization, social structure, economic property control and predominant myth of social order. Thus indicating a major break in continuity of development.

Dengan demikian, kata revolusi mempunyai pengertian suatu perubahan mendasar dari suatu tatanan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang telah mapan menuju kebaikan bagi perkembangan masa mendatang.

b. Prancis

Prancis adalah nama resmi Republik Prancis dewasa ini, yang dikenal sebagai negara terbesar di wilayah Eropa Barat, dengan luas wilayah sekitar 574.026 kilometer persegi. Sejak Abad Pertengahan bangsa Prancis telah mengenal peradaban tinggi, baik dalam bidang seni budaya, sosial, maupun ilmu pengetahuan. Di samping itu dalam catatan sejarahnya, bangsa Prancis pernah diperintah oleh raja-raja dengan kekuasaan absolut sewenang-wenang. Dalam pemerintahan absolut tersebut kehidupan sosial, politik, dan ekonomi hanya menguntungkan golongan tertentu saja. Keadaan rakyat kebanyakan kurang diperhatikan. Rakyat dianggap sebagai golongan yang tidak mempunyai hak apa-apa dalam pemerintahan. Sistem monarkhi absolut ini yang ingin diubah oleh rakyat Prancis melalui gerakan revolusi yang meledak tahun 1789.

Jadi, bila digabungkan kata Revolusi Prancis mempunyai pengertian suatu perubahan fundamental yang ditujukan pada penghancuran struktur sosial, politik, ekonomi feodal, menuju struktur sosial, politik, ekonomi yang bebas, adil dan sejahtera di Prancis.

c. Tahun 1789

Tahun 1789 sebagai tahun keramat dalam urutan kronologis sejarah Prancis. Pada tahun 1789 tersebut suatu gerakan rakyat Prancis yang radikal dimulai dengan penyerbuan ke penjara Bastille, yang merupakan lambang kekuasaan rezim lama.

Dengan demikian, dapat diketahui batasan buku ini berusaha mengungkap aktivitas dari golongan ketiga yang secara garis besar terdiri dari kaum petani dan borjuis dalam rangka mengakhiri pemerintahan rezim lama. Golongan ketiga dapat dianggap mendominasi atau memegang peran utama dalam jalannya revolusi Prancis tahun 1789, yaitu perubahan fundamental dalam tatanan sosial, politik dan ekonomi rezim lama yang bersifat monarkhi absolut ke arah tatanan baru yang bersifat demokratis egalitarian.

Bab 2

MONARKHI ABSOLUT

Agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang Revolusi Prancis, di bawah ini dipaparkan situasi Prancis prarevolusi. Pertama sebagai latar belakang disajikan proses terbentuknya monarkhi absolut, Prancis di bawah pemerintahan Louis XV - XVI (1715-1789), dan sistem kemasyarakatannya. Bab ini diakhiri dengan memaparkan beban golongan ketiga akibat sistem yang diberlakukan pemerintahan monarkhi absolut tersebut.

PROSES TERBENTUKNYA MONARKHI ABSOLUT

Prancis diketahui sebagai salah satu negara di Eropa Barat yang paling maju pada abad XVII (Hayes, 1956:673). Dalam abad itu Prancis dengan monarkhi absolutnya berhasil memegang peran dominan di wilayah Eropa Barat, baik dalam bidang kebudayaan, kekuatan militer, maupun bentuk keagungan yang dipusatkan pada kekuasaan absolut raja. (Gershoy, 1964:3). Pada waktu itu Prancis diperintah oleh Louis XIV yang dikenal sebagai raja yang cakap, mantap dalam setiap aktivitas, serta sangat mempesonakan dalam penampilannya.

Sebenarnya monarkhi absolut yang tertanam di Prancis itu sudah dirintis jauh sebelum Louis XIV naik tahta. Jean du Plessis duc de Richelieu atau lebih terkenal dengan Kardinal Richelieu disebut sebagai peletak dasar monarkhi absolut Prancis (Friedrich and Blitzler, 1957:97). Richelieu adalah seorang perdana menteri pada masa pemerintahan Louis XIII (1585-1642), yang bercita-cita untuk mewujudkan Prancis sebagai negara paling kuat

di Eropa dengan jalan membangun monarkhi absolut. Keinginan Richelieu itu diwujudkan dengan cara mengurangi pengaruh kaum bangsawan dalam pemerintahan Prancis waktu itu. Semua kekuasaan pemerintahan dipusatkan pada satu tangan, yaitu raja. Dengan rencana dan tindakannya Richelieu berhasil menghantarkan Prancis ke pintu keemasannya pada abad XVII. Hal ini menjadi amat jelas pada masa pemerintahan Louis XIV (1643-1715). Louis XIV menduduki tahta Prancis menggantikan Louis XIII yang meninggal pada tahun 1642. Dalam mengendalikan pemerintahannya, Louis XIV didampingi oleh Perdana Menteri Mazarin, yang mendukung cita-cita Richelieu.

Semenjak pemerintahan Louis XIV sistem pemerintahan Prancis dikenal sebagai absolutisme mutlak, yaitu suatu sistem pemerintahan dengan raja duduk di posisi puncak sebagai penguasa tunggal yang memenangi segala wewenang. Dalam sistem pemerintahan absolut itu, rakyat Prancis tidak mempunyai peranan apapun dalam proses pemerintahan (Reading 1986:2). Louis XIV mendudukkan diri sebagai satu-satunya penguasa di Prancis yang mutlak. Pemerintahan Louis XIV merupakan babak terakhir dari suatu pertikaian yang berabad-abad lamanya, yaitu pertikaian antara kaum bangsawan dan kerajaan. Pertikaian yang berlarut-larut ini terjadi karena kaum bangsawan berusaha menekan raja agar menuruti kehendak mereka. Kaum bangsawan ingin mengambil peranan dalam politik pemerintahan, sementara Louis XIV dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya berhasil memaksa para bangsawan untuk tunduk dan menghapus pengaruh politik mereka.

Pemerintahan monarkhi absolut Prancis benar-benar mantap di tangan Louis XIV. Absolutisme Prancis mempunyai ciri khas satu raja, satu kepercayaan, dan satu hukum, atau *unroi, unefoi, uneloi* (Kinder and Hilyernann, 1978:259). Louis XIV mendapat julukan *Roi Soleil* (Raja Matahari) sebagai simbol yang semakin menambah kewibawaannya. Di dalam kekuasaan Louis XIV tidak ada kekuatan lain yang dapat menentang kehendaknya. Negara adalah saya (Palmer, 1973:23), atau dalam bahasa Prancis *L'état c'est moi*. Selebihnya semua keputusan dianggap sah, apabila

Kehendaki raja (Richard, 1950:2) Kehendak raja adalah hukum, raja adalah undang-undang hidup dan rakyat harus tunduk sepenuhnya.

Sistem pemerintahan monarkhi absolut diperkokoh oleh suatu kepercayaan *divine right* (Hayes, 1956:673). Pemerintahan adalah hasil perintah Tuhan. Raja Prancis memperoleh pengagasannya dari Tuhan. Raja berkuasa atas nama Tuhan, oleh karena itu raja bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak kepada rakyat. Akibatnya wewenang raja tidak dapat dikontrol oleh siapapun. Raja dapat berkuasa tanpa batas, raja adalah "ayah" untuk semua rakyat dan pemilik kerajaan beserta tanah-tanahnya yang amat luas. (Furet and Pichet, 1989:7). Raja merupakan kunci pimpinan dalam pelaksanaan politik pemerintah.

Louis XIV adalah raja yang cakap dan luar biasa pengaruhnya di mata rakyat Prancis waktu itu. Dipengaruhi oleh semboyannya, negara adalah saya, Louis XIV merasa terpanggil untuk meningkatkan kejayaan Prancis di Eropa (Kinder and Hilgemann, 1978:21). Sebagai raja Prancis Louis XIV merasa lebih tinggi di atas raja-raja Eropa yang lain (Rayner, tanpa tahun:38).

Dalam menambah kemuliaan dan keharuman namanya, Louis XIV melakukan ekspansi ke luar wilayah Prancis. Pada tahun 1672-1684 pasukan Louis XIV melancarkan serangan ke arah Timur Laut wilayah Prancis. Dalam pertempuran itu pasukan Prancis berhadapan dengan pasukan Belanda. Pertikaian dengan kerajaan Belanda itu dapat diakhiri dengan perundingan *Nijmegen* pada 1678. Dalam perundingan itu Prancis mendapat wilayah *Conte*. Kemudian disusul dengan perundingan *Hijmegen* pada 1781. Dalam perundingan kedua itu Prancis mendapatkan daerah *Alsache* dan *Strasburg* (Kinder dan Hilgemann, 1978:259). Kemenangan yang berhasil dicapai oleh Louis XIV memperkuat kedudukan Prancis di Eropa Barat (Keterangan lebih lanjut lihat lampiran 1)

Di samping itu, dalam memantapkan kedudukannya, Louis XIV banyak melaksanakan politik Mercusuar. Antara lain pembangunan istana *Versailles* yang kemegahannya masih dapat

dinikmati hingga sekarang. Pembangunan istana Versailles itu memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Kemegahan istana Versailles dijadikan sebagai lambang kekuasaan rezim lama (Gershoy, 1964:8). Suasana istana Versailles yang indah dan megah sangat mendukung monarkhi absolut Prancis.

Berbagai kegemilangan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial berhasil dicapai oleh Louis XIV. Hal ini semakin memperkuat kedudukan Prancis di Eropa. Di samping segala kejayaan dan kehebatan Louis XIV beserta pada pembantunya, pada saat akhir pemerintahannya sudah mulai tampak adanya tanda-tanda kemunduran Prancis. Peperangan-peperangan dan pembangunan yang dilaksanakan Louis XIV telah menguras keuangan Prancis. Keadaan ini akan membawa Prancis ke dalam suatu masa krisis baik ekonomi, politik, maupun sosial. Lebih-lebih dengan munculnya pengganti Louis XIV yang tidak cakap dalam memerintah Prancis.

MASA PEMERINTAH LOUIS XV - XVI

Louis XIV meninggal dunia pada tahun 1715 setelah berhasil memegang tampuk pemerintahan Prancis selama 53 tahun. Di antara raja-raja Prancis lainnya Louis XIV adalah raja Prancis yang paling lama berkuasa. Kekuasaan Louis XIV digantikan oleh cucunya laki-laki bernama Louis XV, yang pada saat itu masih berusia 5 tahun (Gershoy, 1964:10). Louis XV naik tahta di bawah perwalian para pangeran dinasti Bourbon. Masa perwalian berlangsung delapan tahun, dari tahun 1715 - 1723. Masa itu merupakan kesempatan bagi para bangsawan yang mencoba untuk berperang lagi dalam politik kerajaan, setelah kedudukan mereka dibatasi oleh Louis XIV. Akan tetapi, usaha kaum bangsawan tidak berhasil sebab kebanyakan dari mereka tidak cakap dalam menangani masalah politik.

Louis XV diangkat secara resmi menjadi raja pada tahun 1723, setelah berusia 13 tahun. Louis XV dalam memegang kekuasaan didampingi oleh Fleury seorang kardinal yang pernah menjadi guru pribadinya. Kemudian Fleury diangkat menjadi perdana menteri. Meskipun Fleury sudah tua, tetapi dia berhasil

dalam mendampingi Louis XV. Fleury dapat melanjutkan kejayaan Prancis seperti yang telah dirintis oleh Louis XIV. Akan tetapi, setelah Fleury meninggal pada tahun 1743, pemerintahan Prancis mulai goyah, Louis XV bukanlah raja yang mewarisi kecakapan kakeknya. Padahal saat naik tahta, Louis XV sangat diharapkan oleh rakyatnya. Louis XV sebagai *Le bien aime*, raja yang amat dicintai dan diharapkan membawa kemakmuran Perancis. Louis XV tidak lebih seorang raja yang malas dan cepat bosan sebagai kepala pemerintahan. Louis XV akan memilih berburu, berjudi, serta mengumbar nafsu duniawi dengan sejumlah wanita penghibur kesenangannya sebagai jalan keluar mengatasi permasalahan pemerintahan. Oleh Gde Agung (1989:3) Louis XV dikatakan sebagai raja *playboy* yang telah menjadikan istana Versailles sebagai pusat skandal seks yang tidak ada hentihentinya bersama para bangsawan pendukung perilakunya.

Administrasi pemerintah Prancis di bawah kekuasaan Louis XV sangat kacau, setelah meninggalnya Fleury, di Prancis tidak ada lagi jabatan perdana menteri. Sesuatu yang tidak diduga, pemerintah Prancis waktu itu ada di bawah kontrol kekasih raja, antara lain Madame de Pompadour (Gershoy, 1964:5-6). Terbukti pengangkatan pegawai-pegawai tinggi kerajaan atas rekomendasi para kekasih raja. Akan tetapi, bagaimanapun juga Louis XV tetap seorang raja yang berkuasa penuh atas monarki Prancis saat itu. Kekuasaan administrasi politik kerajaan tetap ditangan Louis XV (Kinder and Hilgemann, 1978:17). Dalam menangani pemerintahannya, Louis XV dibantu oleh orang-orang yang terdiri atas Menteri Kehakiman *Chancelier*, Inspektur Jenderal Keuangan (*Controleur General des Finances*), Menteri Urusan Perang (*Secretarie de 'Etat de la Guerre'*), Menteri Angkatan laut (*Secretarie de 'Etat de la Marine'*), Menteri Luar Negeri (*Secretarie de Etat des affaires etrangeres*) serta Kepala Rumah Tangga Raja (*Secretarie de 'Etat de la Maison du roi'*). Dalam menghadapi sesuatu masalah para menteri selalu bertemu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Para menteri itu tidak mempunyai kekuasaan penuh karena Louis XV tetap sebagai pemegang kekuasaan semua kerajaan. Meskipun demikian Louis XV kurang mencurahkan perhatiannya terhadap

jalannya pemerintahan negara. Raja hanya mengutamakan kepentingan sendiri, tidak memperhatikan lagi kondisi keuangan negara yang mendekati kebangkrutan.

Keikutsertaan Prancis dalam perang 7 tahun (1756-1763) semakin memperlemah kondisi ekonomi Prancis. Perang 7 tahun merupakan peperangan antara Prancis melawan Inggris untuk memperebutkan koloni di wilayah Amerika Utara. (Hayes, 1956:682-683). Akibat perang tujuh tahun tersebut sangat menyedihkan bagi Prancis waktu itu. Disamping telah menguras keuangan negara, dalam perang tujuh tahun itu Prancis kehilangan koloninya di Amerika Utara.

Louis XV meninggal dunia pada tahun 1774 setelah berhasil menduduki tahta Prancis selama 51 tahun. Kedudukan Louis XV digantikan oleh cucu laki-lakinya Louis XVI pada tahun itu juga. Pemerintahan yang kacau warisan Louis XV terus berlanjut pada masa pemerintahan Louis XVI. Louis XVI dikenal sebagai raja yang kurang tanggap terhadap kepentingan rakyat, dan termasuk pula raja yang hanya cakap memikirkan kesenangan dan kepentingan pribadi. Louis XVI adalah raja yang sangat lemah kepribadiannya dan tidak sanggup mengatasi segala kesulitan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. (Gde Agung, 1989:1), warisan pendahulunya. Louis XVI raja yang lemah mentalnya (Kinder dan Hilgemann, 1978:17). Dengan lengkap Furet dan Denis Richet (1989:39) menggambarkan karakter Louis XVI sebagai berikut:

Tetapi baik sebagai raja maupun sebagai suami dia (Louis XVI) tidak berbeda, yaitu orang yang kikuk, pemalu dan canggung dalam gerak-geriknya. Louis XVI disebut orang manusia teka-teki, berwatak tidak menentu dan ragu-ragu itu telah menerima profesinya sebagai raja. Dia memerintah dengan kesungguhan tetapi dengan lemah, tidak begitu bernafsu dengan soal-soal politik atau untuk menguasai orang.

Sistem administrasi pemerintahan tampak semakin kacau di bawah pemerintahan Louis XVI. Memang secara hukum sistem pemerintahan yang berlaku terpusat, tetapi dalam

kenyataannya tidak terdapat keseragaman peraturan antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Misalnya, waktu itu Prancis terbagi menjadi 33 daerah administrasi (*Generalitie*). Dari 33 *generalitie* itu terpecah menjadi 40 ribu kota praja (Richard, 1950:1). Tiap-tiap daerah kota Praja mempunyai peraturan tersendiri dan saling menonjolkan identitas masing-masing, baik itu adat, busana maupun bahasanya. Pelaksanaan sistem administrasi pemerintahan yang buruk ini menunjukkan lemahnya pemerintahan pusat, yang tidak mampu mengendalikan pemerintahan daerah (*Lihat lampiran II*).

Ketidakteraturan sistem administrasi pemerintah tampak lebih jelas dalam masalah perpajakan. Undang-undang perpajakan antara daerah satu dengan daerah lain berbeda-beda. Hal ini sangat ditentukan oleh keadaan dan penguasa daerah setempat. Ciri khas buruknya sistem perpajakan pada masa rezim lama tersebut adalah karena adanya ketidakadilan dalam penarikan pajak serta kekacauan dalam pengelolaannya. Misalnya bagi kaum bangsawan dan gereja, baik kaya atau miskin semuanya dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Bahkan selanjutnya kaum gereja dan bangsawan dengan hak-hak istimewa yang mereka miliki dapat menarik pajak kepada kaum petani. Semua kewajiban membayar pajak dibebankan kepada rakyat yang duduk sebagai golongan ketiga.

Kelemahan pemerintah Louis XVI juga ditandai dengan tidak teraturnya sistem pengadilan. Kerajaan Prancis waktu itu terbagi menjadi 430 urusan pengadilan atau *baillage* (Malet and Isaac, 1989:5). Tiap-tiap *baillage* mempunyai undang-undang tata hukum pengadilan sendiri. Pelaksanaan sistem pengadilan sering berbeda-beda dan bertele-tele serta tidak jujur. Perkara pidana sering diselesaikan dengan tindakan di luar batas kemanusiaan. Misalnya hukum potong lidah, hukum dengan menggunakan roda siksa, ataupun pencabutan anggota badan seperti kuku (Malet and Isaac, 1989:9). Ciri khusus sistem pengadilan rezim lama adalah

raja dengan kewenangannya dapat memenjarakan siapa saja tanpa melalui proses persidangan. Dengan menggunakan sepucuk rusat *letre de chachet*, raja dapat berbuat sekehendak hati menghukum rakyatnya.

Kehancuran dalam sistem administrasi pemerintah memperlihatkan kemunduran Prancis. Sistem administrasi pemerintah yang tidak teratur itu membawa pengaruh dalam segi-segi lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Misalnya dalam bidang ekonomi, Prancis makin dilanda kebangkrutan keuangan. Hal ini disebabkan besarnya biaya peperangan baik yang dipimpin oleh Louis XIV, Louis XV ataupun Louis XVI sendiri. Di tengah-tengah keadaan keuangan yang semakin memburuk, uang justru dihambur-hamburkan oleh kalangan istana untuk membiayai kehidupan mewah mereka. Pemborosan dalam istana serta kekacauan dalam sistem politik membuat pemerintahan semakin parah dengan adanya sepak terjang Marie Antoinette permaisuri Louis XVI.

Marie Antoinette adalah putri Marie Therese dari kerajaan Austria. Marie Antoinette menikah dengan Louis XVI dalam usia yang relatif muda, 15 tahun. Kehidupan perkawinan yang tidak membahagiakan itu, menyebabkan Marie Antoinette menceburkan diri dalam kehidupan mewah. Dari situlah asalnya Marie Antoinette mempunyai selera hidup berlebih. Ratu selalu tampil dalam pakaian yang mewah dan gemerlapan untuk menutupi kesedihannya. Ratu dikenal sebagai wanita busana, seperti dikatakan oleh Davis Marie L. (1984:72).

Sementara itu, beberapa topi jeraminya yang sederhana sengaja dirancang untuk sang ratu menghabiskan biaya lebih dari buat seorang buruh Prancis waktu itu selama satu tahun.

Dengan pernyataan ini sangat jelas terlihat karakter negatif Marie Antoinette sebagai pendamping raja ditengah negara yang hampir bangkrut. Kehidupan mewah di dijalani ratu bersama teman-temannya sangat bertentangan dengan keadaan rakyat yang semakin miskin dan sengsara. Karena pemborosan

yang dilakukannya, Marie Antoinette mendapat julukan *Madame Devisit* atau nyonya penyebab devisa.

Di samping berlaku boros, Marie Antoinette turut campur dalam masalah politik pemerintahan. Padahal Marie Antoinette buta tentang masalah-masalah politik. Ratu mempunyai keinginan besar untuk menjadi penguasa di Prancis. Ratu selalu menghalang-halangi setiap rencana pembaharuan yang bertentangan dengan kehendaknya. Di samping itu, Marie Antoinette ikut campur dalam pengangkatan atau pemberhentian pejabat tinggi kerajaan. Misalnya ratu telah mendesak raja agar memecat Necker, salah seorang menteri keuangan. Marie Antoinette tidak menyukai Necker karena keinginan Necker sangat bertentangan dengan keinginan ratu. (Hayes, 1956:674). Marie Antoinette, ibu negara yang tidak pernah memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Bila ada penasihat raja mengatakan bahwa kebanyakan rakyat Prancis tidak makan roti, maka dengan tenang ratu akan mengatakn, jika begitu biarlah mereka makan kue (Davis, 1984:77-78). Louis XVI sebagai suami sekaligus raja, penguasa tertinggi kerajaan Prancis tidak dapat mengendalikan perilaku isterinya.

Pengaruh Marie Antoinette dalam kebijaksanaan politik pemerintah sangat berlebih-lebihan. Louis XVI tidak dapat berbuat banyak atas perilaku isterinya. Oleh karena itu, raja dan ratu telah kehilangan kepercayaan dari rakyatnya. Raja dan ratu dituduh telah menghabiskan harta benda negara dalam sistem keuangan yang boros, administrasi yang kurang efektif dan korupsi. Kejayaan Prancis yang dirintis oleh Louis XIV makin lama makin merosot. Pemerintahan Louis XVI menjadi sasaran ketidakpuasan rakyat.

Pemerintah Prancis yang kacau itu menjadi ciri khas kekuasaan rezim lama. Para raja Prancis telah memperlakukan kerajaannya sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi dan keluarganya. Hal ini sangat jelas sekali dengan adanya pembagian masyarakat dalam kelas-kelas yang berbeda. Rakyat

sengaja dibuat bertingkat-tingkat untuk memperkokoh kekuatan rezim lama. Hak dan kewajiban antara penguasa dan rakyat yang dikuasai diberi garis batas secara jelas.

SISTEM KEMASYARAKATAN

Prancis dalam kenyataannya dapat dikatakan sebagai salah satu contoh negara di Eropa Barat yang paling maju era abad XVII. Tetapi di bawah cengkeraman rezim lama yang absolut, Prancis memperlihatkan suatu keanehan. (Hayes, 1956:673). Pada masa itu negara hanya dikuasai oleh hawa nafsu dan sifat egoisme sewenang-wenang menuju kejayaan pribadi atau golongan.

Masyarakat Prancis waktu itu bukanlah terdiri atas warga negara yang mempunyai hak dan kedudukan sama, baik dalam hukum maupun pemerintahan. Akan tetapi yang berlaku kebalikannya, di dalam masyarakat terdapat stratifikasi yang kaku. Sebagaimana disebutkan oleh Furet dan Denis Richet (1989:9) bahwa, secara hukum suatu monarki didasari oleh ketentuan tingkatan-tingkatan yang berlaku abadi dalam masyarakat. Prancis pada masa itu merupakan monarki yang memberlakukan pembedaan hak-hak dan kewajiban bagi warga negaranya.

Terdapatnya stratifikasi masyarakat itu, menurut tinjauan sosiologis disebabkan dalam masyarakat itu atas suatu yang dihargai, baik berupa kekayaan, keturunan, ataupun kekuasaan (Soekanto, 1982:220). Kekayaan, keturunan, serta kekuasaan merupakan suatu yang diagungkan oleh masyarakat Prancis rezim lama. Oleh karena tidak ada keseimbangan terhadap suatu yang dihargai itu, masyarakat menjadi tersusun secara bertingkat-tingkat yang satu di atas yang lain, (Kartodirdjo, 1981:24), menurut pekerjaan, kekuasaan, kelahiran, ataupun kewibawaannya. Hal ini bisa diartikan bahwa mereka yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan rezim lama berhak atas kedudukan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan mereka yang hanya bekerja sebagai petani.

Tata kehidupan masyarakat Prancis waktu itu terkotak-

atan
yang

salah
abad
olut,
Pada
isme

arga
dalam
laku
yang
chet
oleh
dalam
yang
warga

uan
yang
asaan
asaan
rezim
yang
ngkat
enurut
Hal ini
dalam
tinggi
ebagai

kotak-

1789

kotak. Dalam masyarakat terdapat perbedaan mencolok antara golongan yang satu dengan golongan lainnya, atas hak dan kewajibannya. Mereka yang kaya, keturunan dari keluarga terhormat, serta mempunyai kekuasaan, menyebut diri mereka sebagai golongan atas. Sebaliknya mereka yang tidak mempunyai ketentuan tersebut di atas disebut golongan bawah. Dalam suasana kehidupan sehari-hari, golongan atas akan memisahkan diri dari golongan yang ada di bawahnya. Golongan atas akan membentuk warna kehidupan tersendiri, untuk membedakan diri serta menjaga kehormatannya dengan golongan di bawahnya dan biasanya berusaha untuk tampil mewah. Misalnya, di dalam penampilan, golongan atas akan selalu kelihatan lebih mewah jika dibandingkan dengan golongan bawah. Golongan atas akan mengenakan pakaian yang bagus dan dari bahan yang mahal, sedangkan golongan bawah berpakaian sederhana.

Stratifikasi atau pembedaan masyarakat seperti itu berlangsung selama pemerintahan rezim lama. Pertentangan kehendak antara pihak yang di atas dengan pihak di bawah tidak terelakkan lagi. Golongan atas menjadi golongan yang terus-menerus mengeksploitasi golongan bawah. Sementara bagi mereka golongan bawah sudah menjadi nasibnya untuk merasa puas menjadi golongan yang hanya melayani golongan atasnya. Akibat curamnya jurang pemisah antara masyarakat golongan atas dengan golongan bawah, hal itu banyak membawa penderitaan bagi mereka golongan bawah. Sebaliknya sistem ini membawa kemakmuran bagi golongan atas sekalipun sifatnya semu.

Prancis pada masa rezim lama memperlihatkan kecenderungan yang demikian. Dilihat dari keseluruhan jumlah penduduk waktu itu, yaitu sekitar 24 sampai 25 juta jiwa, Prancis telah terbagi dalam tiga golongan masyarakat. (Ritchie, tanpa tahun:227). Pembagian ini berdasarkan atas ketidaksamaan hak dan kewajiban antar-golongan (Malet and Isaac, 1989:11). Hak dan kewajiban antara golongan satu dengan golongan yang lain diberi batasan secara tajam (lebih jelasnya lihat lampiran III). Ketiga golongan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Golongan Agama (*Ordre du clerge*)

Golongan ini selanjutnya disebut golongan gereja untuk membedakan dengan agama lain, seperti Islam, Budha, Hindu, dan sebagainya.

Golongan gereja dimasukkan ke dalam golongan pertama dalam sistem stratifikasi masyarakat Prancis masa pemerintahan rezim lama (Gershoys, 1957:14). Golongan gereja sebagai penyatu semua pelayanan agama Katholik yang pada waktu itu sebagai agama negara. Secara keseluruhan jumlah golongan gereja tidak lebih dari 150.000 orang. Sebagai kelas pertama golongan gereja diberi hak-hak istimewa oleh pemerintahan rezim lama, baik berupa kehormatan, kekayaan maupun kemerdekaan (Furet and Riched, 1989:19).

Hak-hak istimewa diberikan pada golongan gereja berkaitan dengan fungsinya yang bersifat keramat, sekaligus peranannya dalam fungsi negara. Golongan gereja menjamin dan mensahkan keabadian kelas-kelas yang ada di Prancis. Pengaruh gereja masih kuat melekat dalam jiwa rakyat Prancis. Rakyat sangat menghormati peraturan-peraturan gereja dan para pemimpinnya. Doktrin-doktrin gereja tertanam kuat dalam alam pikiran rakyat Prancis pada umumnya. Pada masa itu masih terdapat suatu keyakinan bahwa:

Agama memberi irama kehidupan kolektif. Kehidupan seakan-akan teduh di bawah dentang lonceng gereja yang selalu mengiringi perjalanan hidup manusia sejak lahir sampai mati. Gereja dan pemimpin agamalah yang menentukan kehendak kehidupan manusia (Furet and Richet, 1989:6-7).

Kepercayaan ini masih berkembang, sehingga rakyat giat dalam mengikuti upacara-upacara misa serta upacara lain yang diselenggarakan oleh gereja. Besarnya pengaruh gereja dalam tata kehidupan masyarakat itu membawa pengaruh pada kewibawaan gereja dan pemimpinnya, sehingga bukan sesuatu yang mustahil seandainya gereja dan para pemimpinnya mendapat perlakuan istimewa dari masyarakat.

Di samping itu pihak pemerintah memandang posisi

penting gereja karena fungsi penguatannya. Hal ini diartikan bahwa kedudukan raja akan sah apabila sudah diberkati oleh gereja. Oleh karena itu, gereja mempunyai peran ganda dalam pemerintahan. Mereka tidak hanya mengurus kehidupan rohani saja, akan tetapi mereka dilibatkan dalam urusan pemerintahan. Misalnya gereja diberi wewenang untuk mengurus pendidikan, perkawinan ataupun pencatatan kelahiran (Levebvre, 1971:40). Orang-orang gereja tidak membuang kesempatan baik yang diberikan oleh pemerintah rezim lama. Dengan mengatasnamakan jabatan dan kedudukan, mereka berbuat sependak hati untuk kepentingan pribadi yang condong bersifat duniawi.

Orang-orang gereja dapat menumpuk kekayaan. Kekuatan ekonomi gereja masa itu tidak perlu dikhawatirkan. Gereja dapat memiliki tanah-tanah yang luas serta benda-benda tidak bergerak lainnya. Diperkirakan gereja mempunyai 10 persen dari tanah kerajaan (Furet and Richet, 1989:21). Pendapatan gereja per-tahun diperkirakan mencapai 90-100 juta franc. Dari jumlah tersebut 80 juta franc berasal dari *dime*, yaitu bagian pajak pendapatan yang harus diserahkan rakyat kepada gereja, ditambah lagi adanya *gifts* atau berbagai hadiah yang diberikan oleh rakyat pada gereja.

Golongan gereja walaupun terhimpun dalam kelas yang sama atau homogen, tetapi dalam kenyataannya tidak merupakan satu kelompok yang benar-benar bersatu. Golongan gereja sukar bersatu karena dari sekian hak-hak istimewa yang dimiliki, ada sejumlah kecil anggota yang nyata-nyata mendapat keuntungan besar (Furet and Richet, 1989:22). Mereka adalah orang-orang gereja yang tinggal di biara. Mereka berjumlah sekitar 65 ribu biarawan dan biarawati. Mereka terdiri atas para pendeta tingkat tinggi, seperti para uskup dan kepala biara. Kehidupan mereka biasanya penuh kemewahan dan mereka umumnya berasal dari golongan bangsawan. Kaum gereja yang mendapat keuntungan lebih kecil dikenal sebagai *Clerge Seculier*. Mereka adalah kaum gereja yang hidup di *Siecle* atau dunia, artinya hidup di tengah-tengah masyarakat. Mereka berhubungan langsung dengan umat.

Jumlah mereka kurang lebih 65 ribu orang, terdiri atas para imam, pembantu imam dan umumnya berasal dari kalangan rakyat biasa yang hidupnya sederhana (Godechot, 1989:202).

Golongan gereja sebagai kelompok merdeka atau bebas. Mereka dibebaskan dari tuntutan pengadilan, mereka kebal terhadap hukum yang berlaku. Meskipun golongan gereja hanya berjumlah 0,5 persen dari seluruh jumlah penduduk Prancis, namun mereka mampu menanamkan pengaruh besar dalam pemerintahan rezim lama. Akibat yang ditimbulkan dari campur tangannya golongan gereja dalam pemerintahan adalah kekacauan dalam pemerintahan. Keasyikan terhadap masalah duniawi selalu dikaitkan dengan masalah spiritual untuk keuntungan gereja. Hal-hal tersebut mengganggu stabilitas jalanya pemerintahan Prancis.

2. *Bangsawan (Ordre de Noblese)*

Golongan bangsawan merupakan peringkat kedua setelah golongan gereja. Bangsawan adalah orang-orang terhormat keturunan raja dan kerabatnya. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya gelar bangsawan di Prancis mempunyai arti lebih luas, karena dapat dimiliki oleh siapa-pun asal telah memenuhi sebagian syarat yang ditentukan. Misalnya gelar bangsawan dapat diperoleh dengan cara membeli. Jadi gelar bangsawan Prancis lama-kelamaan tidak hanya dimonopoli oleh kerabat raja saja.

Dalam catatan Leo Gershoy (1957:12) disebutkan bahwa menjelang meletusnya revolusi jumlah golongan bangsawan Prancis diperkirakan mencapai 50 ribu kepala keluarga, atau sekitar 200 ribu sampai 250 ribu orang. Selanjutnya ditambah oleh Levebure (1971:41) yang mengatakan bahwa golongan bangsawan Prancis waktu itu menjadi satu persen sampai tiga persen dari seluruh penduduk Prancis.

Golongan bangsawan merupakan golongan tersendiri dalam susunan masyarakat Prancis rezim lama. Mereka terdiri atas orang-orang berderajat, orang-orang kaya ataupun orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Oleh karena itu, kaum bangsawan selalu berusaha mengokohkan diri sebagai kelas yang harus dihormati dan sah untuk mempertahankan superioritasnya. Kaum

bangsawan dilahirkan lebih berharga dibanding orang kebanyakan, sehingga masyarakat umum atau rakyat biasa akan selalu menundukkan kepala dan mengangkat topi sebagai tanda hormat bila berjumpa dengan seorang bangsawan (Hayes, 1956:674).

Dilihat dari keturunan, jabatan, tempat tinggal dan kekayaan, ada beberapa tingkat golongan bangsawan. Ada yang disebut bangsawan tulen karena leluhurnya bangsawan, serta bangsawan baru yang memperoleh gelar bangsawan karena jabatan atau diperoleh dengan cara membeli. Pembeda paling jelas didasarkan pada jumlah kekayaan yang dimiliki serta kedudukan sosialnya. Dalam hal ini golongan bangsawan dibedakan menjadi bangsawan tinggi dan bangsawan rendah. Bangsawan tinggi disebut bangsawan *Cour*, bangsawan keturunan raja, pejabat tinggi dan bangsawan yang sangat kaya. Bangsawan tinggi dekat dengan raja dan tinggal di sekitar istana (Gershoy, 1957:36). Bangsawan rendah adalah bangsawan yang tinggal di daerah-daerah Pengaruh mereka sangat besar di wilayah mereka tinggal (Hayes, 1956:674).

Baik bangsawan tinggi maupun bangsawan rendah kaya ataupun miskin menduduki tempat yang sama di mata rakyat Prancis. Mereka merupakan golongan yang menerima hak-hak istimewa dari negara. Keduanya tetap sebagai golongan yang dihormati. Berbagai hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah rezim lama sangat menguntungkan bagi golongan bangsawan dan kerabatnya. Misalnya kaum bangsawan dibebaskan dari kewajiban membayar pajak dan mendapatkan pelayanan istimewa di gereja. Bahkan sebaliknya dengan hak istimewa yang dimiliki, kaum bangsawan dapat menarik pajak dari kalangan rakyat (Gershoy, 1957:15).

Di gereja kaum bangsawan mendapat pelayanan tersendiri. Misalnya mereka mempunyai tempat duduk tersendiri yang khusus disediakan bagi kaum bangsawan. Di samping bebas pajak dan perlakuan istimewa di gereja, kaum bangsawan diberi hak istimewa untuk menduduki berbagai jabatan dalam pemerintahan rezim lama. Misalnya sebagai gubernur atau hakim.

Pada masa rezim lama, pengaruh kaum bangsawan dalam bidang pemerintahan sangat besar, dengan tujuan untuk memperoleh kembali kekuasaan politik yang pernah hilang sejak pemerintahan Louis XIV. Dalam bidang politik kaum bangsawan menduduki jabatan kementerian atau sebagai dewan pengawas. Sejak tahun 1781 ditetapkan bahwa, untuk memperoleh jabatan atau pangkat dalam pemerintahan, orang harus keturunan bangsawan asli dari kedua belah pihak orang tuanya (Furet and Richet, 1989:32). Dengan keputusan ini kaum bangsawan dapat leluasa bergerak, karena tidak semua orang dapat menggantikan kedudukan mereka. Mereka cenderung memonopoli semua jabatan. Hal ini didukung oleh kondisi ekonomi yang tidak menentu menjelang tahun 1789. Pada waktu itu hasil sewa tanah tidak dapat diandalkan karena keadaan iklim yang buruk. Pada para petani tidak dapat membayar sewa tanah mereka. Dalam keadaan yang demikian, kaum bangsawan masih dapat menuntut rentefeodal yang menjadi hak mereka melalui otoritas jabatan yang dimiliki.

Kaum bangsawan, meskipun mereka berhasil menduduki jabatan penting dalam kenyataannya mereka jarang melaksanakan tugas dengan baik. Kegiatan mereka waktu itu hanya bersolek dan bermalasan-malasan (Hayes, 1956:678-679). Mereka hidup mewah di puri-puri bersama kaum bangsawan lain atau bersama-sama dengan keluarga raja di istana. Walaupun begitu, mereka tetap mempunyai kedudukan kuat karena ada pertalian erat antara bangsawan dengan raja. Kemewahan yang mewarnai kehidupan bangsawan menimbulkan kebencian di kalangan rakyat. Terutama tindakan mereka yang selalu memeras rakyat golongan bawah. Maka pada saat revolusi meletus, kaum bangsawan menjadi sasaran kemarahan rakyat.

RAKYAT SEBAGAI GOLONGAN KETIGA

Penduduk Prancis pada abad XVIII sebagian besar terdiri atas golongan ketiga (Gershoy, 1957 16). Siapakah yang dimaksud dengan golongan ketiga itu? Francois Furet dan Denis Richet (1989:28) menyebutkan, bahwa yang dimaksud golongan ketiga

adalah penduduk Prancis di luar golongan bangsawan dan gereja. Pendapat itu kemudian dilengkapi oleh Paul Nicolle (1955:16) yang mengatakan:

Mereka adalah orang-orang biasa, orang-orang dari segala lapisan pekerjaan yang membayar pajak terbanyak disebabkan keturunan, mereka tidak berkesempatan memperoleh titel, pangkat, dan kehormatan yang diberikan oleh raja.

Dilihat dari jumlah total penduduk Prancis waktu itu, jumlah golongan ketiga mencapai 98 persen. Dengan demikian dapat diketahui, dari sudut kuantitas golongan ketiga merupakan golongan mayoritas, namun nasib mereka sangat memprihatinkan. Golongan ketiga harus menjadi penopang kemewahan golongan minoritas di atas mereka yaitu kaum gereja dan bangsawan.

Golongan ketiga masih terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok kecil berdasarkan mata pencaharian atau jenis pekerjaan. Akan tetapi, secara garis besar ada dua kelompok golongan ketiga yang paling menonjol, yaitu kaum petani dan borjuis. (Blum, 1960:444). Kaum borjuis merupakan kaum ketiga yang paling kuat ekonominya meskipun jumlahnya lebih sedikit. Kaum petani merasakan penderitaan, akibat tindakan sewenang-wenang dari rezim lama. Misalnya para petani, mereka diperas semaksimalnya untuk menyangga kehidupan pemerintahan rezim lama. Kaum borjuis merupakan kelompok kecil golongan ketiga yang banyak dikecewakan oleh pemerintahan rezim lama. Lebih selanjutnya, uraian tentang kaum petani dan kaum borjuis akan dibahas di bawah ini.

1. Petani

Kaum petani selalu diartikan sebagai orang yang hidupnya terkait pada tanah. Pada masa rezim lama penduduk Prancis kebanyakan terdiri atas kaum petani. Mereka umumnya bekerja dan tinggal di desa-desa. Hal ini didukung oleh kondisi geografis Prancis yang baik dan cocok untuk pertanian. Sekitar 75 persen dari seluruh tanah Prancis merupakan lahan subur untuk

pertanian (Thomson, 1955:159) (lihat lampiran IV). Meskipun Prancis mempunyai tanah subur yang luas, namun dalam kenyataannya keadaan tersebut tidak dapat menjamin kesejahteraan hidup para petaninya. Hampir semua tanah yang luas dan subur sudah dikuasai kaum bangsawan serta kaum gereja. Para petani walaupun sempat mempunyai tanah hanya sedikit dan biasanya kurang subur. Para bangsawan memiliki antara 20-25 persen dari seluruh tanah pertanian. Kemudian kaum gereja memiliki antara 5-10 persen dari seluruh tanah pertanian, sedangkan para petani sendiri hanya memiliki 40-45 persen (Godechot, 1989:212).

Dilihat dari persentasi tanah yang dimiliki oleh kaum petani menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara luas lahan pertanian dengan jumlah petani yang ada. Oleh karena itu, dalam kalangan kaum petani ada kelompok-kelompok tersendiri berdasarkan punya dan tidaknya tanah. Misalnya ada kelompok *Laboureur* yaitu petani yang memiliki tanah dan tanah tersebut dikerjakan sendiri secara langsung atau disewakan. Kemudian ada kelompok petani yang disebut *personnier* atau *haricotier*. Mereka adalah petani penggarap yang menyewa tanah. Kadang-kadang dari kelompok *personnier* tadi itu ada yang memiliki tanah sendiri tetapi tidak seberapa luasnya. Kelompok terakhir disebut *Manuevrier* atau *brassier*, yaitu pekerja harian yang tidak mempunyai tanah sama sekali (Godechot, 1989:213). Kebanyakan petani Prancis terdiri atas petani penyewa terhadap tanah-tanah yang dimiliki bangsawan dan gereja. Mereka berjumlah 11 juta orang (Blum, 1966:445). Para petani penyewa diwajibkan membayarkan ongkos sewa yang ditentukan. Ongkos sewa ini dapat dibayarkan dengan uang ataupun dengan sebagian dari hasil bumi yang diperoleh.

Para petani diwajibkan menanam tanaman pokok untuk memenuhi kebutuhan istana dan seluruh penduduk Prancis (Hayes, 1956:678). Mereka bekerja sejak pagi sampai matahari terbenam saat mereka baru kembali ke gubuk-gubuk mereka yang sederhana. Tenaga mereka tidak dihargai oleh kaum bangsawan dan gereja karena kebanyakan dari kaum petani masih rendah

tingkat pendidikannya, mereka tidak begitu peduli dengan tenaga yang mereka keluarkan saat bekerja mengabdikan pada golongan bangsawan dan gereja. Pada saat itu para petani mempunyai pandangan, bahwa pekerjaan tersebut merupakan kewajiban bagi diri mereka sebagai golongan yang ditakdirkan untuk menghidupi golongan gereja dan bangsawan. Mereka merasa berhutang budi terhadap para bangsawan dan kaum gereja yang telah memberi sumber penghidupan berupa pekerjaan mengolah tanah secara terus menerus. Dengan demikian, kaum gereja dan bangsawan tidak segan-segan untuk mengeksploitasi mereka.

2. *Borjuis*

Golongan borjuis sebetulnya tidak ada dalam sistem stratifikasi masyarakat Prancis rezim lama. Mereka dimasukkan ke dalam golongan ketiga (Levevre, 1971:43). Mengapa demikian? Hal ini tidak lain dikarenakan oleh asal-usul mereka. Kaum borjuis berasal dari rakyat kebanyakan yang umumnya bekerja sebagai pedagang. Berkat kerja keras dan kecermatan mereka, menyebabkan mereka menjadi orang-orang yang kaya dan mengubah status mereka dari kaum petani menjadi kaum borjuis (Levevre, 1971:43).

Disebutkan oleh Gershoy (1957:16) bahwa jumlah kaum borjuis waktu itu sekitar 10-12 persen dari jumlah penduduk Prancis. (1957:16) atau sekitar 1 juta orang (Blum, 1966:445). Dalam perkembangannya kaum borjuis tidak hanya terdiri atas kaum pedagang saja. Dari kekayaan yang dimiliki kaum borjuis dapat memperoleh pendidikan. Di antara kaum borjuis banyak terdapat orang-orang dengan profesi tertentu, misalnya dokter, pengacara, ahli hukum, ahli ekonomi, ilmuwan dan sebagainya (Gershoy, 1964:82).

Kaum borjuis Prancis pada abad XVIII terdiri atas orang-orang kaya yang menguasai perdagangan Prancis. Misalnya Dollfuss seorang borjuis yang berhasil menguasai industri tekstil di Prancis (Furet and Richet, 1989:30). Dengan adanya kaum borjuis ini, maka perekonomian di Prancis dapat berkembang pesat. Kaum borjuis sejak abad itu menjadi golongan yang kuat

perekonomiannya. Mereka dijadikan sebagai sandaran pemerintah jika kekurangan uang. Dalam perkembangan selanjutnya sejumlah dari kaum borjuis ada yang duduk sebagai pamong praja di istana (Levevre, 1971:43). Di antara kaum borjuis ada yang memperoleh gelar kebangsawanan dengan membeli atau menikah dengan keluarga bangsawan.

Kaum borjuis mempunyai kedudukan birokrasi yang tak kalah pentingnya dibandingkan dengan kaum gereja dan bangsawan dalam pemerintahan rezim lama. Akan tetapi, karena terhalang oleh otoritas politik aristokrasi, kaum borjuis tidak berdaya menghadapi hak-hak istimewa yang dimiliki kaum gereja dan bangsawan (Kartodirdjo, 1989:5). Kaum borjuis merasa di-anak tiri-kan, dalam arti kendatipun mereka berperan dalam roda pemerintahan rezim sebagaimana kaum gereja dan bangsawan. Kaum borjuis merasa iri terhadap hak-hak istimewa yang diberikan raja terhadap kaum gereja dan bangsawan. Mereka sering dibuat jengkel oleh tingkah laku kaum bangsawan yang hanya bersolek dan para pendeta tinggi yang hanya bermalasmalas, akan tetapi kedudukannya lebih tinggi. (Hayes, 1956:678-679). Oleh karena itu, kaum borjuis berusaha memperjuangkan apa yang dinamakan kebenaran individu, serta penghapusan hak-hak feodal. Kaum borjuis bergabung dengan kaum petani yang menderita, untuk menentang kekuasaan rezim lama.

BEBAN KAUM PETANI

Kaum petani meskipun jumlahnya paling besar dibandingkan golongan lainnya, namun di bawah pemerintahan monarkhi absolut mereka paling menderita hidupnya. Kaum petani hanya menemui kesengsaraan dalam meniti kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan pada waktu itu pengaruh feodalisme masih sangat menonjol dalam gerak kehidupan rakyat Prancis. Hubungan sosial masih ditentukan oleh jumlah pemilikan tanah. Dalam hal ini masih berlaku hubungan antara tuan dan bawahan, dengan petani pekerja sebagai golongan bawah (Kartodirdjo, 1989:3). Kedudukan kaum petani hanya sebagai pekerja saja. Mereka mengolah tanah untuk memenuhi

kebutuhan golongan di atasnya, disamping kebutuhannya sendiri. Sebaliknya, kaum bangsawan sebagai tuan tanah, terus menerus melakukan penghisapan terhadap kaum petani yang tidak memiliki apa-apa.

Tekanan eksploitasi kaum gereja dan bangsawan sangat terasa kalangan kaum petani. Mereka harus bekerja keras tanpa imbalan yang memadai. Mereka sebagai kelompok yang tidak mempunyai sesuatu yang pantas dibanggakan baik itu harta, keturunan, ataupun kekuasaan. Para petani hanya mempunyai tenaga untuk bekerja sehingga mayoritas petani miskin dan tidak aman hidupnya (Kartodirdjo, 1989:3). Istilah *charge* (pajak) menjadi tolak ukur para petani dalam setiap perbincangan dengan petani lain. Pasa masa itu ada tiga macam pajak yang dibebankan kepada kaum petani (Gedechot, 1989:220) yaitu:

1. Pajak Kerajaan (*Charges Royales*)

Pajak kerajaan adalah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Ada dua cara jenis pajak kerajaan yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yang harus dibayar dikenal dengan istilah *taille*. *Taille* harus dibayarkan dengan uang. Jenisnya meliputi pajak tanah, pajak pendapatan, pajak, rumah, pajak jalan baik darat maupun sungai, dan pajak pekerjaan lain seandainya ada petani yang bekerja di luar kebiasaan sebagai petani. Pajak tidak langsung dibebankan kepada petani terdiri atas tiga jenis pajak yaitu pajak yang dikenakan pada minuman disebut *aides*, serta pajak cukai perdagangan atau *traites* (Malet and Isaac, 1989:8). Satu hal lagi jenis pajak tidak langsung yang menambah beban petani, yaitu *gabelle* atau ajak garam yang dimonopoli oleh negara. Besarnya pajak dan kapan waktu pembayaran ditentukan secara sepihak oleh pemerintah sehingga tidak mengherankan bila *gabelle* itu dirasa amat berat oleh para petani. Ketentuan yang lebih menyakitkan lagi adalah, pajak garam itu biasanya diborongkan pada pemborong partikelir. Para *gabellous* (pengumpul pajak) biasanya mengambil keuntungan pribadi yang sangat besar. Disamping itu masih ada pajak kerajaan yang sangat memberatkan bagi petani, yaitu *corve* atau kerja paksa. Para petani

untuk beberapa hari diharuskan bekerja bagi pemerintah tanpa dibayar. Nasib para petani dalam kerja paksa ini tidak lebih dari seorang budak.

2. Pajak Gereja (*Charges Ecclesiastiques*)

Merupakan kewajiban para petani untuk menyerahkan sebagian pendapatannya kepada pihak gereja. Pajak gereja ini ada karena kewenangan gereja yang mempunyai hak istimewa untuk memungut pajak dari petani. Di antara pajak-pajak yang harus diserahkan pada gereja itu ada yang disebut *dime*, yaitu pajak pendapatan, sepersepuluh dari pendapatan petani harus diserahkan kepada pihak gereja. Kemudian ada istilah *tithe* atau semacam zakat yang diberikan pada kaum gereja.

3. Pajak Tuan Tanah (*Charges Seigneuriales*)

Golongan bangsawan, dengan hak istimewa yang dimiliki, diperkenankan untuk memungut pajak dari petani. Karena kedudukan bangsawan sebagai tuan tanah, maka sudah menjadi hak bangsawan untuk menarik pajak tanah. Para petani umumnya sebagai penyewa tanah yang sebagian besar dimiliki kaum bangsawan. Pajak tanah ini dapat dibayar dengan uang atau *cens* ataupun dibayar dengan hasil bumi yang disebut *champart* (Godechot, 1989:210).

Selain tiga jenis pajak di atas para petani masih diwajibkan membayar berbagai pajak seperti, pajak jembatan, pajak jalan, ajak pertanian, ataupun *lods et ventes*, yaitu sejumlah uang yang harus diserahkan keada bangsawan setempat, seandainya petani melakukan jual beli tanah ataupun pewarisan tanah kepada anaknya.

Bermacam-macam pajak itu, hanya dibebankan kepada kaum petani. Pajak-pajak tersebut tidak pernah diperhitungkan secara seragam. Diperkirakan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan kaum petani mencapai 50 persen dari pendapatan petani (Godechot, 1989:210). Para petani tidak dapat menghindari dari pajak yang berlaku, karena kedudukan mereka sebagai wajib pajak utama di Prancis waktu itu. Kaum bangsawan dan gereja

yang
wajib
terseb
burden
meme
Oleh
tidak
kehidu
para p
kedud

memb
pajak s
bangsa
semua
dan ba
ada per
kaum g
petani s
yang b
bangsav

bangsav
sangat
menikm
kaum
ketidaks
zaman y
tertindas
untuk m
yang sew
selengka

yang kaya ikut membebani petani dengan berbagai pungutan wajib yang tidak kalah beratnya. Sejumlah kewajiban pajak tersebut telah menjadikan petani bagai binatang beban, *the beast of burden* (Gershoy, 1964:43). Petani diharuskan bekerja keras untuk memenuhi tuntutan pajak yang telah dibebankan pada mereka. Oleh Gershoy (1957:21) dikatakan bahwa pajak langsung dan tidak langsung itu merupakan pukulan yang menghancurkan bagi kehidupan petani Prancis. Aneka macam pajak itu dirasakan oleh para petani sebagai penindasan karena terdapat pihak lain dengan kedudukan ekonomi lebih baik justru dibebaskan dari pajak.

Kehidupan petani pada masa rezim lama makin memburuk. Aktivitas kaum petani hanya dibatasi oleh beban pajak serta berbagai tekanan lain dari berbagai pihak gereja dan bangsawan. Kaum petani tidak pernah mengetahui apa gunanya semua pajak yang telah mereka serahkan pada pemerintah, gereja dan bangsawan. Kaum petani hanya mengetahui bila waktu itu ada perbedaan bahwa mereka wajib membayar pajak, sedangkan kaum gereja, dan bangsawan tidak wajib membayar pajak. Kaum petani selaku petani sewa telah dibebani beban kerja pengabdian yang berat untuk menopang kemurahan kaum gereja dan bangsawan (Kartodirdjo, 1981:31).

Kesenjangan sosial rezim lama antara kaum gereja dan bangsawan pada satu pihak dengan kaum petani pada pihak lain sangat jelas perbedaannya. Kaum gereja dan bangsawan dapat menikmati kehidupan dunia yang menyenangkan, sedangkan kaum petani akrab dengan penderitaan. Terdapatnya ketidakseimbangan sosial ini seiring dengan perkembangan zaman yang akan melahirkan cendekiawan sebagai pembela kaum tertindas. Mereka terdiri atas para pemikir yang berkehendak untuk mengubah keadaan rezim lama beserta pemerintahannya yang sewenang-wenang. Zaman ini disebut abad pencerahan yang selengkapnya dapat diikuti dalam bab berikut.

Bab 3

PENCERAHAN DAN GOLONGAN KETIGA

Dalam bab ini akan dipaparkan tentang Abad Pencerahan dalam hubungannya dengan golongan ketiga di Prancis. Berturut-turut diuraikan mengenai Pencerahan itu sendiri berikut kejadian yang mendahului, dilanjutkan dengan perkembangan Abad Pencerahan di Prancis. Bab ini diakhiri dengan memaparkan pengaruh Abad Pencerahan bagi golongan ketiga.

PENCERAHAN DAN ZAMAN YANG MENDAHULUINYA

Abad XVIII merupakan abad *Aufklarung, Enligntenment* yang berarti Abad Pencerahan atau fajar budi, (Hamersma, 1983:1). Istilah tersebut diberikan pada zaman itu karena manusia mulai mencari cahaya baru dalam rasionya. Dalam bukunya Pater Gay (1984:11) dikatakan oleh Kant,¹ Pencerahan adalah kebangkitan manusia dari masa kanak-kanaknya. Lebih lengkap dikatakan:

Masa kanak-kanak atau masa belum matang ini tidak disebabkan oleh tiadanya kecerdasan melainkan oleh tiadanya tekad serta keberanian untuk menggunakan kecerdasan itu tanpa bandingan orang lain (Gay, 1984:11)

Pendapat itu lahir karena adanya pandangan, bahwa suasana dunia sebelum Abad Pencerahan merupakan masa penuh takhayul atau Abad Gereja.² Abad Gelap diketahui sebagai masa kemerosotan, kemunduran, kebodohan dan kegelapan

(Kartodirdjo, 1970:6). Hal ini tidak lain karena pada saat Abad Gelap berlangsung suasana kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh dogma-dogma gereja. Abad Gelap sebagai masa keagamaan, perkembangan kebudayaan ada dalam ikatan gereja. Selama itu tidak ada perhatian sama sekali terhadap kehidupan duniawi. Manusia hidup dalam kungkungan kekuasaan gereja yang sangat dominan. Jiwa keagamaan mempunyai pengaruh besar dalam corak kehidupan manusia setiap harinya. Cita-cita kehidupan manusia tidak terletak pada kehidupan masa kini, melainkan masa setelah ini yaitu kehidupan sesudah mati. Kehidupan manusia waktu itu hanya diarahkan pada suatu persiapan bagi kehidupan surgawi. Segala perwujudan kebudayaan dalam bentuk kata ataupun tulisan semuanya berpedoman pada Injil (Kartodirdjo, 1970:18). Oleh sebab itu, jiwa kehidupan manusia diliputi dengan angan-angan keagamaan dan dari situlah timbul pandangan hidup yang bersifat mistik (Kartodirdjo, 1970:22). Pemikiran diarahkan pada hal-hal simbolik yang penuh takhayul dan perba sangka. Gereja tidak hanya merupakan pusat kehidupan keagamaan, tetapi juga menguasai kehidupan intelektual masa itu. Hal ini menyebabkan seluruh kebudayaan yang ada dengan sendirinya hanya mempunyai sifat-sifat kegerejaan. Kehidupan intelektual ada di tangan para pendeta gereja (Manuel, 195:1). Manusia dianggap sebagai bagian dari dunia nasrani. Manusia tidak mempunyai arti sendiri sebagai manusia secara individual. Manusia tidak mempunyai kebebasan untuk mengembangkan daya pikir yang dimiliki, sebab mendapat tekanan dari pihak gereja. Manusia harus tunduk dan menyerahkan diri pada pikiran-pikiran nasrani (Schmid, 1980:91). Gerak manusia dibatasi oleh hukum-hukum gereja. Para pendeta gereja memegang peranan sangat besar dalam menentukan arah kehidupan manusia zaman itu.

Peradaban yang ada selama Abad Pertengahan ternyata tidak dapat memberikan kepuasan bagi manusia waktu itu. Oleh sebab itu, lambat laun nilai-nilai nasrani Abad Gelap mulai mengalami kemunduran. Lebih-lebih semenjak terbukanya

kembali hubungan timur dan Barat. Akibatnya timbul gerakan-gerakan besar menentang dominasi gereja (Kartodirdjo, 1970:21).

Gerakan tersebut adalah *Renaissance* dan *Reformasi*. Lahirnya *Renaissance* dan *Reformasi* pada abad XII mengakibatkan runtuhnya Abad Gelap. *Renaissance* dan *Reformasi* merupakan masa transisi antara Abad Gelap dan zaman modern (Blum, 1966 :64). *Renaissance* secara etimologis berasal dari kata *renaitre* yang berarti kelahiran kembali. Maksudnya kelahiran kembali budaya klasik Romawi dan Yunani setelah kedua budaya itu tenggelam dalam dunia Abad Gelap. *Reformasi* merupakan kelanjutan dari *Renaissance* yang berusaha memurnikan kembali ajaran nasrani seperti pada masa awalnya. Antara *Renaissance* dan *Reformasi* sulit dipisahkan. Keduanya isi-mengisi, karena keduanya lahir sebagai penentang dominasi gereja Abad Pertengahan, sekaligus menetapkan suatu sikap baru yang merupakan cerminan utuh masing-masing individu dengan kebebasan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, zaman yang penuh kebodohan telah diakhiri, aktivitas baru yang lebih berarti mulai tampak dengan lahirnya Abad Pencerahan.

Abad Pencerahan disebut juga abad Akal yang akan membawa perubahan dalam sejarah kehidupan manusia. Abad Pencerahan ingin menguji segala sesuatu yang ada dengan akal pikiran, manusia tidak akan menyerah begitu saja kepada keadaan yang ada (Schmid, 1980:102). Gerakan Pencerahan dimulai di Inggris, negeri yang telah melahirkan Revolusi Industri. Kemudian gerakan Pencerahan itu berkembang, meluas ke berbagai wilayah Eropa.

Lahirnya Abad Pencerahan tidak lain dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari belenggu ketakhayulan Abad Gelap. Komponen dasar Abad Pencerahan adalah penolakan terhadap dosa asal, konsepsi tentang semesta sebagai sesuatu yang terbatas, serta pembelaan terhadap kepercayaan diri dan intelektual (Achor, 1967:2). Pencerahan berusaha membebaskan ilmu dari teologi Nasrani, serta membuat kemajuan dalam arah budaya modern yang sekuler dan materialistik. Abad Pencerahan menghendaki agar segala sesuatu dibenarkan dengan akal, dan

manusia bebas menggunakan akalny dalam segala urusan (Fitzimons, 1987:2).

Abad Pencerahan lahir sebagai penentang Abad Gelap. Pengakuan terhadap kekuatan akal dijunjung tinggi. Akal sebagai faktor utama untuk mengubah segala sesuatu yang telah terbelenggu selama Abad Gelap. Teori ketakhayulan dan berbagai paham kuno yang telah membatasi gerak manusia berhasil didobrak oleh kekuatan akal. Dengan berlandaskan akal budi yang jujur dan warisan masa lampau tanpa mempertimbangkan lebih dahulu (Godechot, 1989:9). Daya pikir manusia sebagai satu-satunya kekuatan yang mampu mengatasi segala rintangan ditanamkan dalam era Pencerahan ini. Akibatnya sifat umum gaya penghidupan Abad Gelap tergeser posisinya. Akal sebagai faktor penentu segala-galanya.

Abad Pencerahan dikatakan sebagai abad optimistis (Hamersma, 1983:2). Pencerahan merupakan masa yang cerah, masa *sunlight*, lepas dari masa *drakness*, untuk menuju sinar matahari yang terang. Manusia berpegang pada akal sehat yang dimiliki (Guerard, 1959:204), untuk mencapai hal-hal yang lebih tinggi dan lebih baik dibandingkan masa sebelumnya. Sedikit demi sedikit tumbuh kesadaran akan kemerdekaan jiwa dan persamaan. Kemerdekaan bukan hak istimewa yang khusus dimiliki oleh beberapa orang tertentu saja, melainkan hak tiap-tiap orang. Manusia Abad Pencerahan bersatu dalam kebebasan (Gay, 1968:3). Manusia bebas untuk berpikir, mengeluarkan pendapat, dan bebas menikmati keindahan dunia ini sepuas-puasnya.

Pemikiran manusia Abad Pencerahan lebih hidup dan penuh keberanian. Ide-ide kemajuan tersebar luas, dengan akal sehat sebagai kekuatan penyatu (Achor, 1967:4). Berbagai macam ilmu pengetahuan berkembang pesat, sebaliknya kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat takhayul makin berkurang. Manusia bebas mengembangkan segala kemampuan dalam menilai keadaan. Abad Pencerahan telah melahirkan filosof-filosof terkemuka seperti John Locke (1632-1704) dari Inggris, Montesquieu (1689-1755) dari Prancis, Frederick Agung (1712-

1786) dari Prusia. Para filosof tersebut dikenal sebagai orang-orang yang berani dan mempunyai kesengajaan untuk membawa kejernihan dalam pemikiran manusia (Mayer, 1963:93). Mereka termasuk orang-orang genius, orang-orang berbakat yang pada umumnya berjuang melawan penindasan, kekacauan, kekejaman dalam pemerintahan, agama dan hukum (Gershoy, 1964:58). Mereka ibarat pasukan pembawa cahaya yang siap tempur menghadapi berbagai penyelewengan-dengan bersenjatakan sindirian dan ejekan tajam dari pena-pena mereka (Mayer, 1963:93). Para filosof mengajarkan tentang kebenaran.

Gagasan para filosof itu berangsur-angsur membuka cakrawala pemikiran manusia. Manusia menjadi semakin sadar untuk menggunakan rasionya dalam memandang, menerima, dan memutuskan gejala-gejala tertentu yang ditemui dalam perjalanan hidupnya. Jiwa manusia tergugah untuk melakukan segala aktivitas sendiri tanpa terikat oleh golongan lain. Manusia dilatih untuk berani melontarkan rasa ketidakpuasan terhadap ketidakseimbangan yang berlangsung dalam masyarakat. Mereka menjadi semakin kritis terhadap segala sesuatu yang dihadapi. Segala bentuk penindasan, serta kesewenang-wenangan dalam pemerintahan rezim lama menjadi kecaman bersama, sekaligus sasaran utama dalam perubahan.

Pemikiran Abad Pencerahan dengan cepat menyebar ke wilayah-wilayah Eropa, misal di Prancis. Prancis pada waktu itu masih di bawah cengkeraman rezim despotisme sewenang-wenang. Perkembangan intelektual di Prancis harus berhadapan dengan pemikiran tradisional rezim lama yang ada. Oleh sebab itu, perkembangan Abad Pencerahan di Prancis diarahkan pada kekuasaan mutlak yang sudah tertanam selama bertahun-tahun.

PENCERAHAN DI PRANCIS DAN TOKOH-TOKOHNYA

Era Pencerahan di Prancis dikenal dengan istilah *Le Siècle des Lumières* (Guerard, 1959:203), yang artinya tidak berbeda dengan *Enlightenment* di Inggris ataupun *Aufklärung* menunjuk

pada suatu masa yang disebut Abad Akal atau *the Age of Reason*. Benih-benih Pencerahan di Prancis sudah tampak sejak zaman pemerintahan rezim lama mencapai puncak kebesarannya. Hanya saja dalam perkembangannya belum dilakukan secara terang-terangan karena kuatnya dominasi rezim lama tersebut.

Filsafat Pencerahan Prancis dikembangkan dengan sangat radikal oleh para filosofnya. Mereka bercita-cita untuk menciptakan suatu masyarakat yang didasarkan atas akal dan menentang tradisi masyarakat rezim lama yang masih mewarisi tradisi kuno (Malet and Isaac, 1989:11). Pesatnya perkembangan Abad Pencerahan di Prancis ditandai mereka adalah Descartes yang menandakan agar manusia selalu percaya pada akal sehat yang dimiliki. Kemudian disusul oleh filosof lain seperti Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Dederot, Abbe Mably (1709-1785), Condorcet (1743-1794) (Gershoy, 1964:58). Mereka umumnya memusuhi penyalahgunaan kekuasaan pemerintahan rezim lama. Mereka menyerang kepercayaan takhayul, kebodohan dan ketololan, sistem administrasi yang buruk, serta prosedur kehakiman yang biadab (Gershoy, 1964:59). Terbitnya *L'Encyclopedie* (1751-1789) pimpinan D'Alembert menandai kemenangan besar era Pencerahan di Prancis. Buku ensiklopedi itu digunakan sebagai alat untuk mempropagandakan semangat dan idealisme para filosof. Melalui ensiklopedi tersebut segala bentuk kemajuan dan pemikiran ilmu pengetahuan diperkenalkan kepada masyarakat Prancis.

Propaganda yang dilakukan para filosof diarahkan pada ketidakpuasan sistem pemerintahan yang ada. Ide tentang pembaharuan sosial dan politik disebarluaskan. Para filosof secara tidak langsung mengajarkan pada orang-orang Prancis untuk tidak menyerah begitu saja terhadap perlakuan pemerintahan rezim lama (Baumer, 1965:72-73). Buktinya semua usaha intelektual masa itu berupa kritik-kritik terhadap struktur masyarakat feodalisme, pemerintahan absolut, dan dominasi gereja. Dengan berbagai kritik tersebut rakyat Prancis dibangkitkan kesadaran dan keberaniannya agar merombak apa yang dipandang sudah rusak. Rakyat Prancis dibimbing untuk

selanjutnya menuju pada toleransi, kemerdekaan, persamaan serta pengakuan hak-hak mereka sebagai sesama manusia.

Para filosof giat menyerang lembaga-lembaga rezim lama yang ada serta berhasrat mengadakan banyak perubahan di dalamnya. Lembaga pemerintahan yang ada pada waktu itu dianggap telah menyebabkan penderitaan rakyat. Kekuasaan absolut yang dibangun oleh rezim lama hanya melahirkan kesewenang-wenangan raja terhadap rakyat. Para filosof berusaha merangsang opini rakyat untuk melakukan perubahan fundamental dalam sistem sosial politik rezim lama. Karya mereka sering bersifat destruktif bila dihadapkan pada rezim lama, dan konstruktif untuk membangun suatu pemerintahan baru (Gershoy, 1964:58). Hal ini secara tidak disadari, bahwa dari berbagai pemikiran para filosof tersebut telah merintis bagi jalannya perubahan secara besar-besaran bentuk pemerintahan rezim lama.

Di antara para filosof tersebut di atas, Montesquieu dan Voltaire dianggap sebagai filofof pemula yang paling berpengaruh bagi perkembangan Abad Pencerahan di Prancis (Gershoy, 1964:58). Montesquieu dikenal sebagai ahli pikir Prancis terkemuka dalam dalam masalah politik dan kenegaraan (Schmid, 1980:168), sedangkan Voltaire diketahui sebagai pendukung utama berkembangannya Abad Pencerahan di Prancis (Blum, 1966:410). Tampilnya Rousseau dalam kancah Pencerahan di Prancis semakin menambah pesatnya perkembangan Abad Pencerahan di Prancis. Pemikiran mereka bertiga mempunyai pengaruh besar di kalangan masyarakat Prancis yang hidup di bawah kekuasaan rezim lama. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikemukakan tentang ketiga filosof di atas berikut hasil karyanya yang paling terkemuka.

1. Montesquieu (1685-1755)

Lahir 18 Januari 1685 di *Chateau de la Brede* Prancis, dengan nama lengkap *Charles Secondat de la Brede et de Montesquieu* (Sheimer, 1950:43). Dalam perjalanan hidupnya ia lebih dikenal dengan nama Montesquieu saja.

Montesquieu berasal dari keluarga bangsawan Prancis kuno yang masih taat ada aturan-aturan feodal. Namun demikian Montesquieu bukan seorang bangsawan yang malas, yang hanya duduk menikmati hidup bagai umumnya bangsawan Prancis rezim lama. Dengan semangat luar biasa Montesquieu berhasil menjadi seorang otodidak. Kegagalannya dalam bercinta merupakan latar belakang yang mempengaruhi penarikan diri Montesquieu ke dunia belajar, dan berhasil memperoleh gelar sarjana (Gershoy, 1964:37). Montesquieu banyak menggunakan waktunya untuk belajar dan berpikir segala macam ilmu yang berkaitan dengan manusia. Untuk menambah ilmunya, tidak jarang Montesquieu mengadakan perjalanan keliling Eropa terutama ke Inggris, suatu negara yang banyak mempengaruhi karya-karyanya. Dengan pengalaman inilah Montesquieu dapat menilai keadaan Prancis masa itu secara kritis.

Tahun 1727 Montesquieu menerbitkan karya pertamanya, yang dalam edisi bahasa Inggris diberi judul *The Persian Letters*, Surat-surat dari Persia (Anchor, 1967:35). Dalam buku ini Montesquieu secara tajam mengkritik keadaan Prancis masa pemerintahan rezim lama. Secara lengkap dibahas tentang masalah kenegaraan Prancis masa itu. Misal, adanya kebingungan dalam tata politik pemerintahan, ketidakseimbangan ekonomi, kecurangan dalam finansial, serta pengadilan yang sewenang-wenang (Achor, 1967:35). Montesquieu juga mengejek adanya korupsi, hak istimewa bangsawan dan mencemoohkan segala bentuk sistem administrasi pemerintahan rezim lama.

Montesquieu termasuk seorang moderat, yang selalu menekankan keseimbangan kekuatan politik dan konstitusi sebagai sesuatu yang terbaik untuk melindungi kebebasan manusia (Sheimer, 1950:437). Montesquieu sangat menentang absolutisme, perbudakan dan hukuman tradisional yang biadab. Montesquieu selalu membela kebebasan manusia sebagai warga negara. Setiap warga negara mempunyai kebebasan untuk bertindak menurut kemauannya sendiri. Kebebasan manusia ada di bidang politik, atau sekurang-kurangnya manusia dapat menikmati kebebasan dalam hidupnya. Kebebasan ini dapat diwujudkan dalam pemerintahan yang berdasarkan atas

pemisahan kekuasaan. Hal semacam ini tidak tampak dalam pemerintahan Prancis rezim lama. Pada masa rezim lama semua tugas kenegaraan terikat dalam genggamannya satu tangan, yaitu kekuasaan raja.

Keadaan Prancis seperti itu, merupakan sumber inspirasi bagi pemikiran Montesquieu. Karya pemerintahannya tertuang dalam bukunya yang berjudul *Del'Esprit des lois* (Jiwa Undang-undang). Dalam buku ini Montesquieu menyetengahkan tentang dasar-dasar suatu analisis konstitusional. Dikemukakan oleh Montesquieu bahwa, bentuk negara yang paling baik ialah monarki parlementer atau monarki konstitusional, karena dalam negara seperti itu kebebasan akan dijamin dengan undang-undang. Dengan konstitusi maka kekuasaan dalam negara akan dipisahkan menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif sebagai penguasa pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksanaan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif yang menangani masalah pengadilan (Malet dan Isaac, 1989:181). Bila masing-masing kekuasaan ini dipisahkan secara tegas, maka tidak mungkin memberi kesempatan pada seseorang untuk menjadi pembuat undang-undang, memutuskan pidana ataupun sebagai pelaksana sekaligus. Oleh karena itu, Montesquieu menganjurkan adanya pembagian kekuasaan dan menolak kekuasaan sewenang-wenang Pemerintahan yang sewenang-wenang akan membawa akibat kesengsaraan bagi rakyat.

2. Voltaire (1684-1778)

Voltaire sebetulnya nama samaran dari *Francois Marie Arouet* seorang filosof Prancis yang dilahirkan di Paris tanggal 21 November 1684 (Shadily, 1984:3851). Di samping sebagai seorang filosof, Voltaire juga seorang pengarang dan tokoh besar dalam era Pencerahan di Prancis.

Voltaire sangat menghargai akal manusia sebagai satu-satunya alat yang dapat mengubah keadaan manusia. Voltaire yakin hanya akal yang akan memimpin manusia dari masa silam

menuju masa kini, dan akan menentukan masa depan yang lebih cemerlang. Voltaire banyak mengkritik dengan pedas masyarakat Prancis rezim lama. Voltaire terkemuka sebagai tokoh penalaran dan toleransi, sebagaimana kutipan berikut ini:

Yang paling menonjol dari Voltaire sebagai seorang pemikir, ahli filsafat, penulis sastra dan sejarah adalah kebenciannya pada kefanatikan, diskusi filsafat dan keagamaan yang tertele-tele, sehingga tidak masuk akal dan mengabaikan masalah-masalah manusia yang utama (Voltaire, 1989:9).

Voltaire seorang yang cinta dan sangat memperjuangkan keadilan, baik melalui karya-karyanya maupun kehidupan yang sebenarnya. Voltaire mempunyai pandangan hidup yang praktis dan realitstis. Berbagai tulisannya sangat sederhana, namun di balik itu semua terkandung filsafat hidup, sindiran, kritikan bahkan serangan tajam yang ditujukan terhadap pemerintahan rezim lama. Voltaire ingin menghancurkan semua hal yang dianggap buruk dan membela alam pikiran yang bebas serta menentang absolutisme (Gershoy, 1964:64).

Kritikan Voltaire selalu bernada kasar, tepat mengenai sasaran, hal yang demikian menyebabkan Voltaire sering bentrok dengan kaum gereja dan bangsawan. Voltaire selalu dikejar-kejar aparat pemerintah yang tidak senang dengan pemikirannya. Voltaire sering keluar masuk penjara karena tajamnya tulisan yang dibuat.

Tahun 1776 Voltaire tinggal di Inggris (Gershoy, 1964:65). Selama berada di Inggris Voltaire tidak tinggal diam. Bakatnya sebagai seorang penulis tidak pernah putus, bahkan negeri Inggrislah yang banyak memberikan ilham untuk menulis. Tahun 1777 Voltaire berhasil menyelesaikan buku yang diterbitkan dalam bahasa Inggris diberi judul *Letters of the English*. Buku ini menggambarkan suatu negeri yang menjamin kebebasan berpendapat warga negaranya dengan suatu undang-undang, dan tidak mengenal adanya penindasan agama. Meskipun buku ini ditulis di Inggris, Voltaire tidak bermaksud untuk menggambarkan Inggris dan bangsa Inggris sendiri secara

mendetail. Dengan buku ini Voltaire ingin menggambarkan hal-hal yang mungkin dapat dipergunakan untuk menciptakan Prancis sebagai suatu negeri yang ingin membahagiakan rakyatnya. Hal ini merupakan pukulan berat bagi pemerintah Prancis rezim lama, yang tidak mempunyai ciri sebagaimana disebutkan oleh Voltaire. Oleh sebab itu, karya Voltaire dengan judul itu tidak diperbolehkan beredar di Prancis.

Voltaire bekerja keras untuk mengembangkan ide Pencerahan di Prancis dianggap sebagai pembawa panji-panji gagasan Pencerahan (Malet and Isaac, 1989:180). Voltaire berjuang melawan dominasi gereja, hak-hak istimewa kaum bangsawan, serta absolutisme dalam pemerintahan. Dalam perjuangannya Voltaire menuntut adanya kebebasan bagi perseorangan yang meliputi persamaan hak, kebebasan berpikir serta kebebasan berpendapat.

3. Jean Jacques Rousseau (1711-1778)

Rousseau termasuk tokoh besar dalam Abad Pencerahan, khususnya dalam masalah sosial dan politik. Dia putra seorang tukang arloji Genova yang dilahirkan di Swiss tahun 1712. Perjalanan hidup Rousseau dilalui dengan sangat sederhana, dan dengan berbagai macam penderitaan. Sejak masa kanak-kanak, Rousseau sudah meresa hidup sendiri, karena ibunya meninggal ketika melahirkan (Rousseau, 1986:xi). Rousseau tidak pernah dididik oleh orang tuanya. Ayahnya, sejak ibunya meninggal tidak dapat lagi dijadikan sebagai sandaran pelipur lara. Rousseau tumbuh besar tanpa bimbingan dan arahan yang benar. Dia memperoleh pendidikan secara otodidak (Schmid, 1980:171).

Kehidupan masa muda Rousseau tidak menentu. Rousseau sering berpindah-pindah tempat tinggal. Kadang-kadang tinggal di Prancis dan kadang-kadang di Swiss. Berkat ketekunannya dalam belajar akhirnya Rousseau berhasil menjadi seorang pemikir besar. Oleh Schmid (1980:172) Rousseau dikatakan sebagai orang yang alam pikirannya bagaikan obor menyala-nyala yang berjalan paling depan memimpin orang banyak dalam menyerbu suatu perbentengan.

Rousseau mempunyai pemikiran hebat dalam setiap karya-karyanya. Dia dikenal sebagai pembangkit impian demokratis suatu masyarakat tertindas (Rousseau, 1986:xi). Rousseau adalah juru bicara yang sangat baik bagi nilai-nilai persamaan, sehingga suatu golongan masyarakat yang menderita merasa tergugah untuk mewujudkan renungan Rousseau. Rousseau sangat membenci perbudakan, karena perbudakan itu mencabut kebebasan manusia dan merendahkan derajat manusia.

Banyak karya-karya yang berhasil ditampilkan oleh Rousseau. Diantara berbagai karyanya itu yang paling berkesan adalah berjudul *Contract Social* atau Perjanjian Masyarakat. Buku ini ditulis pada tahun 1762 (Gershoy, 1964:74). Dalam buku ini Rousseau menyebutkan bahwa berdirinya suatu negara berdasarkan atas suatu kontrak sosial, yaitu persetujuan yang dilakukan oleh individu-individu untuk hidup bersama secara damai. Pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan hasil persetujuan dari anggota-anggota masyarakat itu pula. Dengan demikian para penguasa pemerintahan dalam tugasnya harus sesuai atau selaras dan menurut persetujuan bersama yang telah dibuat dan ditetapkan (Schmid, 1980:172-173).

Berdasarkan konsep ini pemerintah Prancis pada masa rezim lama tidak memperlihatkan hal-hal yang dianjurkan oleh Rousseau. Penguasa pemerintah Prancis waktu itu tidak mau menghormati hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya. Pemerintah rezim lama tidak bertindak ataupun berkehendak menurut persetujuan dengan rakyat Prancis. Oleh karena itu, dengan berbagai tulisannya, Rousseau berusaha membangkitkan kesadaran rakyat Prancis untuk menentang rezim lama yang mengabaikan hak-hak manusia.

PENGARUH PENCERAHAN BAGI GOLONGAN KETIGA

Dalam konteks sejarah Prancis, pesatnya perkembangan Abad Pencerahan disebabkan oleh sistem politik pemerintahan monarkhi absolut. Sistem pemerintahan absolut telah membelenggu kebebasan warga negara Prancis. Hal ini menyebabkan Prancis tenggelam dalam suatu bentuk

pemerintahan yang amat kejam dan kacau balau. Ide-ide yang ditampilkan oleh Rousseau, Voltaire ataupun Montesquieu berkisar pada kebobrokan yang berlangsung pada masa pemerintahan rezim lama. Mereka berjuang melawan monarki absolut tersebut dan kebebasan manusia.

Di Prancis ternyata tidak semua golongan ketiga memahami arti petingnya lahirnya Abad Pencerahan. Hanya sebagian kecil dari golongan ketiga yang turut serta dalam perkembangan kebudayaan Abad Pencerahan. Lebih-lebih di kalangan kaum petani, sedikit sekali di antara mereka yang terlibat langsung dalam arus Pencerahan. Keasyikan hidup sebagai petani setiap hari tidak memberi kesempatan pada mereka untuk memikirkan berbagai masalah di luar pertanian. Kehidupan kaum petani hanya dikejar oleh pikiran untuk memenuhi kebutuhan esok harinya. Oleh karena itu, bersamaan dengan berkembangnya Abad Pencerahan, dalam kehidupan petani sangat sedikit sekali terjadi perubahan (Romein, 1956:109). Kedudukan ekonomi kaum petani tidak memungkinkan untuk mengejar pendidikan.

Optimisme Abad Pencerahan berkembang pesat di kalangan kaum borjuis. Kaum borjuis merupakan minoritas golongan ketiga yang paling beruntung. Kaum borjuis terdiri atas orang-orang kaya. Mereka tidak pernah direpotkan pada permasalahan ekonomi setiap harinya. Kaum borjuis sebagai kelas berharta, sehingga mereka mempunyai banyak waktu untuk memikirkan permasalahan lain di luar perekonomian. Lahirnya Abad Pencerahan mendapat sambutan besar di kalangan kaum borjuis. Mereka banyak berkesempatan untuk memperoleh pendidikan. Dengan demikian di kalangan kaum borjuis banyak orang-orang pandai ataupun sarjana. Misal, Francois Quesnay, (1694-1774) yang dilahirkan dari keluarga petani, akan tetapi berhasil menjadi dokter istana pada masa pemerintahan Louis XV (Gershoy, 1964:70). Kemudian disusul oleh Brissot (1754-1793) anak laki-laki seorang juru masak yang berhasil menjadi salah seorang cendekiawan Prancis masa itu.

Selama pemerintahan rezim lama, kaum borjuis merupakan satu-satunya kelas yang paling progresif di antara

golongan ketiga lainnya (Achor, 1967:6). Mereka merasa bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam era pembaharuan itu (Richard, 1950:3). Kaum borjuis mengembangkan ide-ide pencerahan, seperti ide persamaan, dan hak asasi, serta ide kekuasaan dengan undang-undang. Mereka sebagai penentang paling keras terhadap sistem pemerintahan rezim lama, sejak timbulnya penghinaan terhadap mereka karena bukan keturunan bangsawan. Misal Barnave, dia seorang miskin yang karena kerja kerasnya dapat menjadi pengacara di Prancis waktu itu. Barnave sejak kecil telah membenci sistem kemasyarakatan rezim lama, setelah ibunya diusir oleh salah seorang kaum bangsawan waktu menonton teater dari kelas lounge (Furet and Richet, 1989:31). Satu contoh peristiwa itu menyebabkan kaum borjuis sangat membenci kaum gereja dan bangsawan. Kaum borjuis tidak mau lagi mendukung pemerintahan rezim lama, serta membenci agama yang tidak rasional. Kaum gereja dan bangsawan dianggap sebagai benalu yang menghisap hak-hak rakyat demi mempertahankan hak-hak istimewa mereka (Richet and Furet, 1989:12). Kaum borjuis menyadari bahwa dalam menghadapi hal-hal yang sangat menekan itu harus digalakkan akal sehat, kemajuan dan moral yang tinggi.

Kaum borjuis menyebarkan ide-ide Pencerahan di kalangan rakyat Prancis. Mereka mendalami aliran pikiran baru, filsafah baru dalam suatu diskusi yang diadakan di *Patriote Francais* tahun 1789. Kemudian Marat, yang telah selesai mempelajari buku Perjanjian Masyarakat milik Rousseau, banyak memimpin diskusi umum di jalan-jalan Paris sekitar tahun 1788-1789 (Geshoy, 1964:79).

Pada masa itu, kaum borjuis sering berkumpul dan mempropagandakan ide-ide reformasi. Perasaan frustrasi yang menimpa kaum borjuis menyebabkan mereka menuntut adanya perubahan (Furet and Richet, 1989:12) dalam waktu singkat. Penyebaran pamflet yang mengobarkan perasaan bermusuhan terus menerus bertambah. Semua rakyat Prancis waktu itu sudah terbawa oleh gelombang optimisme besar dengan terbitnya berbagai brosur yang membangunkan kesadaran mereka.

Bab 4

GOLONGAN KETIGA DAN REVOLUSI PRANCIS

Dalam bab berikut dipaparkan tentang peranan golongan ketiga dalam Revolusi Prancis 1789. Pertama diuraikan tentang golongan ketiga dan penyebab revolusi, kedua pelaksanaan sidang Dewan Perwakilan Golongan, ketiga tentang tampilnya Mirabeau sebagai salah satu sosok wakil golongan ketiga, keempat diuraikan tentang kekuatan rakyat dalam Revolusi Prancis. Bab ini diakhiri dengan gerakan revolusi yang dilakukan oleh rakyat.

GOLONGAN KETIGA DAN PENYEBAB REVOLUSI

Revolusi merupakan perubahan yang terjadi secara cepat, mendasar di berbagai lembaga politik, sosial, dan ekonomi negara (Muhaimin, 1983:232). Perubahan yang mendasar ini sebagai akibat tumbangny pemerintah yang sudah mapan. Hal ini terjadi setelah melewati proses akumulasi kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan yang tidak dapat membangun kesejahteraan mereka. Rakyat dibebani berbagai macam kewajiban, sementara hak-hak mereka dipasung. Pada kondisi inilah menurut Soedjatmoko (1989:1) semangat rakyat akan meledak menolak keadaan yang ada, serta mengharapkan masa depan yang lebih adil, bebas, dan sejahtera.

Revolusi mempunyai hukum fundamental. Dalam tulisannya Hermawan Sulisty (1980:67) mengatakan bahwa Presiden Soekarno pernah menyatakan ada enam hukum

fundamen
kamerad c
siapa lawa
adalah rev
dari atas
kekuatan
dan pemb
dan pemb
tahapant
Kelima, rev
revolusi ha
pemimpin
fundament
berbagai r
keadaan in

Di
nurang pe
Masyarakat
stimewa, y
tidak mem
golongan
merupakan
adilan pe
paling bany
pertama, da
stimewa d
pajak, seda
sewenang-w
Rev
agung (198

Bukan
dari l
terhad
Sehu
merupakan

fundamental revolusi. *Pertama*, revolusi harus mengandung unsur kamerad dan revolusioner. Kaum revolusioner harus mengetahui siapa lawan dan siapa kawan. *Kedua*, revolusi yang sesungguhnya adalah revolusi rakyat, revolusi tersebut harus dijalankan serentak dari atas (pemimpin atau pelopor revolusi) dan dari bawah (kekuatan rakyat). *Ketiga*, revolusi indentik dengan penghancuran dan pembangunan, karena penghancuran tanpa pembangunan dan pembentukan adalah anarkhi. *Keempat*, revolusi mempunyai tahapan-tahapan tertentu sebelum mencapai titik klimaksnya. *Kelima*, revolusi harus mempunyai program yang jelas. *Keenam*, revolusi harus mempunyai pijakan yang memadai dan seorang pemimpin yang berpandangan jauh ke depan. Hukum fundamental tersebut merupakan karakteristik revolusi di berbagai negara, meskipun revolusi itu terjadi sebagai akibat keadaan internal yang ada.

Di Prancis sampai menjelang revolusi meletus, terdapat jurang pemisah antara masyarakat dengan pemerintahan. Masyarakat terdiri atas golongan yang mendapatkan hak-hak istimewa, yaitu kaum gereja dan bangsawan, serta golongan yang tidak memiliki hak-hak istimewa yaitu kaum petani dan borjuis (golongan ketiga). Dilihat dari segi kuantitas golongan ketiga merupakan golongan mayoritas. Akan tetapi, dilihat dari segi keadilan pembagian hak dan kewajiban, golongan ketigalah yang paling banyak dikenai kewajiban. Kaum gereja sebagai golongan pertama, dan kaum bangsawan golongan kedua memiliki hak-hak istimewa di depan hukum dan pemerintahan, serta bebas dari pajak, sedangkan dalam golongan ketiga berlaku absolutisme sewenang-wenang.

Revolusi Prancis seperti dikatakan oleh Anak Agung Gde Agung (1989:1)

Bukanlah merupakan peristiwa tiba-tiba ibaratnya jatuhnya benda dari langit biru yang cerah, akan tetapi merupakan reaksi terhadap tata pemerintahan lama (*Ancient Regime*) yang feodalistis.

Sehubungan dengna pernyataan di atas, Revolusi Prancis merupakan pergolakan yang kompleks. Revolusi Prancis tidak

terjadi dengan sendirinya, akan tetapi Revolusi Prancis meletus akibat suatu keadaan. Setidaknya ada empat faktor yang menyebabkan meletusnya Revolusi Prancis:

1. Politik

Faktor politik mencakup adanya sistem pemerintahan monarkhi absolut. Dalam pemerintahan absolut tersebut raja merupakan satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi kerajaan. Raja berkuasa tanpa batas, tanpa tanggung jawab kepada rakyat (Dickinson, 1952:20).

Di samping kekuasaan raja yang mutlak, dalam pemerintahan absolut tersebut masih dipengaruhi oleh kekuatan lain yang mempunyai andil sangat besar terhadap berbagai keputusan raja, yaitu kaum gereja dan bangsawan. Mereka mempunyai hak istimewa politik yang menyangkut berbagai jabatan penting dalam pemerintahan rezim lama. Dengan hak istimewa yang dimiliki itu, kaum gereja dan bangsawan menjadi golongan penindas rakyat. Di pihak rakyat kebanyakan, meskipun jumlahnya besar, mereka tidak mempunyai hak apa pun dalam bidang politik. Mereka hanya mempunyai kewajiban untuk diperintah secara taat.

2. Ekonomi

Terdapat perbedaan mencolok dalam bidang ekonomi antara golongan atas (kaum gereja dan bangsawan) dengan golongan bawah, yakni rakyat kebanyakan yang biasa disebut golongan ketiga. Perkembangan industri, perdagangan, dan pertanian Prancis waktu itu tidak membawa kesejahteraan rakyat pada umumnya (Hayes, 1956:690). Pada satu pihak kaum rakyat kebanyakan hidup dalam kemiskinan. Khususnya kaum petani, hanya dibebani berbagai macam kewajiban membayar pajak untuk menutup kehancuran ekonomi yang dialami oleh penutup kehancuran ekonomi yang dialami oleh pemerintah rezim lama.

Perekonomian Prancis semakin parah pada masa pemerintahan Louis XVI. Hal ini karena pemerintahan Louis

XVI harus para pen Perang K

D
memberi
azupun
dikeluarka
samping i
oleh siste
pemboros
hadimya
keuangan
mewah, da
negara.

Ke
segala hart
Louis XVI
yang ditar
sana mem
Richard, 1
pada awal
Lotre, seda
ah defisit
waktu itu
sana petar

3. Sosial

Ka
waktu itu.
kaum borju
mabil bagia
borjuis suda

Lotre ac
lana, tetapi
1789, yaitu s

XVI harus menanggung biaya peperangan yang dilakukan oleh para pendahulunya, atau keterlibatan Louis XVI sendiri dalam Perang Kemerdekaan Amerika tahun 1770

Dalam perang kemerdekaan Amerika itu Prancis telah memeberikan sumbangan besar, baik berupa pengiriman pasukan ataupun sumbangan keuangan. Diperkirakan biaya yang dikeluarkan mencapai 1.200.000.000 livre.¹ (Richard, 19550:9). Di samping itu, hancurnya perekonomian Prancis juga disebabkan oleh sistem administrasi keuangan yang kacau, didukung oleh pemborosan yang dilakukan pihak istana. Lebih-lebih dengan hadirnya Marie Antoinette, permaisuri Louis XVI. Keadaan keuangan negara semakin berkurang, karena ratu berselera hidup mewah, dan untuk membiayai kemewahan itu diambilnya dari kas negara.

Kemewahan kehidupan istana dapat digambarkan dengan segala harta benda yang dimiliki oleh raja dan ratu. Pada waktu itu Louis XVI mempunyai 2000 ekor kuda, 200 pasang kereta istana yang ditarik kuda. Permaisuri mempunyai 500 orang pelayan, serta membutuhkan empat pasang sepatu baru setiap minggu (Richard, 1950:9). Disebutkan oleh Levebvre (1971:118) bahwa pada awal tahun 1789 pengeluaran pemerintahan mencapai 629 Livre, sedangkan penerimaan hanya sekitar 503 juta livre, berarti ada defisit sebesar 121 juta livre. Kesulitan ekanomi Prancis waktu itu menjadikan depresi bagi golongan ketiga, khususnya kaum petani.

3. Sosial

Kaum borjuis berhasil menguasai perekonomian Prancis waktu itu. Berkat keuletan dan ketekunannya dalam bekerja, kaum borjuis adalah satu-satunya golongan ketiga yang berhasil ambil bagian dalam pemerintahan rezim lama. Kendatipun kaum borjuis sudah mengabdikan dalam pemerintahan rezim lama, mereka

¹Livre adalah mata uang pokok pada masa pemerintahan Prancis rezim lama, tetapi tidak ada mata uang logam satu livre. Nilai livre ditetapkan pada 1726, yaitu sama dengan empat setengah gram perak.

tidak mendapatkan kesempatan untuk menduduki jabatan istimewa sebagaimana kaum bangsawan dan gereja.

Kaum borjuis bagaimanapun keadaannya bukan keturunan bangsawan, oleh karena itu mereka tidak dapat mejadi pimpinan dalam pemerintahan rezim lama. Kaum gereja dan bangsawan memandang kaum borjuis tetap menjadi golongan terendah dalam negeri (Levebvre, 1971:38). Akibatnya banyak dari kalangan kaum borjuis itu yang tergerak oleh kemauan besar untuk merebut kekuasaan dari tangan kaum gereja dan bangsawan (Godechot, 1989:35). Kaum borjuis menjadi golongan radikal yang menggerakkan kekuatan rakyat untuk berevolusi. Rakyat kebanyakan yang secara sosial terus menerus ditindas oleh rezim lama, menjadi mudah sekali digerakkan untuk melawan kekuasaan sewenang-wenang.

4. Ideologi

Faktor ideologi yang dimaksudkan adalah adanya pengaruh ide-ide yang dapat mengubah alam pikiran rakyat Prancis dari suasana kehidupan monarkhi ke arah kehidupan baru yang dicita-citakan. Pengaruh ideologi datangnya dari buku-buku yang ditulis para filosof abad itu.

Kaum borjuis sebagai golongan cendekiawan merasa dirangsang oleh hadirnya tulisan para filosof tersebut. Akhirnya mereka mempunyai tekad, bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh jalan keluar dari keadaan mencekam itu ialah dengan mengubah bentuk rezim lama secara radikal (Furet and Richet, 1989:70). Kaum borjuis menyebarkan tekadnya di kalangan rakyat Prancis.

Di samping itu, masih ada hal lain yang turut mempengaruhi jalan pikiran rakyat Prancis masa itu, yaitu peristiwa meletusnya Revolusi Amerika. Terjadinya Revolusi Amerika menyebabkan rakyat Prancis menjadi mengerti pada kehidupan demokratis, bebas dan mengarah pada kemajuan. Hal ini didukung oleh lahirnya *Declration of Independence* atau Pernyataan Kemerdekaan, sebagai hasil nyata dari Revolusi Amerika.

Deklarasi yang disusun oleh bangsa Amerika itu sangat menarik untuk dibaca dan didiskusikan para intelektual Prancis (Hayes, 196:684). Terutama kalimat yang ditulis oleh Thomas Jefferson, bahwa suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal jika tiap-tiap makhluk diciptakan bebas dan merdeka oleh penciptanya untuk mengejar suatu kehidupan yang bahagia (Gde Agung, 1989:2). Banyak tokoh-tokoh militer Prancis, seperti Lafayette yang sangat terkesan dengan kalimat-kalimat dalam Deklarasi Amerika. Sepulang dari Amerika, Lafayette bertekad untuk merombak tatanan lama yang bertentangan dengan harkat manusia. Rakyat Prancis didorong untuk mengupas keadaan Prancis yang sangat jauh dengan apa yang diucapkan oleh Thomas Jefferson. Revolusi Amerika mendorong rakyat Prancis untuk mengikuti jejaknya.

Faktor-faktor tersebut berkaitan satu sama lain, sehingga menyebabkan timbulnya keresahan di kalangan rakyat Prancis. Keresahan rakyat Prancis waktu itu ditandai oleh ketidakpuasan dan suasana gelisah di kalangan penduduk. Di samping itu, keadaan alam yang tidak menentu semakin memperburuk kehidupan kaum petani Prancis. Antara lain, datangnya musim kemarau yang berkepanjangan pada tahun 1785 yang menyebabkan rumput kering dan makanan ternak berkurang. Sebagian ternak mati karena kekurangan bahan makanan. Akibatnya Prancis kekurangan daging. Tahun berikutnya muncul krisis baru, tetapi tidak disebabkan oleh bencana alam. Krisis tersebut adalah krisis perdagangan dan industri akibat perjanjian dagang antara Prancis dengan Inggris tahun 1786. Dari hasil perjanjian ini Prancis menjadi dibanjiri oleh barang-barang produk Inggris yang industrinya lebih maju. Perusahaan Prancis tidak mampu bersaing dengan perusahaan Inggris, karena barang-barang Inggris lebih bagus dan murah harganya (Gershoy, 1964:102-103). Banyak perusahaan Prancis terpaksa gulung tikar. Akibatnya ribuan buruh menganggur. Misal, di daerah Lyon jumlah pengangguran mencapai 12.000 orang. Dalam keadaan itu biaya hidup menjadi berlipat ganda, sedang lapangan kerja

terhenti atau tidak menentu, terkadang ada, tetapi kadang-kadang sukar didapat (Furet and Richet, 1989:83).

Rakyat belum sempat bangun kembali dari semua penderitaan, pada tahun 1788 disusul krisis baru dalam bidang pertanian. Pada tahun itu panen gandum mengalami kegagalan karena datangnya musim dingin yang sangat hebat, dan telah menghancurkan ladang-ladang gandum. Hujan es melanda hampir seluruh wilayah Prancis, sungai-sungai membeku, kincir-kincir air tidak dapat digerakkan sehingga terjadilah kekurangan gandum (Malet and Isaac, 1989:23).

Berbagai faktor politik, ekonomi, sosial dan perkembangan intelektual, serta krisis dalam negeri yang disebabkan oleh bencana alam dan hubungan luar negeri, telah membuat Louis XVI dalam posisi terjepit. Louis XVI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi tidak mau menyerahkan kekuasaan kepada rakyat begitu saja. Ia ingin tetap mempertahankan *status quonya* sebagai raja. Pada sisi lain Louis XVI dituntut agar dapat menyelesaikan krisis yang melanda seluruh Prancis. Untuk mengatasi masalah itu Louis XVI memanggil para bangsawan Prancis. Usaha Louis XVI tidak membawa hasil. Dalam keadaan ini Louis XVI terpaksa mengundang *Estate General* atau Dewan Perwakilan Golongan.

SIDANG DEWAN PERWAKILAN GOLONGAN (ETATS GENERAUX)

*Etats Generaux*² dalam sistem monarkhi Prancis merupakan suatu Dewan Penasehat yang mewakili tiga golongan masyarakat yakni kaum gereja, bangsawan dan golongan ketiga (Malet dan Isaac, 1989:118) Raja memanggil Dewan Perwakilan Golongan hanya dalam situasi genting saja.

Pada masa sistem pemerintahan monarkhi absolut mencapai puncak kejayaannya, Dewan Perwakilan Golongan dibekukan (tahun 1614). Hal ini terjadi karena Dewan Perwakilan

²Untuk selanjutnya digunakan istilah Dewan Perwakilan Golongan.

golongan dianggap tidak diperlukan lagi, semua kekuasaan ada di tangan raja. Akan tetapi berkaitan dengan keadaan Prancis tahun 1788-1789, maka hal itu telah memaksa raja untuk mengundang Dewan Perwakilan Golongan untuk bersidang guna menyelesaikan krisis dalam negeri.

Prancis pada tahun-tahun menjelang revolusi (1780-1789) jauh dari masa rasa aman dan damai akibat terjadinya berbagai krisis, baik politik, ekonomi, ataupun sosial yang melanda seluruh negeri. Misal kenaikan harga makanan pokok, ditambah dengan meningkatnya angka pengangguran, semakin melumpuhkan kehidupan rakyat Prancis. Berturut-turut Turgot, Necker, maupun Calonne³, mengalami kegagalan atas semua jalan keluar yang diajukan untuk memperbaiki situasi dalam negeri yang semakin parah. Segala bentuk perubahan yang pernah dicobakan mendapat tantangan hebat dari kalangan bangsawan dan gereja. Kaum bangsawan dan gereja tidak mau dan tidak akan membiarkan hak-hak istimewanya diganggu.

Dipanggilnya Dewan Perwakilan Golongan pada tahun 1789 merupakan hal yang tidak terelakkan (Brinton, 1962:41). Louis XVI akhirnya mengalah karena terdesak oleh berbagai kebangkrutan pada hampir semua segi kehidupan, serta ketidakmampuannya untuk memulihkan keadaan rakyat. Louis XVI telah berniat untuk meredakan keresahan yang melanda rakyatnya dengan bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Golongan. Oleh sebab itu, pada awal tahun 1789, Louis XVI memanggil kembali Dewan Perwakilan Golongan yang sudah dibekukan selama 175 tahun.⁴ Berita ini diterima dengan luapan

³Turgot, Necker dan Calonne adalah menteri keuangan pada masa pemerintahan Louis XVI. Dalam usaha memperbaiki perekonomian rakyat, mereka mengusulkan agar hak istimewa yang dimiliki kaum bangsawan dan gereja dihapuskan. Oleh sebab itu, usaha-usaha mereka selalu mendapatkan tantangan dari pihak gereja dan bangsawan.

⁴Dewan Perwakilan Golongan terakhir kali bersidang pada tahun 1614, sesudah itu Dewan Perwakilan Golongan ini tidak pernah disebut-sebut dalam pemerintahan rezim lama.

kegembiraan oleh seluruh rakyat Prancis. Usaha Louis XVI itu menyebabkan menitiknnya air mata bahagia bagi rakyat Prancis (Andre, 19556:277). Mengapa demikian? Hal ini oleh rakyat Prancis dianggap sebagai langkah revolusioner pertama bagi perjuangan revolusi mereka. Dengan dipanggilnya Dewan Perwakilan Golongan bersidang, berarti suatu kelonggaran baru telah diberikan oleh raja kepada rakyat. Rakyat diberi kesempatan ikut membicarakan permasalahan politik melalui para wakilnya (Brinton, 1962:92). Dipanggilnya Dewan Perwakilan Golongan memberikan harapan baru bagi rakyat Prancis untuk menentukan masa depannya.

Sebelum sidang terlaksana, mula-mula diadakan acara pemilihan para wakil rakyat dari ketiga golongan. Pada saat acara pemilihan berlangsung terdapat dua permasalahan mendasar yang dijadikan bahan perbincangan. *Pertama*, tentang beberapa jumlah wakil yang akan mewakili golongan ketiga. *Kedua*, tentang metode pemilihan yang digunakan (Gershoy, 1964:100). Masalah pertama diperdebatkan karena golongan ketiga merasa dirugikan seandainya pemilihan masih menggunakan sistem lama.

Dalam sistem lama golongan gereja memiliki 300 orang wakil, golongan bangsawan mempunyai 300 orang wakil sedangkan golongan ketiga yang mewakili 96 persen penduduk hanya diberi perwakilan dengan jumlah yang sama. Para wakil dari golongan ketiga tidak mau menerima jumlah perwakilan yang tidak berimbang itu. Karena seandainya ketentuan lama masih digunakan, sudah pasti golongan ketiga akan kalah. Apalagi antara golongan gereja dan bangsawan terdapat persatuan yang kuat untuk mempertahankan hak-hak istimewa mereka. Kemudian para wakil golongan ketiga memprotes terhadap kaum gereja dan bangsawan yang masih mempertahankan sistem lama.

Para wakil golongan ketiga dengan dukungan kaum gereja dan bangsawan liberal, menuntut agar jumlah mereka digandakan. Akhirnya Louis XVI menyetujui dan memberikan jumlah perwakilan rangkap pada golongan ketiga untuk menghindari ketegangan yang berlarut-larut (Andre, 1956:277-278). Mulai saat

itu golongan ketiga mempunyai 600 orang wakil. Golongan gereja dan bangsawan masih tetap, masing-masing dengan 300 orang wakilnya.

Dari hasil pemilihan tercatat 1201 wakil terdiri atas 300 orang untuk golongan bangsawan, 291 orang untuk golongan gereja, dan 610 orang untuk wakil golongan ketiga (Gershoy, 1957:29). Golongan ketiga mendapatkan jumlah wakil paling banyak. Hal ini disebabkan golongan ketiga memperoleh dukungan dari kaum bangsawan dan gereja liberal.

Pada 1 Mei 1789 para wakil ketiga golongan sudah berada di Istana Versailles. Sidang baru dibuka oleh raja pada 5 Mei 1789 di ruangan *Menus Plaisirs*, tidak jauh dari istana Versailles. Selama persidangan, timbul masalah baru yaitu tentang pelaksanaan sidang, dalam hal ini dipersoalkan apakah sidang akan tetap memakai cara lama dengan pemungutan suara yang dilakukan menurut golongan, atautkah pemungutan suara dilaksanakan bersama-sama (Brinton, 1962:93). Golongan ketiga terus mendesak kepada raja agar pemungutan suara dilangsungkan dalam suatu persidangan bersama. Louis XVI dengan sikapnya yang khas tetap membiarkan persoalan itu kabur dan tidak terselesaikan. Akibatnya sidang Dewan Perwakilan Golongan hanya menghabiskan waktu untuk saling bertengkar di antara golongan-golongan yang ada di dalamnya. Sidang sama sekali tidak menampakkan adanya tanda-tanda akan tercapainya suatu kesepakatan. Para wakil golongan ketiga akhirnya berniat untuk memisahkan diri dari sidang, dengan keyakinan bahwa mereka berada di pihak rakyat.

Pada 6 Mei para wakil golongan ketiga benar-benar memisahkan diri dan menggantikan nama mereka menjadi *Commune* atau perwakilan golongan rakyat rendah (Furet and Richet, 1989:83). Nama baru tersebut mendapat tentangan dari pihak gereja dan bangsawan, tetapi para wakil rakyat tetap tertahan. Para anggota *Commune* merasa diri mereka adalah rakyat, yang mempunyai mandat utama untuk melayani rakyat (Bellag, 1956:63). Mereka terus berjuang menghadapi segala rintangan

atas nama rakyat. Mulai tanggal 9 Juni 1789 rakyat dengan semangat menggebu-gebu membanjiri ruangan *Menus Plaisirs* untuk menyaksikan jalannya sidang (Furet and Richet, 1989:83). Semangat rakyat menimbulkan keberanian dari semua wakil golongan ketiga yang tergabung dalam *Commune*.

Pada 17 Juni 1789, para wakil rakyat sepakat untuk membentuk Dewan Nasional dengan nama *Assembles National*. Dewan Nasional tersebut berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Prancis menggantikan Dewan Perwakilan Golongan. Dewan Nasional dipimpin oleh *Bailly*, seorang politikus ternama di Prancis masa itu. Terbentuknya Dewan Nasional pada 17 Juni 1789 itu menunjukkan keberanian luar biasa dari golongan ketiga, karena keberhasilan mereka dalam merombak tatanan politik rezim lama. Menurut Paul Nicolle (1955:55) penggantian Dewan Perwakilan Golongan menjadi Dewan Nasional merupakan babak baru dalam sejarah politik Prancis. Hal ini dapat dimengerti mengingat sifat, fungsi, dan kedudukan Dewan Nasional jauh berbeda bila dibandingkan Dewan Perwakilan Golongan. Dewan Nasional lebih mewakili aspirasi dan kehendak rakyat Prancis. Kedudukan Dewan Nasional tampak lebih adil dan demokratis.

Dewan Nasional tidak bergantung pada raja, sebagaimana Dewan Perwakilan Golongan. Dalam Dewan Nasional tidak dikenal adanya pemisahan golongan, melainkan berusaha untuk mempersatukan semua golongan menjadi satu kesatuan. Dewan Nasional bertujuan menghapuskan semua hak-hak istimewa, ataupun kekuasaan yang hanya mengutamakan kepentingan individu ataupun golongan (Thompson, 1955:122). Dewan Nasional menuntut persamaan hak serta penghapusan monarki absolut. Kekuasaan raja hendaknya dibatasi, dan raja harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui Dewan Nasional.

Dewan Nasional berhasil membatasi kekuasaan raja. Sejak saat itu Dewan Nasional berkedudukan sebagai penguasa tertinggi dalam pemerintahan rezim lama. Akan tetapi di samping Dewan Nasional masih berdiri kekuasaan tertinggi pemerintahan rezim lama, yaitu Louis XVI beserta para pendukungnya. Pada

dasarnya r
Louis XV
kekuasaan
Raja tidak
ia selalu b
Dewan Na
dan bangs

Pa
ruangan M
dan kecew
di bawah t
tidak jauh
tempat ke
Ruangan J
sekali, dan
tempat du
Andre, 19
pemimpin

Dewa
untuk
regen
prinsi
meng
mend
akhir
berdi
anggo
apabi
dan
sump
masin
perse
memb

Sun
Sampah L
=ereka ber

Golongan Ketig

dasarnya raja sulit untuk mengakui keunggulan Dewan Nasional. Louis XVI masih berstatus sebagai raja yang sah, karena kekuasaannya belum tergeser secara mutlak hanya dibatasi saja. Raja tidak menginginkan kewibawaannya tertanganggu, sehingga ia selalu berusaha menghalangi setiap keputusan yang dibuat oleh Dewan Nasional. Sikap raja mendapat dukungan dari kaum gereja dan bangsawan yang setia.

Pada 20 Juni para wakil rakyat terkejut mendapati ruangan *Menus Plaisirs* ditutup. Meskipun mereka sangat terkejut dan kecewa, tetapi mereka tidak berputus asa. Setelah berunding di bawah turunnya hujan, mereka menuju ke semua ruangan yang tidak jauh dari situ, yaitu ruangan *Jeu de Paume*. Ruangan itu hanya tempat kosong dan biasanya digunakan untuk latihan tenis. Ruangan *Jeu de Paume* tidak berpintu dan tidak berperabot sama sekali, dan hanya diterangi jendela-jendela tinggi. Tidak ada tempat duduk, ataupun hiasan dinding di seputar ruangan itu (Andre, 1956:281). Dengan berdiri di atas meja, *Bailly*, sebagai pemimpin Dewan Nasional mengucapkan sumpahnya:

Dewan Perwakilan Rakyat menimbang bahwa Dewan terpanggil untuk menentukan konstitusi kerajaan, dan melaksanakan regenerasi pemerintahan umum serta mempertahankan prinsip-prinsip yang benar monarkhi, bahwa tidak ada yang bisa menghalanginya untuk melanjutkan pembicaraan yang mendalam, di tempat manapun Dewan terpaksa berada, dan akhirnya dimanapun anggota-anggota berkumpul, di situlah berdiri Dewan Perwakilan Rakyat, ditentukan bahwa semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersumpah dengan khidmat, apabila keadaan memaksa, sampai Konstitusi kerajaan terbentuk dan dikukuhkan atas dasar-dasar yang kuat: dan bahwa jika sumpah tersebut di atas sudah diucapkan, semua anggota, dan masing-masing di antara mereka secara khusus, menegaskan persetujuan mereka akan resolusi yang teguh itu, dengan membubuhkan tanda tangan mereka (Furet and Richet, 1989:5).

Sumpah itu dikenal dengan *The Tennis Courth Oath* atau Sumpah Lapangan Tenis (Richard, 1950:16). Dengan tegas mereka berjanji tidak akan bercerai berai selama konstitusi belum

terbentuk. Mereka dengan kesungguhan mengucapkan sumpah itu, karena merupakan kewajiban mereka sebagai pengemban aspirasi rakyat untuk membentuk konstitusi kerajaan.

Tanggal 23 Juni 1789 diadakan sidang kerajaan. Para wakil golongan ketiga diundang dan ikut hadir dalam sidang tersebut. Sidang dibuka oleh raja sendiri, tetapi apa yang dikatakan oleh raja tidak memberikan harapan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Dengan berbagai cara raja berusaha untuk menghalang-halangi segala tindakan yang dikerjakan oleh Dewan Nasional. Dalam sidang itu raja mengatakan:

Ingat . . . bahwa tidak satupun dari rencana tuan-tuan . . . mempunyai kekuatan hukum, jika tiada persetujuan dari saja . . . Saja perintahkan tuan-tuan dengan segera bubar dan besok tuan-tuan pergi ke tempat yang ditunjuk untuk golongan tuan guna melanjutkan perundingan (Nicolle, 1955:57).

Selanjutnya raja meninggalkan tempat sidang dengan diikuti oleh kaum gereja dan bangsawan yang masih mendukung pemerintahannya. Dalam keadaan seperti itu, para wakil rakyat merasa mendapatkan tantangan baru. Mereka tetap bertahan terikat sumpah yang pernah mereka ucapkan. Dewan Nasional tetap kokoh tak tergoyahkan, bahkan sedikit demi sedikit sebagian golongan gereja dan bangsawan menggabungkan diri dengan golongan ketiga.

Dewan Nasional memang merupakan ancaman terhadap *status quo* Louis XVI. Akan tetapi, berbagai usaha raja untuk memojokkan mereka tidak pernah berhasil. Sejalan dengan makin kuatnya Dewan Nasional, raja memanggil para anggota Dewan Nasional untuk mengadakan sidang. Pada 27 Juni 1789, secara resmi raja mengakui keberadaan Dewan Nasional (Furet and Richet, 1989:88). Para anggota Dewan Nasional terus bertekad untuk mewujudkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan di kalangan rakyat Prancis. Pada 9 Juni 1789 Dewan Nasional berganti nama menjadi *Dewan Nasional Konstituante* (*Assemblée Nationale Constituante*). Tugas utama Dewan Nasional Konstituante

adalah membentuk Undang-Undang Dasar, sebagai peraturan utama untuk membatasi kekuasaan dan wewenang raja.

MIRABEAU SALAH SATU SOSOK WAKIL GOLONGAN KETIGA DALAM DEWAN PERWAKILAN GOLONGAN

Para wakil rakyat yang duduk dalam Dewan Nasional memiliki kewenangan untuk mengarahkan jalannya pemerintahan. Dalam keadaan krisis di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, politik maupun ekonomi, rakyat Prancis mendambakan para wakil rakyat yang dapat menjadi penggerak dan agen pembaharuan. Sementara itu Louis XVI sebagai penguasa Prancis telah kehilangan kewibawaan di mata rakyat Prancis, sehingga dapat dimaklumi bahwa tampilnya Mirabeau dalam Dewan Nasional mendapat sambutan besar. Rakyat Prancis berharap banyak pada Mirabeau untuk memperbaharui keadaan Prancis yang semakin memprihatinkan.

Mirabeau mempunyai nama lengkap *Handre Gabriel Riquett Comte de Mirabeau*. Untuk selanjutnya lebih dikenal dengan Mirabeau saja. Mirabeau lahir di Brignon Prancis pada 9 Maret 1749, sebagai anak laki-laki dari keluarga *Victor Riquetti* seorang bangsawan kaya di Prancis waktu itu. Pada usia tiga tahun Mirabeau terserang penyakit cacar yang membuat wajahnya bopeng. Namun demikian, masalah wajah tidak mempengaruhi sikapnya setiap hari (Rowen, 1973:430).

Mirabeau dibesarkan di lingkungan bangsawan, akan tetapi Mirabeau lebih menaruh simpati besar terhadap penderitaan rakyat akibat berlakunya sistem politik rezim lama. Hal ini disebabkan karena kekecewaan Mirabeau terhadap kaum bangsawan yang telah menghalangi keinginannya untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Bangsawan. Keberanian Mirabeau dalam mengkritik kaum bangsawan, serta pembelaannya terhadap hak-hak manusia, menyebabkan Mirabeau dikucilkan dari kelas bangsawan (Richard, 1950:32). Tetapi Mirabeau tidak pernah merasa kecil hati. Justru dari keadaan begitulah Mirabeau

atas nama rakyat. Mulai tanggal 9 Juni 1789 rakyat dengan semangat menggebu-gebu membanjiri ruangan *Menus Plaisirs* untuk menyaksikan jalannya sidang (Furet and Richet, 1989:83). Semangat rakyat menimbulkan keberanian dari semua wakil golongan ketiga yang tergabung dalam *Commune*.

Pada 17 Juni 1789, para wakil rakyat sepakat untuk membentuk Dewan Nasional dengan nama *Assembles National*. Dewan Nasional tersebut berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Prancis menggantikan Dewan Perwakilan Golongan. Dewan Nasional dipimpin oleh *Bailly*, seorang politikus ternama di Prancis masa itu. Terbentuknya Dewan Nasional pada 17 Juni 1789 itu menunjukkan keberanian luar biasa dari golongan ketiga, karena keberhasilan mereka dalam merombak tatanan politik rezim lama. Menurut Paul Nicolle (1955:55) penggantian Dewan Perwakilan Golongan menjadi Dewan Nasional merupakan babak baru dalam sejarah politik Prancis. Hal ini dapat dimengerti mengingat sifat, fungsi, dan kedudukan Dewan Nasional jauh berbeda bila dibandingkan Dewan Perwakilan Golongan. Dewan Nasional lebih mewakili aspirasi dan kehendak rakyat Prancis. Kedudukan Dewan Nasional tampak lebih adil dan demokratis.

Dewan Nasional tidak bergantung pada raja, sebagaimana Dewan Perwakilan Golongan. Dalam Dewan Nasional tidak dikenal adanya pemisahan golongan, melainkan berusaha untuk mempersatukan semua golongan menjadi satu kesatuan. Dewan Nasional bertujuan menghapuskan semua hak-hak istimewa, ataupun kekuasaan yang hanya mengutamakan kepentingan individu ataupun golongan (Thompson, 1955:122). Dewan Nasional menuntut persamaan hak serta penghapusan monarkhi absolut. Kekuasaan raja hendaknya dibatasi, dan raja harus bertanggung jawab kepada rakyat melalui Dewan Nasional.

Dewan Nasional berhasil membatasi kekuasaan raja. Sejak saat itu Dewan Nasional berkedudukan sebagai penguasa tertinggi dalam pemerintahan rezim lama. Akan tetapi di samping Dewan Nasional masih berdiri kekuasaan tertinggi pemerintahan rezim lama, yaitu Louis XVI beserta para pendukungnya. Pada

dasarnya
Louis X
kekuasaan
Raja tidak
ia selalu
Dewan N
dan bang

P
ruangan
dan kece
di bawah
tidak jaul
tempat l
Ruangan
sekali, d
tempat c
(Andre,
pemimpin

Dev
unt
reg
prin
mer
mer
akh
ber
ang
apa
dan
sum
mas
pers
mer

Su

Sumpah
mereka b

Golongan Ke

dasarnya raja sulit untuk mengakui keunggulan Dewan Nasional. Louis XVI masih berstatus sebagai raja yang sah, karena kekuasaannya belum tergeser secara mutlak hanya dibatasi saja. Raja tidak menginginkan kewibawaannya tertanganggu, sehingga ia selalu berusaha menghalangi setiap keputusan yang dibuat oleh Dewan Nasional. Sikap raja mendapat dukungan dari kaum gereja dan bangsawan yang setia.

Pada 20 Juni para wakil rakyat terkejut mendapati ruangan *Menus Plaisirs* ditutup. Meskipun mereka sangat terkejut dan kecewa, tetapi mereka tidak berputus asa. Setelah berunding di bawah turunnya hujan, mereka menuju ke semua ruangan yang tidak jauh dari situ, yaitu ruangan *Jeu de Paume*. Ruangan itu hanya tempat kosong dan biasanya digunakan untuk latihan tenis. Ruangan *Jeu de Paume* tidak berpintu dan tidak berperabot sama sekali, dan hanya diterangi jendela-jendela tinggi. Tidak ada tempat duduk, ataupun hiasan dinding di seputar ruangan itu (Andre, 1956:281). Dengan berdiri di atas meja, *Bailly*, sebagai pemimpin Dewan Nasional mengucapkan sumpahnya:

Dewan Perwakilan Rakyat menimbang bahwa Dewan terpenggil untuk menentukan konstitusi kerajaan, dan melaksanakan regenerasi pemerintahan umum serta mempertahankan prinsip-prinsip yang benar monarkhi, bahwa tidak ada yang bisa menghalanginya untuk melanjutkan pembicaraan yang mendalam, di tempat manapun Dewan terpaksa berada, dan akhirnya dimanapun anggota-anggota berkumpul, di situlah berdiri Dewan Perwakilan Rakyat, ditentukan bahwa semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersumpah dengan khidmat, apabila keadaan memaksa, sampai Konstitusi kerajaan terbentuk dan dikukuhkan atas dasar-dasar yang kuat: dan bahwa jika sumpah tersebut di atas sudah diucapkan, semua anggota, dan masing-masing di antara mereka secara khusus, menegaskan persetujuan mereka akan resolusi yang teguh itu, dengan membubuhkan tanda tangan mereka (Furet and Richet, 1989:5).

Sumpah itu dikenal dengan *The Tennis Court Oath* atau Sumpah Lapangan Tenis (Richard, 1950:16). Dengan tegas mereka berjanji tidak akan bercerai berai selama konstitusi belum

terbentuk. Mereka dengan kesungguhan mengucapkan sumpah itu, karena merupakan kewajiban mereka sebagai pengemban aspirasi rakyat untuk membentuk konstitusi kerajaan.

Tanggal 23 Juni 1789 diadakan sidang kerajaan. Para wakil golongan ketiga diundang dan ikut hadir dalam sidang tersebut. Sidang dibuka oleh raja sendiri, tetapi apa yang dikatakan oleh raja tidak memberikan harapan untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Dengan berbagai cara raja berusaha untuk menghalang-halangi segala tindakan yang dikerjakan oleh Dewan Nasional. Dalam sidang itu raja mengatakan:

Ingat . . . bahwa tidak satupun dari rencana tuan-tuan . . . mempunyai kekuatan hukum, jika tiada persetujuan dari saja . . . Saja perintahkan tuan-tuan dengan segera bubar dan besok tuan-tuan pergi ke tempat yang ditunjuk untuk golongan tuan guna melanjutkan perundingan (Nicolle, 1955:57).

Selanjutnya raja meninggalkan tempat sidang dengan diikuti oleh kaum gereja dan bangsawan yang masih mendukung pemerintahannya. Dalam keadaan seperti itu, para wakil rakyat merasa mendapatkan tantangan baru. Mereka tetap bertahan terikat sumpah yang pernah mereka ucapkan. Dewan Nasional tetap kokoh tak tergoyahkan, bahkan sedikit demi sedikit sebagian golongan gereja dan bangsawan menggabungkan diri dengan golongan ketiga.

Dewan Nasional memang merupakan ancaman terhadap *status quo* Louis XVI. Akan tetapi, berbagai usaha raja untuk memojokkan mereka tidak pernah berhasil. Sejalan dengan makin kuatnya Dewan Nasional, raja memanggil para anggota Dewan Nasional untuk mengadakan sidang. Pada 27 Juni 1789, secara resmi raja mengakui keberadaan Dewan Nasional (Furet and Richet, 1989:88). Para anggota Dewan Nasional terus bertekad untuk mewujudkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan di kalangan rakyat Prancis. Pada 9 Juni 1789 Dewan Nasional berganti nama menjadi *Dewan Nasional Konstituante* (*Assemblée Nationale Constituante*). Tugas utama Dewan Nasional Konstituante

adalah
utama

MIRAF
DALAM

memil
pemer
kehidup
mendari
dan ag
pengu
Prancis
dalam
Prancis
keadaan

Comte
Mirabe
1749, s
bangsaw
Mirabe
bopeng
sikapny

tetapi
penderi
Hal ini
bangsaw
anggota
dalam r
hak-hak
bangsaw
merasa

Golongan

adalah membentuk Undang-Undang Dasar, sebagai peraturan utama untuk membatasi kekuasaan dan wewenang raja.

MIRABEAU SALAH SATU SOSOK WAKIL GOLONGAN KETIGA DALAM DEWAN PERWAKILAN GOLONGAN

Para wakil rakyat yang duduk dalam Dewan Nasional memiliki kewenangan untuk mengarahkan jalannya pemerintahan. Dalam keadaan krisis di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, politik maupun ekonomi, rakyat Prancis mendambakan para wakil rakyat yang dapat menjadi penggerak dan agen pembaharuan. Sementara itu Louis XVI sebagai penguasa Prancis telah kehilangan kewibawaan di mata rakyat Prancis, sehingga dapat dimaklumi bahwa tampilnya Mirabeau dalam Dewan Nasional mendapat sambutan besar. Rakyat Prancis berharap banyak pada Mirabeau untuk memperbaharui keadaan Prancis yang semakin memprihatinkan.

Mirabeau mempunyai nama lengkap *Handre Gabriel Riquett Comte de Mirabeau*. Untuk selanjutnya lebih dikenal dengan Mirabeau saja. Mirabeau lahir di Brignon Prancis pada 9 Maret 1749, sebagai anak laki-laki dari keluarga *Victor Riquetti* seorang bangsawan kaya di Prancis waktu itu. Pada usia tiga tahun Mirabeau terserang penyakit cacar yang membuat wajahnya bopeng. Namun demikian, masalah wajah tidak mempengaruhi sikapnya setiap hari (Rowen, 1973:430).

Mirabeau dibesarkan di lingkungan bangsawan, akan tetapi Mirabeau lebih menaruh simpati besar terhadap penderitaan rakyat akibat berlakunya sistem politik rezim lama. Hal ini disebabkan karena kekecewaan Mirabeau terhadap kaum bangsawan yang telah menghalangi keinginannya untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Bangsawan. Keberanian Mirabeau dalam mengkritik kaum bangsawan, serta pembelaannya terhadap hak-hak manusia, menyebabkan Mirabeau dikucilkan dari kelas bangsawan (Richard, 1950:32). Tetapi Mirabeau tidak pernah merasa kecil hati. Justru dari keadaan begitulah Mirabeau

mengawali langkah barunya dengan mencurahkan segala ambisinya menentang kekuasaan absolut rezim lama.

Karier Mirabeau diawali dengan menjadi anggota pasukan kavaleri kerajaan. Mirabeau sering mendapatkan hukuman masuk penjara karena tingkah lakunya. Setelah berpangkat kapten, Mirabeau bosan dan menyatakan diri keluar dari dinas tentara kerajaan. Kemudian Mirabeau menikah dengan gadis pilihan ayahnya. Gadis itu bernama *Emile de Marignane* tahun 1772 (Rowen, 1973:430). Usia perkawinan tidak berlangsung lama karena Mirabeau tidak dapat mencintai isterinya. Kehidupan perkawinan Mirabeau diakhiri dengan perceraian.

Kehidupan Mirabeau menjadi tidak karuan setelah kegagalannya dalam membina rumah tangga. Mirabeau hidup tidak teratur dan mempunyai kemauan yang tidak dapat dikendalikan. Mirabeau hidup boros, senang makan dan minum yang berlebihan, serta banyak bersenang-senang dengan wanita yang bukan isterinya. Karena perilakunya Mirabeau sering masuk penjara. Terakhir kali Mirabeau ditahan di penjara *Joux*. Selama di penjara *Joux* itu Mirabeau menghabiskan waktunya dengan membaca dan menulis. Dalam setiap tulisannya Mirabeau memperlihatkan kebenciannya pada kekuasaan rezim lama. Diantaranya dalam tulisan yang berjudul *De la Monarchie Prussienne Sous Frederic le Grand*, atau Monarkhi Prusia di bawah Frederik Agung terbit tahun 1788. Berbagai tulisannya memperlihatkan bahwa Mirabeau itu seorang yang cerdas dan cemerlang pikirannya. Mirabeau dikenal sebagai pemikir realis dan ahli dalam masalah-masalah politik. Di samping itu, Mirabeau dikenal pula sebagai seorang seniman (Bellog, 1956:55). Bakat seni yang dimiliki Mirabeau kelihatan jelas pada tulisan dan gaya bicaranya di depan massa.

Dalam kaitannya dengan sejarah Prancis, Mirabeau adalah salah satu sosok tokoh utama yang terlibat langsung dalam peristiwa Revolusi Prancis (Bellog, 1956:37). Sebetulnya banyak tokoh bermunculan dalam jalannya Revolusi Prancis, tetapi kehadiran Mirabeau mempunyai arti tersendiri bagi perjuangan

revolus
bangsa
untuk
orator

orator-
kesan t
adalah
kharism
Mirabe
kekuata

M
ra
ta
jei

mendap
karena p

atitasi,
pemerin
Gunawa
baik, be
Peran se
bangkitk
undakar
musuh.

menarik
menbak
dalam p
pemah

³Chate
1769-1848

Golongan K

revolusi rakyat Prancis. Mirabeau dikenal sebagai seorang bangsawan daerah yang banyak terlibat dalam masalah politik untuk membela hak rakyat, terutama kualitasnya sebagai seorang orator (Furet and Richet, 1989:67).

Pada waktu itu di Prancis sudah banyak bermunculan orator-orator ternama, tetapi hanya Mirabeau yang mempunyai kesan tersendiri dibandingkan dengan para orator lain. Mirabeau adalah seorang orator terkemuka dengan sosok paling kharismatik yang pernah dimiliki rakyat Prancis. Hal ini diartikan Mirabeau mempunyai kekuatan batin yang mampu menggerakkan kekuatan massa, seperti dicatat oleh Chateaubriand:⁵

Manakala ia gerakkan suri ditengukunya sambil memandang rakyat jelata, ia mampu menghentikannya, manakala ia angkat tangannya sambil mengacungkan kuku-kukunya, maka rakyat jelata itupun berlari gusar (Furet and Richet, 1989:82).

Oleh karena itu, tidak keliru apabila Mirabeau mendapatkan julukan orator ulung penyambung lidah rakyat, karena pidato-pidatonya selalu membela kepentingan rakyat.

Keadaan Prancis waktu itu penuh dengan gambaran atitasi, karena kegelisahan serta ketidakpuasan terhadap pemerintahan rezim lama. Dalam suasana seperti itu menurut Gunawan, Riyadi (1980:42-43) dibutuhkan seorang orator yang baik, berkualitas 'kakap' untuk menumbuhkan suasana revolusi. Peran seorang orator dalam keadaan krisis adalah membangkit-bangkitkan semangat massa agar bergerak melakukan suatu tindakan untuk menentang bentuk kekuatan yang dianggap musuh.

Mirabeau mempunyai kemampuan tersendiri dalam menarik perhatian massa, melalui rangkaian kata-kata yang menbakar, serta memberikan suatu harapan seperti yang ada dalam pikiran rakyat. Dalam salah satu pidatonya Mirabeau pernah mengatakan *a mad dog, am I, but elect me and despotism, and*

⁵Chateaubriand adalah seorang sastrawan Prancis yang hidup antara tahun 1769-1848.

privelege will die of may bite (Richard, 1950:32). Mirabeau mempunyai suara memikat, irama dan gaya yang khas dalam setiap bicaranya. Pidato Mirabeau tajam dan menggemparkan, serta mampu menggetarkan seluruh rakyat di mana saja Mirabeau berbicara (Carlyle, 1934:44).

Kehadiran Mirabeau sebagai seorang orator terkemuka pada waktu itu dirasa sangat penting artinya. Kalangan rakyat masih banyak yang belum dapat membaca dan menulis, akan tetapi mereka dengan mengandalkan telinganya masih dapat mengikuti perkembangan revolusi. Dengan kata-katanya Mirabeau berusaha mengerahkan kekuatan rakyat yang pada umumnya belum terorganisasi dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar gerakan rakyat tidak menyimpang dari rel-rel yang dituju.

Pertemuan Dewan Perwakilan Golongan dalam sidangnya antara bulan Mei dan Juli 1789 telah memperlihatkan dengan jelas bagaimana keterlibatan Mirabeau dalam menentang pemerintahan rezim lama. Mirabeau terpilih menjadi wakil rakyat dari daerah *Aix en Provence*. Di dalam sidang Dewan Perwakilan Golongan seluruh aktivitas Mirabeau terlihat. Mirabeau berjuang keras dalam rangka membentuk Dewan Nasional. Di samping itu, pada saat Dewan Nasional yang akan dibubarkan oleh pihak kerajaan, Mirabeau mengatakan suatu jawaban yang sangat tepat. Dikatakan oleh Mirabeau bahwa para wakil rakyat berkumpul di tempat sidang atas kehendak bangsa, dan para wakil rakyat akan meninggalkan tempat sidang tersebut kecuali dengan kekerasan (Brinton, 1962:93).

Mirabeau terus memimpin oposisi menentang kekuasaan raja yang tidak berkonstitusi (Richard, 1950:32). Mirabeau ingin menyelamatkan rakyat dari kekejaman absolutisme. Oleh karena itu, dalam perjuangannya Mirabeau selalu mengusulkan agar kekuasaan raja dibatasi dengan konstitusi (Rowen, 1973:431). Dengan pidato-pidatonya Mirabeau terus mempengaruhi rakyat untuk hak istimewa yang didominasi kaum gereja dan bangsawan.

Mirabeau mempunyai kharisma besar bagi perjuangan rakyat Prancis. Dia mempunyai keinginan besar untuk mengubah

keadaan pemerintahan rezim lama yang dipandang telah melanggar hak-hak manusia. Berkat pidato-pidatonya rakyat Prancis tergugah keberaniannya, sehingga rakyat bersatu dalam satu kekuatan untuk menentang rezim lama.

Mirabeau meninggal pada tahun 1791 karena sakit. Pada saat menjelang kematiannya Mirabeau mulai kehilangan kewibawaan dan popularitas. Hal ini disebabkan karena ambisi pribadi Mirabeau untuk mendudukkan diri dalam jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Di samping itu ketidakpopuleran Mirabeau disebabkan pula oleh terbongkarnya hubungan pribadi antara Mirabeau dengan Marie Antoinette yang dianggap musuh dalam revolusi. Akan tetapi lepas dari sifat Mirabeau sebagai manusia biasa, jasa-jasanya tetap dikenang dalam sejarah revolusi Prancis.

KEKUATAN RAKYAT DALAM REVOLUSI PRANCIS

Kecenderungan untuk memberontak di Prancis di sebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks dan beragam. Kemelaratan yang umum, sistem administrasi yang buruk, ketimpangan di bidang ekonomi, serta ambisi pribadi, semua itu memainkan peranan penting dalam pemberontakan yang terjadi di Prancis (Kartodirdjo, 1984:19). Interaksi di antara faktor-faktor tersebut akan mempercepat pecahnya revolusi.

Rakyat Prancis didorong ke arah pemberontakan oleh penindasan raja dan kalangan istana, serta keadaan sosial, politik, ekonomi tahun 1789. Gerakan revolusi tersebut berusaha meniadakan hal-hal yang dirasakan tidak adil atau yang dianggap sebagai penindasan melalui pemberontakan bersenjata (Kartodirdjo, 1984:444). Di dalam gerakan revolusi itu terkandung suatu cita-cita keadilan, serta jauh dari penindasan. Rakyat mengharapkan suatu pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi hak-hak manusia.

Masyarakat kelas bawah yang sebagian terbesar adalah masyarakat petani dan merupakan mayoritas dari seluruh warga Prancis, teramat menderita akibat perlakuan kejam para penguasa

rezim lama. Oleh karena itu, rakyat memegang peranan hakiki dalam suatu gerakan revolusi (Lapian, 1989:3). Mereka merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam pemberontakan tersebut (Kartodirdjo, 1984:162). Hal ini sesuai dengan salah satu hukum fundamental revolusi yang dinyatakan oleh Soekarno, bahwa revolusi yang sesungguhnya bukanlah revolusi istana atau revolusi pimpinan, melainkan revolusi rakyat (dalam tulisan Sulistyono, Hermawan, 1990:67).

Revolusi bersandar pada kekuatan rakyat (Andre, 1956:291). Rakyat merupakan kekuatan potensial untuk menegakkan keadilan, persamaan ataupun perdamaian melalui perjuangan revolusi (Bulkin, 1985:2). Apabila rakyat sudah mencapai titik klimaks kemarahan akibat kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para penguasa, maka gerakan revolusi merupakan alternatif jawaban untuk melepaskan diri dari aneka macam penindasan. Menurut Abdul Gani (1989:3).

Revolusi bukan buatan seseorang. Bukan juga sekelompok orang. Melainkan meletus akibat suatu keadaan, yang menggerakkan memang sekelompok manusia di dalam masyarakat itu sendiri, dan merupakan orang yang paling sadar bahwa zaman lama dan rezim lama harus dikubur, karena menghalang-halangi kemajuan, dan bahwa zaman baru dan rezim baru harus disongsong dan dibangkitkan.

Dengan demikian suatu gerakan revolusi bukanlah karya perseorangan ataupun perkelompok, akan tetapi merupakan karya bersama dari seluruh bangsa yang menginginkan adanya perubahan, di Prancis, gerakan revolusi meletus akibat kejenuhan rakyat terhadap sistem pemerintahan rezim lama yang absolut.

Di samping krisis politik, ekonomi, sosial ataupun ideologi yang telah mempengaruhi terbentuknya kekuatan rakyat Prancis dalam gerakan revolusi, ternyata keadaan penduduk Prancis waktu itu turut mempercepat lahirnya kekuatan rakyat. Menurut catatan Gedechot (1989:6) bahwa dari jumlah penduduk antara 24-26 juta jiwa, penduduk Prancis tahun 1789 terdiri atas 25 persen berusia di atas 40 tahun, 40 persen berusia antara 20-40 tahun dan 36 persen berusia di bawah 20 tahun.

Kaum borjuis sebagai golongan yang lebih maju muncul bersama rakyat, dan menyadarkan rakyat untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Kaum borjuis berperan sebagai pengemban dan pejuang ide-ide revolusi (Kartodirdjo,1989:1). Dalam struktur kekuasaan monarkhi absolut mereka tidak diberi peranan politik, sehingga wajar apabila di kalangan mereka terdapat orang-orang yang mempersiapkan dan mengarahkan revolusi.

Kekuatan rakyat, yang merupakan hasil persekutuan antara kaum borjuis dan kaum petani, mendapat dukungan dari kaum gereja dan bangsawan liberal. Kaum gereja dan bangsawan liberal sangat membenci pemerintahan rezim lama. Mereka sepenuhnya membela dan sekaligus memperjuangkan hak-hak rakyat yang ditendas oleh penguasa. Di antara mereka dapat disebut Mirabeau, Sieyes, Talleyrand ataupun Lafayette. Mereka mendukung dan memberikan semangat kepada rakyat untuk merombak kekuasaan absolut rezim lama. Kaum gereja dan bangsawan liberal bersama-sama dengan kaum borjuis muncul sebagai pemimpin gerakan revolusi. Hal ini sesuai dengan pendapat Kartadirdjo (1984:162):

Hampir semua pemberontakan dipimpin oleh orang-orang bukan petani biasa, karena mereka mempunyai kemampuan lebih untuk mengungkapkan keinginan-keinginan terpendam dari kaum petani, sekaligus menyalurkan kekuatan kaum petani yang biasanya tidak teratur itu, menjadi satu kekuatan yang efektif.

Selama bertahun-tahun rakyat Prancis telah kenyang dengan berbagai penderitaan dan kemiskinan. Dengan demikian, sudah saatnya jika mereka berubah menjadi suatu kekuatan yang akan menentukan kehidupan mereka sendiri (Bagun, 1990:ix). Rakyat Prancis yang sudah dipengaruhi oleh berbagai pemikiran Abad Pencerahan, bertekad bahwa satu-satunya jalan keluar dari keadaan yang menekan itu adalah dengan mengubah struktur masyarakat secara radikal, untuk mencapai kehidupan yang adil dan sejahtera. Rakyat bangkit untuk membebaskan diri dari belenggu kelaliman dan penindasan rezim lama.

Gerakan rakyat Prancis diwujudkan dalam suatu tindakan

yang bersifat agresif radikal. Gerakan tersebut memperlihatkan adanya ketegangan, pertentangan, serta permusuhan antara rakyat dengan penguasa rezim lama. Berbagai kerusuhan yang dilakukan oleh rakyat diarahkan untuk melawan monopoli kerajaan, kaum gereja dan bangsawan. Rakyat memandang bahwa musuh utama mereka adalah istana *Versailles*, dan semua yang berbau istana. Mereka yakin bahwa absolutisme kerajaan dan feodalisme merupakan penghambat perkembangan negara. Absolutisme dan feodalisme tidak menghargai hak-hak manusia, karena itu harus ditumbangkan.

Batasan-batasan secara ekonomis ataupun asal-usul tidak lagi menjadi penghalang bagi rakyat dalam membentuk satu kesatuan revolusioner. Dalam persatuan ini tidak ada lagi istilah petani atau majikan. Mereka merupakan satu kesatuan dengan harapan dan kehendak yang sama untuk membentuk negara-kebangsaan atas dasar baru (Furet and Richet, 1989:80). Persatuan revolusioner golongan ketiga mendapat dukungan penuh dari kaum bangsawan dan gereja liberal. Mereka menjadi sangat kuat, sehingga sulit bagi rezim lama untuk mempertahankan diri.

PENYERBUAN KE PENJARA BASTILLE

Perkembangan politik Prancis waktu itu, memperlihatkan bahwa posisi Louis XVI makin terancam. Keinginan para anggota Dewan Konstituante untuk membuat Undang-Undang Dasar sebagai pedoman resmi sistem pemerintahan tidak ditanggapi secara positif oleh Louis XVI. Para pembantu dekat raja seperti Pangeran Artois, Pangeran Coude dan Marie Antoinette mendesak raja untuk mempersiapkan 20.000 pasukan di sekitar istana Versailles. Maksud mereka adalah untuk mengimbangi kekuatan rakyat yang sudah terbentuk.

Pasukan keamanan kerajaan yang berjumlah 20.000 itu merupakan pasukan sewaan dari Jerman dan Swiss, karena pasukan kerajaan sudah tidak setia lagi kepada Louis XVI. Sejak saat itu Louis XVI sudah tidak mendapat kredibilitas dari

sebagian pasukan Prancis. Kesewenang-wenangan raja telah mengubah loyalitas Prancis memihak menjadi sikap menentang raja. Pasukan Prancis memihak perjuangan golongan ketiga, dan menolak perintah raja untuk menyerang para demonstran (Gershoy, 1964:113). Mereka bersama-sama rakyat turut bergerak untuk menumbangkan dominasi Louis XVI beserta keluarganya.

Tindakan Louis XVI memanggil pasukan asing dengan dalih untuk menjaga keamanan kerajaan, telah menimbulkan kecurigaan rakyat. Hal ini membuktikan bila raja tidak bersedia memenuhi tuntutan rakyat yang disuarakan dalam sidang Dewan Nasional Konstituante. Rakyat menilai tindakan Louis XVI sebagai kekuatan baru untuk memberantas gerakan mereka.

Kedadaan semakin kacau setelah Louis XVI memecat Necker, menteri keuangan yang sangat disukai rakyat pada 11 Juli 1789 (Bellog, 1956:12). Tindakan Louis XVI membawa dampak besar bagi kedudukan Louis XVI sendiri. Rakyat mendengar dipecatnya Necker, dan mencatat bahwa raja bersama para pengikutnya sedang merencanakan pembubaran Dewan Nasional Konstituante (Brinton, 1962:100), rakyat menganggap pemecatan Necker merupakan usaha Louis XVI untuk menutupi ketidakberesannya dalam hal penggunaan uang negara.

Pada 12 Juli 1789 diadakan rapat umum di *Lapangan Palais Royale*. Para orator seperti Camilie Desmoulins⁶ mengajak rakyat untuk bersiap diri menghadapi kemungkinan serbuan pasukan pengawal raja (Andre, 1956:202). Para orator mendorong semangat rakyat untuk terus menentang absolutisme rezim lama. Pertemuan di lapangan *Palais Royale* waktu itu menjadi tempat berkumpulnya pra penentang kekuatan raja dan mengutuk serta mengumpat kekuasaan Louis XVI.

Demonstrasi sejak tanggal 12 Juli 1789 berkembang ke seluruh wilayah Prancis. Ribuan orang yang terdiri atas pasukan rakyat ditambah dengan pasukan kerajaan Prancis yang

⁶Camilie Desmoulins, seorang advokad dan wartawan yang hidup pada tahun 1760-1794. Dia yang menganjurkan serangan terhadap penjara Bastille.

menentang kekuasaan Louis XVI bergabung menjadi satu kekuatan tangguh. Mereka bergerak di jalan-jalan utama Prancis dengan meneriakkan slogan-slogan kebebasan, persamaan dan persaudaraan atau *liberte, egalite, dan fraternite*.

Pada Selasa 14 Juli 1789 lonceng tanda bahasa di hotel *des Invalides* berdentang, memanggil para sukarelawan untuk menunaikan tugas mereka (Bellog, 1956:70). Kemarahan rakyat yang sudah terpendam selama bertahun-tahun meledak menjadi satu kekuatan penentang raja. Gerakan rakyat sudah berubah ke arah penggunaan kekerasan. Sebagian dari mereka segera membentuk kekuatan, dan menjarah toko-toko perlengkapan senjata. Sebagian lagi ada yang menuju benteng *des Invalides*, gudang senjata milik negara. Gerakan rakyat telah merampas dan merusak semua barang yang ada di dalam benteng *des Invalides*. Mereka membunuh para petugas yang menghalangi gerakan mereka. Rakyat bersama para pemimpinnya terus menggalang kekuatan untuk melumpuh pasukan raja.

Setelah berhasil membawa lima buah meriam dan 20.000 pelor, Camille Desmoulins dengan berteriak angkat senjata mengarahkan gerakan rakyat untuk menyerbu ke penjara Bastille (Andre, 1956:282). Pasukan rakyat ditambah pasukan kerajaan yang memihak rakyat, dipimpin oleh *Hulin*, seorang bintang dan *Elie*, seorang letnan pasukan kerajaan segera menuju Bastille. Mereka membawa meriam hasil rampasan dari gedung *des Invalides*.

Jalan-jalan utama menuju penjara Bastille dipenuhi rakyat yang sudah memuncak kemarahannya. Dengan naluri yang ada, mereka bertekad untuk merebut sekaligus menghancurkan penjara Bastille yang menyeramkan itu (Furet and Richet, 1989:92). Pimpinan penjara Bastille *de Launay* yang setia kepada Louis XVI berusaha untuk mempertahankan diri dan penjara Bastille dengan membentuk barisan pertahanan. Kontak senjata secara langsung terjadi antara pasukan Launay yang mencoba bertahan, melawan amukan rakyat yang ingin menghancurkan penjara Bastille.

rakya
17.00
seked
berlar
berha
dipen
mene.

Juli 17
Pranc
menju
Dalam
yang
seoran
Bastill
secara
Richet
digerak
berkain
berken
dimito
menyil
untuk
lama y

berhas
dengar
lama i
oleh r
penuh
masyar
oleh S
telah c
rakyat

Golongan

Barisan Launay tidak mampu bertahan dari serangan rakyat dan terpaksa menyerahkan penjara Bastille pada pukul 17.00 (Furet and Richet, 1989:92). Rakyat menuntut lebih dari sekedar penyerahan penjara Bastille saja. Kemarahan rakyat terus berlanjut, Launay menjadi sasaran kebencian rakyat. Rakyat berhasil menangkap Launay dan terus dibunuh. Kepala Launay dipenggal dan dipertontonkan kepada masyarakat banyak sambil meneriakkan kemenangan.

Peristiwa singkat dan mengejutkan yang terjadi pada 14 Juli 1789 di penjara Bastille merupakan puncak kemarahan rakyat Prancis terhadap absolutisme rezim lama. Sebenarnya rakyat tidak menjumpai banyak tawanan dalam penjara Bastille tersebut. Dalam penjara Bastille itu hanya ditemukan tujuh orang tahanan yang terdiri atas empat orang pande-besi, dua orang gila dan seorang penjahat (Richard, 1950:17). Penyerbuan ke penjara Bastille ini bukan merupakan satu pilihan yang tidak direncanakan secara matang dan terorganisasi dengan baik. Menurut Furet dan Richet (1989:92), pemilihan penjara secara spontan. Rakyat digerakkan oleh ketidakadilan pemerintahan rezim lama. Hal ini berkaitan erat dengan mitos tentang penjara Bastille yang berkembang luas di kalangan rakyat Prancis. Penjara Bastille dimitoskan sebagai tempat yang sangat mengerikan, tempat raja menyiksa para tawanan. Dengan adanya mitos itu rakyat bertekad untuk menghancurkan penjara Bastille, lambang kekuatan rezim lama yang mereka benci.

Revolusi rakyat yang meledak pada 14 Juli 1789 telah berhasil menumbangkan tatanan nilai-nilai lama yang penuh dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Tatanan nilai-nilai lama itu tidak sesuai lagi dengan zaman baru yang dikehendaki oleh rakyat Prancis. Jatuhnya penjara Bastille, disambut dengan penuh kegembiraan oleh rakyat Prancis khususnya, serta masyarakat Eropa umumnya. Kegembiraan ini seperti di lukiskan oleh Steffen seorang sastrawan Denmark bahwa zaman baru telah dimulai. Kemiskinan dan keterbelakangan akan lenyap, rakyat jelata dapat memulai hidup baru dengan hak hidup yang

Bab 5

BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN MONARKHI ABSOLUT

Bab berikut memaparkan tentang masa berakhirnya pemerintahan monarkhi absolut. Monarkhi absolut yang telah bertahun-tahun berdiri akhirnya dapat ditumbangkan oleh kekuatan rakyat dalam sebuah gerakan revolusi yang meledak pada 14 Juli 1789. Dalam bab ini dimulai dengan memaparkan akibat robohnya penjara Bastille dan hapusnya hak-hak istimewa, dilanjutkan dengan uraian tentang Undang-Undang Hak-hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Bab ini diakhiri dengan mengemukakan keadaan Prancis sesudah revolusi.

JATUHNYA PENJARA BASTILLE DAN HAPUSNYA HAK-HAK ISTIMEWA

Masa sebelum meletusnya Revolusi Prancis merupakan masa penggunaan hak-hak istimewa oleh kaum gereja dan bangsawan. Penggunaan hak-hak istimewa secara berlebihan yang dimiliki oleh kaum gereja dan bangsawan sangat merugikan masyarakat Prancis pada umumnya. Hak-hak istimewa ada di berbagai segi kehidupan, baik politik, ekonomi, ataupun sosial. Hal inilah yang mengakibatkan rakyat Prancis semakin membenci pemerintahan rezim lama, sekaligus mengantarkan pada suatu gerakan revolusi.

Revolusi Prancis mencapai puncaknya pada 14 Juli 1789 ditandai dengan penyerbuan ke penjara Bastille. Hancurnya

penjara
kelang
kemen
lama, s
tersebu
dalam
penjara
rakyat
(Gersh
keman
ketidak
1956:28

penuh
seluruh
pemerit
Berita j
satu pil
pihak
dengan
dan ka
mempe
1956:35
pertama

tentang
luar ne
dikabar
menyer
terdiri a

menerit
sarana
tentang
bangsav
pteani y

Berakhirnya

penjara Bastille ternyata membawa akibat yang sangat berarti bagi kelangsungan sejarah Prancis. Persitiwa ini menandai kemenangan rakyat Prancis atas kesewenang-wenangan rezim lama, sekaligus mengakibatkan runtuhnya dominasi rezim lama tersebut. Penjara Bastille dihancurkan oleh ketidakmampuan raja dalam menghadapi ketidakpuasan rakyat Prancis. Penyerbuan ke penjara Bastille menumbuhkan semangat kepahlawanan bagi rakyat Prancis yang cinta kebebasan dan menentang despotisme (Gershoy, 1956:283). Rakyat menjadi tahu akan kekuatannya dan kemampuannya yang selama itu terbelenggu dalam ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan rezim lama (Andre, 1956:283).

Rakyat Prancis menyambut kemenangan ini dengan penuh kegembiraan. Di hati rakyat tumbuh keyakinan, bahwa di seluruh Prancis akan segera terjadi perubahan besar dalam tata pemerintahan dari sistem lama ke sistem baru yang dicita-citakan. Berita jatuhnya Bastille segera menyebar ke seluruh Prancis. Di satu pihak rakyat gembira menyambut kemenangan itu, tetapi di pihak lain terutama kaum gereja dan bangsawan ketakutan dengan perubahan yang akan terjadi. Sebagian para bangsawan dan kaum gereja berusaha melarikan diri dari Prancis untuk mempertahankan martabat dan harga diri mereka (Andre, 1956:35). Mereka kemudian disebut sebagai kelompok imigran pertama oleh bangsa Prancis waktu itu.

Pada minggu terakhir Juli 1789 bermunculan berita tentang para bangsawan dan kaum gereja yang berhasil lolos ke luar negeri. Kaum gereja dan bangsawan yang ada di luar negeri dikabarkan telah membentuk suatu kekuatan baru untuk menyerang para petani di pedesaan. Kekuatan baru tersebut terdiri atas para perampok dan orang-orang sewaan.

Para petani Prancis yang tinggal di pedesaan tidak dapat menerima kabar tersebut secara utuh dan jelas karena terbatasnya sarana komunikasi. Dengan demikian, menyebarkan berita tentang munculnya kekuatan baru pimpinan kaum gereja dan bangsawan yang berada di luar negeri menaikkan emosi para petani yang baru saja tertumpahkan dalam peristiwa 14 Juli 1789.

Masyarakat petani di pedesaan siap-siaga menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Datangnya musim panen, suatu masa yang sangat penting dalam kehidupan pedesaan, tidak lagi membawa ketenteraman dan kebahagiaan para petani. Mereka ketakutan akan hadirnya para perampok pimpinan kaum gereja dan bangsawan (Furet and Richet, 1989:97).

Ketakutan masyarakat pedesaan akan datangnya perampok dikuatkan oleh keadaan ekonomi, politik, dan sosial Prancis saat itu yang belum menentu. Hal ini menyebabkan desa-desa makin dicekam rasa takut dan khawatir. Keadaan seperti itu oleh Georges Levevre salah seorang penulis sejarah Prancis dinamakan *la Grandeur Peur* atau Ketakutan Besar (Furet and Richet, 1989:97). Perasaan ketakutan itu dari hari ke hari semakin menyebar luas ke seluruh pelosok Prancis. Di tengah perasaan ketakutan yang mencekam itu, para petani bangkit dengan bersenjatakan senapan, sabit dan pentungan. Mereka menyerang para penindas selama pemerintahan rezim lama.

Para petani dengan serempak menyerang rumah-rumah para bangsawan. Di tempat para bangsawan kaum petani bersukaria bersama-sama sambil membakar akta-akta lama tentang perbudakan mereka (Furet and Richet, 1989:97). Para bangsawan dan pengikutnya yang mencoba bertahan langsung dibunuh, selanjutnya rumah atau kastil mereka dibakar habis (Blum, 1966:450). Para petani miskin yang tidak terhitung jumlahnya itu menyerang sisa-sisa rezim lama. Tindak kekerasan yang dilakukan para petani bersenjata itu menimbulkan ancaman yang lebih luas lagi bagi stabilitas Prancis.

Dewan Nasional sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan Prancis sejak 17 Juni 1789 sangat khawatir melihat tindakan para petani. Dewan Nasional tidak menginginkan terjadinya pertumpahan darah yang lebih besar lagi setelah peristiwa 14 Juli 1789. Dewan Nasional berusaha membela tuntutan para petani, guna mencegah timbulnya pertumpahan darah yang kedua kalinya. Dewan memanggil para anggotanya dan mengadakan sidang pada 3 Agustus 1789.

Sidang Dewan Nasional dapat terlaksana sesuai dengan

rencana
berlar
seorang
memb
dimiliki
Perny
bangs
hak-ha

Kaum
mereka
merup
Berbag
wewen
bishop
pegawa

menen
aneka g
4 Agu
sejarah
dimeng
sebuah
dimiliki
gereja
menjad

kemena
(1956:2
Prancis
golong
saat itu
keagun
dikuran
dalam s

Berakhirm

rencana. Perdebatan demi perdebatan dalam sidang terus berlangsung sampai jauh malam. Pada 4 Agustus dini dari seorang bangsawan bernama *Vicounte de Noailles* tanpa diduga memberikan diri mengajukan usul agar semua hak istimewa yang dimiliki kaum bangsawan dihapuskan (Thompson, 1955:82). Pernyataan *Vicounte de Noailles* mendapat sambutan dari para bangsawan lainnya. Para bangsawan sepakat untuk melepaskan hak-hak istimewa yang dimiliki secara resmi.

Tindakan kaum bangsawan diikuti oleh kaum gereja. Kaum gereja segera menyatakan hapusnya hak-hak istimewa yang mereka miliki. Kaum gereja menyatakan diri sudah bukan lagi merupakan kelas istimewa dalam tata masyarakat Prancis. Berbagai hak dan pemungutan istimewa yang pernah menjadi wewenang pihak gereja diserahkan kepada negara. Para uskup, bishop, dan sejenisnya mulai saat itu berkedudukan sebagai pegawai pemerintah yang diberi gaji.

Peristiwa 4 Agustus 1789 adalah saat yang sangat menentukan terhadap hapusnya hak-hak istimewa serta hilangnya aneka gelar kebangsawanan. Menurut Richard (1950:17) peristiwa 4 Agustus 1789 dikatakan sebagai kejadian luar biasa dalam sejarah Prancis setelah robohnya penjara Bastille. Hal ini dapat dimengerti, karena peristiwa 4 Agustus 1789 itu telah melahirkan sebuah dekrit yang menyatakan lenyapnya hak istimewa yang dimiliki kaum gereja dan bangsawan. Para bangsawan dan kaum gereja dengan ikhlas melepaskan hak-hak istimewa yang pernah menjadi kebanggaan mereka.

Tanggal 4 Agustus 1789 merupakan tanggal yang penuh kemenangan bagi kaum petani Prancis. Menurut Andre Maurois (1956:284) dikatakan sebagai tanggal persatuan bagi bangsa Prancis, karena batasan-batasan yang membedakan antara golongan atas dengan golongan bawah sudah dihapuskan. Sejak saat itu berakhir lah zaman feodalisme Prancis. Segala bentuk keagungan dan kehormatan bagi kaum gereja dan bangsawan dikurangi, selanjutnya diadakan pembenahan dan pembaharuan dalam sistem pemerintahan.

Pada 11 Agustus 1789 Dewan Nasional secara

menyeluruh menghancurkan rezim feodal beserta sistem sosialnya. Dewan Nasional dengan tegas menyatakan akhir berlakunya segala bentuk monopoli dan hak-hak istimewa yang pernah dipertahankan oleh kaum gereja dan bangsawan. Penghapusan sistem feodal ini tidak hanya membersihkan sistem kemasyarakatan lama, dan menciptakan sistem kemasyarakatan yang baru saja, akan tetapi juga mulai diterapkannya nilai persamaan bagi warga negara Prancis. Nilai persamaan ini mencakup persamaan pajak, persamaan kesempatan serta persamaan peradilan sebagai jalan baru menuju persamaan warga negara Prancis (Thompson, 1955:85). Ide persamaan di antara sesama warga Prancis dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar Prancis.

DEKLARASI HAK-HAK ASASI MANUSIA DAN WARGA NEGARA

Setelah hak-hak istimewa dinyatakan berakhir, Dewan Nasional Konstituante yang telah terbentuk sejak 9 Juni 1789 memusatkan diri untuk membentuk dan menyusun pedoman resmi dalam tata pemerintahan Prancis baru. Dewan Nasional Konstituante adalah sebuah lembaga lanjut dari Dewan Nasional dan menjadi lembaga tertinggi di Prancis sesudah masa revolusi.

Dengan terbentuknya Dewan Nasional Konstituante terbuka jalan baru bagi rakyat Prancis untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai warga negara yang demokratis. Para wakil yang tergabung dalam Dewan Nasional Konstituante mempunyai tanggung jawab besar untuk merealisasikan kehendak rakyat yang telah lama dinantikan. Kehendak rakyat itu tercermin dalam semboyan kebebasan, persamaan, dan persaudaran yang sering diteriakkan pada masa revolusi.

Dewan Nasional Konstituante bersiap-siap memulai tugas baru yang menjadi tanggung jawab mereka. Sidang pertama dibuka pada 20 Agustus 1789. Pokok permasalahan yang dibahas berkisar pada pembentukan kerangka konstitusi. Akan tetapi sejak sidang pertama kali dibuka banyak sekali terjadi silang pendapat, terutama menyangkut hak-hak manusia. Sidang berlangsung terus menerus tanpa waktu istirahat.

Kebebasan merupakan salah satu pokok permasalahan yang dijadikan topik dalam sidang tersebut. Kebebasan ditekankan bahwa setiap individu bebas melakukan apapun asal tidak merugikan orang lain (Godechot, 1989:49). Di samping itu, masih ada masalah lain sebagai bahan perdebatan di dalam sidang Dewan Konstituante, yaitu masalah persamaan hak perseorangan. Setiap manusia lahir dalam keadaan sama, karena itu manusia yang satu tidak boleh memperlakukan manusia yang lain tanpa peraturan atau hukum yang sah (Malet and Isaac, 1989:44)

Setelah melalui perdebatan selama kurang lebih satu minggu, para anggota dewan Nasional Konstituante berhasil mencapai kesepakatan tentang pokok-pokok permasalahan yang dijadikan topik pembicaraan. Sebuah Undang-Undang Dasar berhasil ditetapkan. Konstitusi baru itu mencakup 17 pasal dan merupakan Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan Warga negara atau *Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen* (Malet and Isaac, 1989:43). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 5.

Masalah kebebasan dan persamaan setiap warga negara dalam deklarasi itu menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak sama (pasal 1). Pada bagian lain juga dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan sama dalam bidang hukum (pasal 6). Dewan juga sepakat bahwa setiap warga negara memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dalam pembentukan sebuah negara yang demokratis. Di samping itu, kebebasan memilih pekerjaan tanpa adanya diskriminasi sosial, agama ataupun latar belakang ekonomi mendapat perhatian khusus dari pemerintah.

Masalah kekuasaan raja diatur dalam pasal tiga. Pasal ini menegaskan bahwa raja tidak memegang kekuasaan tertinggi di bidang pemerintahan. Raja tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat yang dipimpin. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, sedangkan raja berkuasa hanya karena mandat dari rakyat (Furet and Richet, 1989:136). Pasal tiga ini menjelaskan bahwa Prancis tidak lagi mengenal kekuasaan absolut sewenang-wenang, karena kekuasaan pemerintahan sudah dibatasi dengan undang-undang.

Secara ringkas Deklarasi Prancis tersebut mengandung empat ide pokok. *Pertama*, pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak setiap warga negara yang mencakup hak kebebasan, persamaan, hak untuk memiliki sesuatu, dan hak untuk mendapatkan jaminan keamanan. *Kedua*, pasal-pasal yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara atau sebaliknya untuk mempertahankan hak-hak tersebut di atas. *Ketiga*, pasal-pasal yang berkaitan dengan kewajiban negara untuk mewujudkan hak-hak setiap warga negara lewat perangkat hukum yang sah. *Keempat*, pasal-pasal yang membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (Thompson, 1955:88-89).

Deklarasi hak-hak manusia dan warga negara yang diberlakukan di Prancis telah membuktikan bahwa, setiap warga negara telah diakui hak-haknya sebagai manusia. Status warga negara yang semula menjadi abdi dan pesuruh, serta harus taat terhadap segala perintah raja, berubah menjadi warga negara seutuhnya dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki. Rakyat Prancis diperbolehkan menuntut hak-haknya lewat aturan hukum yang berlaku.

Deklarasi Prancis dengan 17 pasalnya itu merupakan deklarasi yang sepenuhnya membela hak-hak asasi manusia dan warga negara. Deklarasi tersebut mengandung nilai-nilai unsur-unsur yang mendorong ke arah persaudaraan umat manusia (Abdulgani, 1989:11). Kalimat-kalimat dalam deklarasi itu merupakan realisasi hasil pemikiran Abad Pencerahan tentang politik negara modern yang didasarkan pada hak-hak dan kebebasan bangsa (Conley, 1989:578). Lahirnya deklarasi itu bukan merupakan penyalinan gagasan para filosof, tetapi telah disusun, diproses, dan dimatangkan melalui perdebatan panjang dalam sidang Dewan Nasional Konstituante. Setiap kalimat dalam pasal-pasalnya menunjukkan suatu hasil pemikiran para intelektual Prancis yang mengagumkan.

Deklarasi Prancis dapat dinilai sebagai karya kemanusiaan yang dengan realistis menggambarkan pengalaman sejarah

kehid
berba
univers
serta
konsti

Inggri
bila d
Para
meren
yang
Pasal-p
dengar
1989:5

membu
memili
Prancis
berbed
beruba
seutuh
tinggi h

ZAMAN

Juli 178
tersebu
mudah
1962:11
menanc
menuju

permas
menjadi
tatanan

Berakhirm

kehidupan bangsa Prancis (Godechot, 1989:51). Akan tetapi, berbagai istilah yang ditulis dalam deklarasi tersebut bersifat *universal*, artinya dapat diterapkan di semua negara, semua bangsa, serta pada segala zaman, baik yang berbentuk monarki, konstitusional, ataupun republik.

Deklarasi Prancis bukan hasil jiplakan dari deklarasi Inggris ataupun Amerika Serikat, meskipun tidak dapat disangkal bila deklarasi Amerika atau Inggris mempunyai pengaruh besar. Para anggota Dewan Nasional Konstitusional telah merencanakan dan mempertimbangkan dengan matang hal-hal yang cocok dan sejiwa dengan keadaan warga negara Prancis. Pasal-pasal dalam deklarasi Prancis benar-benar telah dirumuskan dengan mempertimbangkan keadaan sejarah Prancis (Godechot, 1989:50).

Deklarasi Prancis disahkan pada 26 Agustus 1789. Hal ini membuktikan bahwa pemerintahan Prancis sesudah revolusi telah memiliki pedoman yang sah. Deklarasi itu akan membawa rakyat Prancis ke dalam zaman baru, dengan tatanan nilai baru yang jauh berbeda dengan tatanan nilai lama. Antara lain status individu berubah dari rakyat yang dikuasai kerajaan menjadi warga negara seutuhnya. Pemerintahan Prancis sesudah revolusi menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan warga negara.

ZAMAN BARU DI PRANCIS

Revolusi Prancis yang mencapai titik puncaknya pada 14 Juli 1789, berakhir dengan kemenangan rakyat. Gerakan rakyat tersebut telah membuktikan bahwa kekuatan rakyat dengan amat mudah berhasil menumbangkan kekuatan rezim lama (Brinton, 1962:112). Peristiwa yang membawa korban cukup besar telah menandai hapusnya rezim lama, sekaligus mengantarkan Prancis menuju lembaran sejarah baru di berbagai bidang kehidupan.

Rakyat Prancis sejak saat itu dihadapkan pada permasalahan baru, yaitu pembentukan tatanan nilai baru yang menjadi harapan selama itu. Rakyat Prancis mendambakan suatu tatanan baru yang dijiwai oleh kebebasan, persamaan dan

persaudaraan. Pembentukan sistem sosial politik baru yang didasarkan pada kehendak rakyat itu merupakan awal dari perubahan mendasar dalam sejarah panjang bangsa Prancis.

Dewan Nasional sebagai lembaga tertinggi negara bertekad untuk mewujudkan suatu bentuk pemerintahan baru. Dalam usaha tersebut Dewan Nasional mendasarkan diri pada Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara yang telah disahkan pada 26 Agustus (Gedechot, 1989:53). Dengan demikian, absolutisme dan keberpihakan raja terhadap kaum gereja dan bangsawan telah hilang dari perjalanan sejarah bangsa Prancis. Dikatakan oleh Brinton (1962:112) bahwa bangsa Prancis sejak saat itu telah bersih dari noda absolutisme. Mulai saat itu Prancis telah memasuki era baru sebagai negara demokrasi. Rakyat Prancis mulai bekerja keras untuk menyusun kembali kehidupan politik, sosial, dan ekonomi agar dapat membangun generasi baru Prancis yang jauh dari sikap diskriminatif dan eksploitatif. Rakyat bertekad untuk menghilangkan ketidakadilan, kesewenang-wenangan, keserakahan, serta semua hal yang dinilai sebagai tindakan penindasan (Kartodirdjo, 1984:444).

Persatuan di antara bangsa Prancis benar-benar terwujud sejak 14 Juli 1789. Beranjak dari peristiwa itu bangsa Prancis lahir kembali sebagai bangsa yang berkehidupan bebas serta mempunyai hak-hak sama (Furet and Richet, 1989:135). Kebebasan pada dasarnya diartikan sebagai penolakan terhadap sistem politik yang sewenang-wenang, lebih dari itu, kata kebebasan diartikan pula sebagai kebebasan opini, yaitu kebebasan berpendapat baik dalam bidang pers maupun penerbitan (Furet and Richet, 1989:136).

Dalam hal persamaan hak dan kewajiban tiap warga negara, Dewan Nasional telah melakukan langkah-langkah perubahan nyata. Antara lain dibentuknya tatanan baru dalam bidang hukum, dengan menghapuskan hak-hak istimewa yang didasarkan pada garis keturunan atau hubungan keluarga. Peraturan rezim lama yang masih memungkinkan pemberian hak istimewa kepada orang-orang tertentu, terutama pada kaum

gereja dan bangsawan dihapuskan (Furet and Richet, 1989:137). Semua warga negara dapat menentukan masa depannya tanpa takut pada ancaman pihak lain.

Diterapkannya persamaan hak dan kebebasan dalam masyarakat Prancis pasca revolusi membawa pengaruh besar terhadap perubahan birokrasi, yang melahirkan kebijaksanaan baru dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi.

Penyelewengan administrasi yang terjadi selama pemerintahan rezim lama menjadi sasaran utama pembaharuan. Hal ini disebabkan sistem administrasi rezim lama tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti yang tercantum dalam deklarasi. Dalam pemerintahan baru dibentuk sistem administrasi yang seragam dan sederhana. Antara lain wilayah Prancis dibagi menjadi 83 daerah administratif. Setiap daerah membawahi satuan wilayah administrasi yang lebih kecil (Gershoy, 1964:149). Pembentukan sistem administrasi yang demikian memperlihatkan adanya perubahan besar dari sistem yang lama ke yang baru. Semua bentuk sistem administrasi lama yang membingungkan, diganti dengan struktur pemerintahan yang lebih jelas. Di Prancis telah terbentuk desentralisasi kekuasaan yang tetap mempertahankan semangat persatuan. Semua aparatur pemerintah mempunyai kebebasan untuk mengatur wilayah masing-masing tanpa meninggalkan ketentuan dari pemerintah pusat.

Sistem administrasi pemerintah rezim lama berbeda jauh dengan sistem administrasi yang baru. Dalam sistem rezim lama sangat memungkinkan bagi raja untuk menjadi penguasa tertinggi dan bertindak absolut. Tetapi dalam sistem administrasi baru raja tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan raja harus sesuai dengan konstitusi. Kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, raja berkuasa karena mendapat mandat dari rakyat. Dengan demikian, kedudukan Louis XVI pada saat itu bukan lagi menjadi pemegang kekuasaan tertinggi negara. Louis XVI tidak lebih hanya sebagai raja bangsa Prancis berkat anugerah Tuhan dan konstitusi negara. Raja tidak dapat lagi mengontrol secara langsung jalannya pemerintahan. Louis XVI tidak ubahnya

sebagai pegawai negeri yang paling tinggi tingkatannya. Raja diberi gaji dan diawasi negara (Furet and Richet, 1989:144). Kekuasaan administratif negara yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sudah berpindah tangan dari raja kepada masyarakat Prancis baru dalam Dewan Nasional. (*Keterangan lebih lanjut dapat dilihat dalam lampiran 8*).

Masalah lain yang dihadapi pemerintahan Prancis baru adalah perpajakan. Pada masa pemerintahan rezim lama pajak merupakan satu-satunya sumber pendapatan negara yang banyak dibebankan kepada rakyat. Hanya saja, karena sistem administrasi perpajakan yang tidak efektif, menyebabkan pajak merupakan hal yang paling dibenci oleh rakyat. Berbagai usaha dilaksanakan untuk membuat suatu sistem perpajakan yang tidak menekan rakyat. Dewan Nasional menghapuskan aneka pajak konsumsi yang telah dikutuk oleh para fisiokrat, ataupun oleh kalangan rakyat. Pajak-pajak tersebut antara lain pajak garam (*Gabelle*), pajak minuman keras (*Aides*), pajak terhadap ternak, pajak hutan, pajak padang rumput (Furet and Richet, 1989:147). Berbagai pajak yang pernah diberlakukan pada masa rezim lama itu akhirnya dijadikan sebagai kenang-kenangan buruk oleh rakyat Prancis.

Pemerintahan baru berusaha untuk membuat suatu sistem perpajakan yang lebih mantap. Sistem perpajakan yang baru secara menyeluruh berpedoman pada persamaan hak (Furet and Richet, 1989:148). Peraturan perpajakan diperketat dengan suatu cara yang lebih teratur. Istilah perpajakan diganti dengan kontribusi atau sumbangan, untuk menunjukkan partisipasi warga negara Prancis. Sesuai dengan prinsip persamaan, Dewan Nasional menentukan tiga jenis pajak langsung yang harus dibayar oleh semua warga negara Prancis tanpa kecuali. *Pertama, Contribution Fonciere* yaitu pajak langsung yang dikenakan atas tanah dan rumah sebagai pengganti pajak *Taille*. *Kedua, Contribution Personelle et Mobiliere*, atau pajak kekayaan. *Ketiga, Patente*, yaitu pajak yang khusus dikenakan pada kaum pedagang dan industrialis atas keuntungan yang diperoleh. Di samping itu, beberapa pajak tidak langsung yang memberatkan dihapuskan,

kecuali pajak terhadap pembuatan akta dan cukai materai masih diberlakukan (Malet and Isaac, 1989:49).

Demikian gambaran suasana Prancis baru dalam beberapa segi penting saja, sebagai realisasi keberhasilan revolusi 14 Juli 1789. Apabila dipertanyakan lagi apakah Revolusi Prancis sudah selesai atau belum, maka hal ini merupakan suatu alternatif pertanyaan yang sulit jawabannya, karena untuk memberi batasan pengertian revolusi itu sudah selesai atau belum tergantung pada individu yang mengartikannya (Abdulgani, 1981:71). Bila revolusi diartikan sebagai suatu perubahan fundamental yang berlangsung secara cepat, dapat dikatakan bahwa Revolusi Prancis berhasil menjungkirbalikkan sistem kerajaan absolut dan masyarakat feodal, berubah menjadi sistem demokratis. Revolusi Prancis berhasil melahirkan masyarakat baru tanpa mengenal pembedaan hak dan kewajiban, hingga akhirnya masyarakat Prancis dapat memulai perjalanan barunya untuk menyongsong masa depannya.

Bab 6

PENUTUP

Revolusi Prancis yang meledak pada Juli 1789 menandai hancurnya kekuasaan rezim lama, dan sekaligus merupakan awal pembentukan negara Prancis baru yang demokratis. Peristiwa Revolusi Prancis tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi merupakan titik klimaks dari akumulasi kebencian rakyat terhadap perilaku politik, sosial, dan ekonomi rezim lama.

Selama rezim lama berkuasa, rakyat Prancis terbagi ke dalam tiga golongan masyarakat, dengan hak dan kewajiban yang diberi batasan secara jelas. Golongan-golongan tersebut adalah kaum gereja sebagai golongan pertama, kaum bangsawan sebagai golongan kedua, dan rakyat kebanyakan sebagai golongan ketiga. Dari ketiga golongan tersebut, golongan ketiga secara kuantitas menjadi mayoritas penduduk Prancis waktu itu. Akan tetapi, dalam tata kehidupan kenegaraan, kaum gereja dan bangsawan mempunyai pengaruh lebih besar karena mereka memiliki hak-hak istimewa, dengan hak-hak istimewa tersebut, kaum gereja dan bangsawan dapat bertindak sekehendak hati memeras rakyat; sedangkan rakyat kebanyakan, lebih banyak menanggung kewajiban daripada hak mereka sebagai sesama warga negara.

Golongan ketiga merupakan gabungan antara kaum petani dalam jumlah besar dan kaum borjuis dalam jumlah kecil. Kehidupan kaum petani terikat pada tanah yang dikerjakkan, dan hasilnya biasanya kurang memadai. Kebalikannya, kaum borjuis terdiri atas kaum pedagang dengan keadaan ekonomi yang lebih mapan. Kaum borjuis banyak mendukung perkembangan perekonomian Prancis rezim lama. Perbedaan itu tidak membuat

mereka terpisah, bahkan sebaliknya antara kaum petani dan borjuis terdapat persatuan kuat untuk menghadapi ketidakadilan pemerintahan rezim lama.

Hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kaum gereja dan bangsawan telah menyebabkan penderitaan bagi kaum petani dan borjuis. Terutama kaum petani, dengan tingkat pendapatan yang relatif lebih kecil, gerak kehidupan mereka dibatasi dengan kewajiban membayar pajak yang sangat tinggi bagi ukuran mereka. Akan tetapi kaum borjuis tidak pernah mengalami kesulitan hidup karena masalah-masalah ekonomi. Penderitaan yang dialami kaum borjuis disebabkan oleh kekecewaan mereka terhadap batasan-batasan aristokrasi. Batasan aristokrasi tersebut telah menghalangi karier mereka dalam tata politik pemerintahan rezim lama. Oleh karena itu, kaum borjuis dengan berbagai kelebihanannya amat berperan menyebarkan ide-ide pembaharuan.

Kaum borjuis lebih adaptif terhadap ide-ide pembaharuan yang dikemukakan oleh para filosof Abad Pencerahan, dibandingkan dengan kaum petani. Hal ini menyebabkan kesadaran rakyat, khususnya di bidang politik meningkat, serta menjadikan segala bentuk penyelewengan raja diterima dengan sikap kritis. Rakyat mulai berani bersuara tentang ketidakadilan, penyelewengan, dan ketidakmampuan raja dalam pemerintahan Prancis. Batasan-batasan sosial dan ekonomi antara kaum petani dan borjuis, tidak menghalangi mereka dalam berinteraksi untuk menilai perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang sedang terjadi.

Di samping menyebarkan ide-ide pembaharuan yang dipenuhi nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, golongan ketiga mempunyai peranan penting dalam menumbangkan pemerintahan rezim lama. Peran yang dimainkan golongan ketiga adalah menggalang kekuatan dan melakukan aksi massa dalam sebuah gerakan revolusi. Hal ini dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, mengkonsolidasikan kekuatan massa yang ada. *Kedua*, melakukan aksi massa dengan menyerbu ke pusat-pusat kekuatan yang dijadikan simbol kekuasaan rezim lama.

Klimaks kemarahan rakyat diarahkan ke penjara Bastille yang merupakan lambang absolutisme rezim lama pada 14 Juli 1789. Penjara Bastille berhasil dihancurkan oleh kekuatan rakyat. Persatuan kuat antara kaum petani dan borjuis dalam golongan ketiga, membuktikan tercapainya keberhasilan rakyat dalam Revolusi Prancis tahap menumbangkan pemerintahan rezim lama. Oleh sebab itu, 14 Juli dijadikan hari nasional bangsa Prancis.

Berdasarkan kajian di atas dapat diketahui, bahwa golongan ketiga sangat berperan dalam perjalanan Revolusi Prancis. Peran yang dimainkan golongan ketiga meliputi penyadaran logika massa rakyat terutama di arahkan kepada kaum petani, mengkonsolidasikan kekuatan massa, serta melakukan aksi ke lapangan untuk menentang kekuatan rezim lama. Dengan demikian hipotesis pertama sudah dapat terjawab.

Revolusi Prancis merupakan revolusi dari bawah, yaitu revolusi yang dilancarkan oleh kekuatan massa rakyat (*people power*). Namun demikian, kemauan dan kekuatan rakyat tidak dapat berjalan efektif tanpa tokoh atau pimpinan yang dijadikan panutan rakyat. Banyak tokoh yang terlibat dalam Revolusi Prancis baik itu cendekiawan ataupun bangsawan. Dalam hal ini dapat digunakan beberapa kriteria dalam menentukan tingkat keberpengaruhannya seorang tokoh dalam gerakan revolusi. *Pertama*, ia merupakan manusia terpilih (*selected man*) dan bukan atas dasar tunjukkan. *Kedua*, ia mempunyai rencana tentang bentuk tatanan baru yang diwarnai oleh nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Karena itu haruslah seseorang yang kuat pengetahuan dan tidak sempit pandangan. *Ketiga*, ia mempunyai tanggung jawab besar terhadap jalannya revolusi dan kesudahannya.

Mirabeau adalah tokoh yang memenuhi kriteria-kriteria di atas. Dilihat dari garis keturunan Mirabeau adalah seorang bangsawan. Akan tetapi Mirabeau tidak terjebak dalam alam kehidupan kebangsawanannya. Mirabeau mempunyai perhatian besar terhadap nilai-nilai kerakyatan. Mirabeau rela disingkirkan

dari kalangan bangsawan dan tetap berpikir kepada kepentingan rakyat.

Kemampuan Mirabeau dalam berpidato, membuatnya mudah untuk menggalang kekuatan rakyat. Nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan persaudaraan merupakan tema utama dalam setiap pidatonya menjelang dan sesudah revolusi. Dapatlah dikatakan, bahwa Mirabeau adalah figur pemimpin yang dijadikan panutan rakyat. Mirabeau mempunyai tekad yang keras untuk berjuang terus sampai ketidakadilan, kesewenang-wenangan lenyap dari bumi Prancis.

Pada tingkat kenegaraan, Mirabeau merupakan seorang wakil rakyat yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Menurut Mirabeau hak-hak istimewa yang dimiliki oleh segolongan orang dalam pemerintahan rezim lama harus dihapuskan. Rakyat tidak dapat dipaksa oleh penguasa untuk menyerahkan hak-haknya dengan dalih untuk kepentingan negara. Cara yang paling tepat untuk menghindari kesewenang-wenangan penguasa ialah konstitusi harus ditegakkan.

Berdasarkan kajian di atas hipotesis kedua dapat diterima. Mirabeau adalah tokoh yang mempunyai pengaruh besar dalam gerak Revolusi Prancis 1789.

Demikianlah Revolusi Prancis yang merupakan salah satu dari beberapa revolusi besar di dunia. Revolusi Prancis membuktikan bahwa rakyat sebagai mayoritas dan pemegang kedaulatan tidak dapat diperlakukan sewenang-wenang. Di samping itu, Revolusi Prancis memperlihatkan adanya pergeseran secara struktural dari pemerintahan gaya lama ke arah baru, yaitu dari monarkhi absolut ke monarkhi konstitusional. Rakyat diakui sebagai warga negara yang mempunyai persamaan dalam hak dan kewajiban. Hak-hak istimewa yang menghalangi kehidupan rakyat dihapuskan (lebih jelasnya lihat lampiran). Nilai-nilai kebebasan, persamaan, dan persaudaraan merupakan nilai-nilai abadi yang diperjuangkan oleh rakyat Prancis untuk seluruh umat manusia.

Sebagai suatu peristiwa yang telah menyejarah, Revolusi Prancis memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi

umat manusia. Paling tidak dari peristiwa Revolusi Prancis itu dapat diambil nilai-nilai moral untuk kepentingan masa kini dan mada datang. *Pertama*, dari figur Louis XVI dan Marie Antoinette, untuk melihat karakter kepemimpinan yang tidak disukai dan mendorong timbulnya gejolak rakyat. *Kedua*, nilai nasionalisme bangkitnya rakyat Prancis dalam menentang dominasi rezim lama.

Louis XVI adalah salah satu contoh figur raja Prancis yang lemah. Sebagai sentral kepemimpinan monarkhi Prancis, Louis XVI tidak dapat mengendalikan roda pemerintahan dengan baik. Louis XVI memerintah menurut kehendaknya sendiri, dan sangat tergantung pada orang di sekelilingnya. Akibatnya pemerintah yang ada hanya menguntungkan golongan tertentu saja. Demikian pula dengan Marie Antoinette, permaisuri Louis XVI. Ia tidak dapat menempatkan diri sebagai seorang permaisuri yang baik, serta ibu negara panutan rakyatnya. Kesenangan Marie Antoinette akan kehidupan mewah, serta campur tangannya dalam tata pemerintahan semakin melumpuhkan pemerintahan Prancis. Di antara sikap Louis XVI dan Marie Antoinette yang kurang pantas itu, lama kelamaan akan menumbuhkan kesadaran rakyat.

Rakyat dibangkitkan oleh semangat perjuangan untuk mewujudkan negara-kebangsaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai asasi manusia. Revolusi Prancis diperjuangkan untuk mengubah negara absolut ke negara moderen yang berciri demokratis. Kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, merupakan sumber inspirasi yang kuat bagi bangkitnya semangat kebangsaan rakyat Prancis. Perasaan kebangsaan tidak semata-mata dikaitkan dengan persamaan ras, warna kulit, agama, dan sebagainya, melainkan merupakan suatu persamaan jiwa, tujuan, dan cita-cita. Rakyat Prancis berada dalam satu jiwa, satu cita-cita dan satu tujuan, yaitu mengakhiri pemerintahan rezim lama dan menyongsong zaman baru yang menghargai harkat manusia.

Pengalaman bangsa Prancis yang demikian itu hendaknya dijadikan sebuah cermin, dengan satu tujuan agar tahap-tahap kekacauan dalam lapangan sosial, politik dan ekonomi tidak

terjadi untuk kedua kalinya. Perjuangan rakyat Prancis telah mempertaruhkan pengorbanan yang tidak kecil baik harta maupun jiwa. Hal ini dapat dimengerti, bahwa di manapun manusia, dan kapanpun zamannya selalu mendambakan adanya rasa kebebasan dan persamaan dalam ikatan tali persaudaraan. Oleh karena itu, bagi negara yang telah berhasil mewujudkan negara-kebangsaan seperti negara kita, harus diupayakan untuk memelihara stabilitas politik dan keseimbangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, Roeslan (1981). "Melacak Jejak Revolusi Nasional".
Prisma, No. 8 Agustus.
- _____, (1989). *Pengaruh Revolusi Prancis Atas Pergerakan Kemerdekaan dan Revolusi Indonesia*, dalam makalah seminar Memperingati Dua Ratus Tahun Revolusi Prancis di Yogyakarta.
- Abdullah, Taufik dan Abdurachman Surjomiharjo. (1985). *Ilmu Sejarah dan Historiografi Arab dan Perspektif*, Jakarta: Gramedia.
- Anchor, Robert. (1967). *The Enlightenment Tradition*. New York: Harper and Row.
- Andre, Maurois (1956). "The Miracle of France". Translated by Hendry L. Binse, *a History of France*, New York: Farrar Staraus and Cudahy.
- Bagun, Rikard. (1990). "Antara Rakyat dan kaum Reformis".
Kompas, Edisi Sabtu 26 Mei.
- Baumer, Franklin L, et.al. (1965) *Intellectual Movements in Modern European*, London: The Macunicllan Company.
- Bellog, Hilaire. (1956). *The French Revolution*, London: Oxford University Press.
- Best, John. W. (1982). "Research in Education". Alih bahasa Sanapiah Fasial dan Mulyadi Guntur Wasesa. *Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Blum, Jerome, et.al. (1966). *a History the Europen World*. Boston: Brown and Company.

- Brinton, Crane. (1962). "The Anatomy of Revolution". Alih bahasa Singgih Hadiprawono dan Gusti Ngurah Gedhe. *Anatomi Revolusi*. Djakarta: Bhratara.
- Bruce, Mazlishe. (1968). *The Revolutionary Ascetic, Evaluation of a Political Type*. New York: Mc. Graw Hill Book Company.
- Bulkin Franchan. (1985). "Pergerakan Rakyat Mencari Jawab". *Prisma*. No. 11.
- Carlyle, Thomas. (1934). *The French Revolution a History*. New York: Benneta cerf-Donalds-Klopfers.
- Conley, John. I. (1989). "The Bicentennial of Political Idea". *Amerika*, Vol 60. No. 24. Tanggal 24 Juni.
- Davis, Mary L (1984). "Women Who Chnged History". Alih bahasa Yus Rusamsi. *Lima Tokoh Wanita yang Mengubah Sejarah*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Diekinson, G. Lowes (1952). *Revolution and Rection in Modern France*. Indian: The University of Netredeme.
- Fitzsimons, M.A. (1978). "Voltaire: History Unexemplary nd Philosophie". *The Riview of Politics*. Indian: The University of Notredeme.
- Freederick, William H, dan Soeri Soeroto (1982). *Pemahaman Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES Jaya Perusa.
- Friedrich, Carl I. Dan Charles Blitzer (1957). *The Age of Power*. New York: Carnell University Press.
- Furet, Frncois and Denis Richet (1989). "La Revolution Francaise". Alih bahasa Team Penerjemah LIP. *Revolusi Prancis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gay, Peter. (1968). *The Enlightenment an Interpretation The Rise of Modern Paganisim*. New York: Vintage Books.
- _____, (1984). "Age Engleghenment". Alih bhas C.Wukirsari. *Abad Pencerhan*. Jakarta: Tiara Pustaka.
- Gde Agung, Ide Anak Agung. (1989). *Revolusi Prancis dan Dampaknya dalam Pertumbuhan Demokrasi di Negara-negara sedang Berkembang*. Makalah Seminar Memperingti Dua Ratus Tahun Revolusi Prancis. Yogyakarta.

- Gershoy, Leo (1957). *The Era of The French Revolution 1789 - 1799*. New Jersey: D. Van Nostrand Company.
- _____, (1964). *French Revolution and Napoleon*. New York: Appleton Century Croofts.
- Godechot, Jacques, (1989). "Les Revolutions 1770 - 1799". Alih bahas Tim Penerjemaah LIP. Surabaya. *Revolusi di Dunia Barat (1770 - 1799)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gottschalk, Louis. (1983). "Understanding of History a Primer of Historical Method". Alih bahasa Nugroho Notosusanto. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Guerard, Albert (1959). *France Modern History*. Allian Nevins: The University of Michigan Press.
- Gunawn, Riyadi (1981). Jargon dalam Revolusi kita. *Prisma*. No. 8 Agustus.
- Hamersma Hary (1983). *Tokoh-tokoh Filsafat Barat Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Hyes, Carlton I.H. et.l. (1956). *History of Europe*. New York: Maacmillan Company.
- Hermawan, Sulistyono (1990). "Revolusi dalam Pemikiran Soekarno dan Marcos". *Prisma*, No. 1 Tahun XIX.
- Hill, C.P., (1956). "Suggestions on The Teaching of History", alih bahasa Haksan Wirasutisna. *Saran-saran Tentang Mengadjar Sedjarah*. Djakarta: Balai Pustaka.
- Kartodirdjo, Sartono (1970). "Perbandingan Antaara Kebudayaan Barat Abad Pertengahan dn Djaman Modern, Pendjelasan Berdasar Kesadaran Sejarah". *Dalam Lembaran Sejarah* No. 5. Yogyakarta: Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada.
- _____, (1981). *Elite Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: LP3ES.
- _____, (1984). "The Peasant's Revolt of Banten in 1888". Alih bahasa Hasan Basari. *Pemberontakan Petani Banten 1888*,

- Kondisi, Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- _____ (1989). *Beberapa Perspektif Dalam Studi Revolusi Prancis dan Revolusi Indonesia*. Makalah Seminar Memperingati Dua Ratus Tahun Revolusi Prancis. Yogyakarta.
- Kinder, Hermann and Hilgemann Werner. (1978). *The Anchor Atlas of World History*. Volume II. New York: Anchor Press.
- Lapian, A.B. (1989). *Beberapa Perspektif Dalam Studi Revolusi Prancis dan Revolusi Indonesia*. Makalah Seminar Memperingati Dua Ratus Tahun Revolusi Prancis. Yogyakarta.
- Levevre, Goerges. (1971). "Peuples et civilisations". Translated by Elizabeth Moss Evanson. *The French Revolution From Origins to 1793*. New York: Columbia Press.
- Lichtinan, Allan J., and Valerie French. (1978). *Historian and The Living Past*. Illionis: Harlan Davidson Inc.
- Maarif Ahmad Syafii. (1987). *Peranan Sejarah dalam Pembangunan Bangsa Indonesia*. Dalam Makalah Dies Natalis ke XIX IKIP PGRI Wates Yogyakarta.
- Malet, A., and J. Isaac. (1989). "Les Revolution 1789 - 1848". Alih bahasa Tim CCF., Bandung. *Revolusi Prancis 1789-1799*. Jakarta: Gramedia.
- Manuel, Frank E., (1965). *The Enlightenment*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Meulen, W.J. Van der S.J. (1987). *Ilmu Sejarah dan Filsafat*. Yogyakarta : Kanisius.
- Maududi, al. (1986). *Pemudi Islam di Persimpangan Jalan*. Solo: Romadon.
- Mayer, J.P. (1963). *French Liberal Thought in the Eighteenth Century a Study of Political Ideas From Bayle to Condorcet*. New York: Harper and Row.
- Muhaimin, Jahja *Et.al.* (1985). *Kamus Istilah Politik*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

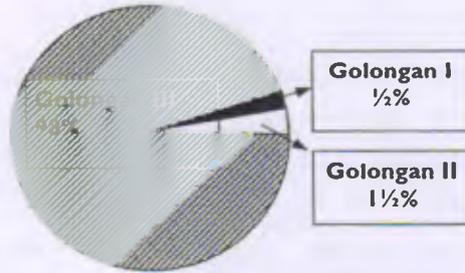
- Nicolle, Paul (1955). "La Revolution Francaise". Alih Bahasa Subagio. *Revolusi Prantjis*. Djakart: Pustaka Rakjat.
- Palmer, R.R. (1973). *Twelve Who Ruled The Year of The Terror in The French Revolution*. Princenton: Princenton Universtity Press.
- Preston, Richard A. (1979). *Perspektive on Revolution and Evolution*. USA: Kingsport Press. Inc.
- Rayner, Robert M. (1950). *Europen History 1648-1789*. New York: Longsman Green and Co.
- Reading, Hugo F (1986). *Kamus Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Rajawali.
- Richard, Denis (1950). *Modern Europe 1789-1945*. New York: Longsman Green and Co.
- Ritchie Graeme R.L. (Tanpa Tahun). *France a Compnion to French Studies*. Vol. II. London: Methuen and Co Ltd.
- Romein, Jan (1956). "Aera Eropa". Alih bahasa Noer Toegiman. *Peradaban Eropa Sebagai Penyimpangan dari Pola Umum*. Bandung: Ganaco.
- Rousseau, (1986). "The Social Confract". Alih bahasa Sumardjo. *Kontrak Sosial*. Jakarta: Airlangga.
- Rowen, Hebert H. (1973) "Mirbeu". *Encyclopedia of World Biography*. New York: Mac Graw Hill.
- Schieder, Theodor. (1958). *The State and Society in Our Times*. Toronto: Thomas Nelson and Sons.
- Schmid, J.J.Von. (1980). "Grate Denkers Over Staat eu Recht Van Plato tot Kant". Alih bahas R. Wiratmo. *Abli-abli Pikir Besar Tentang Negara dna Hukum*. Jakarta: Pembangunan.
- Sheimer, Walter (1950). "Montesquieu". *An Encyclopedia of Modern World Politics*. New York: Rinehautan Company.
- Shadily, Hasan. (1984). "Voltaire". *Enciklopedi Indonesi*. Vol VII. Jakarta: Ichtiar Baru - Van Hoeve.
- Soedjtmoko, (1989). Relevansi Revolusi Prancis Untuk Revolusi Indonesia. Dlaam Makalah Seminar Memperingati Dua Ratus Tahun Revolusi Eropa di Yogyakarta.
- Soedjono. D. (1981). *Sosiologi* Bandung: (Tanpa Penerbit).

- Soekanto, Soerjono. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Suyatno. (1983). *Birokrasi Kepemimpinan dan Revolusi Sosial*. Surakarta: Hapsara.
- _____, (1984). "Masyarakat Daerah dalam Revolusi Indonesia". *Prisma*. No. VIII Agustus.
- Surachmad, Winarno. (1975). *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Thompson, J. M. (1955). *The French Revolution*. Oxford: Basil Blacwell.
- _____. (1973). *Robespierre and The French Revolution*. New York: Collier Books.
- Voltaire. (1989). "Candide on 1 Optimisisme". Alih bahasa Ida Sundari Husen. *Candide*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.

Lampiran 2: Pembagian Daerah Administrasi Perancis sebelum Tahun 1789

Sumber: Gershoy, Leo. (1964). *The French Revolution and Napoleon*. New York: Appleton-Century Crefts. P. 12.

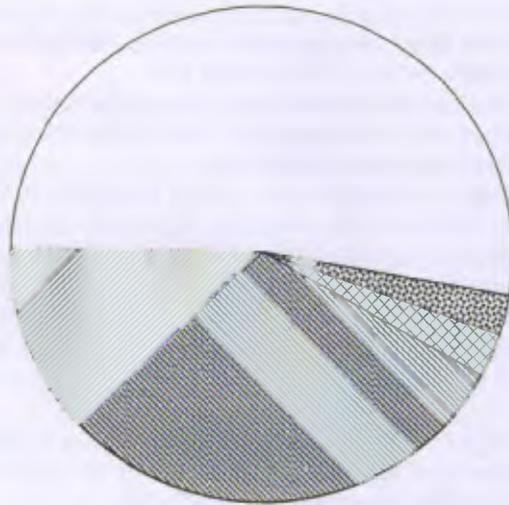
Lampiran 3: Pembagian Masyarakat Perancis sebelum Tahun 1789



Golongan I	: Gereja	135.000
Golongan II	: Bangsawan	400.000
Golongan III	: Borjuis	1.000.000
	Kaum Pekerja di Luar Pertanian	2.000.000
	Petani Pemilik & Penyewa Tanah	5.000.000
	Petani Bagi Hasil	11.000.000
	Pekerja Harian	5.000.000
	Budak (Pengolah Tanah)	1.000.000

Sumber: Blum, Jerome et al. (1966). *A History The European World*. Canada: Boston-Toronto, p.445

Lampiran 4: Keadaan Pertanian di Perancis Sebelum Tahun 1789



-  : Hutan 20 juta hektar
-  : Tanah tidak ditanamai 27 juta hektar
-  : Kebun Anggur 5 juta hektar
-  : Padang rumput 4 juta hektar
-  : Tanah yang baik untuk ditanami 75 juta hektar

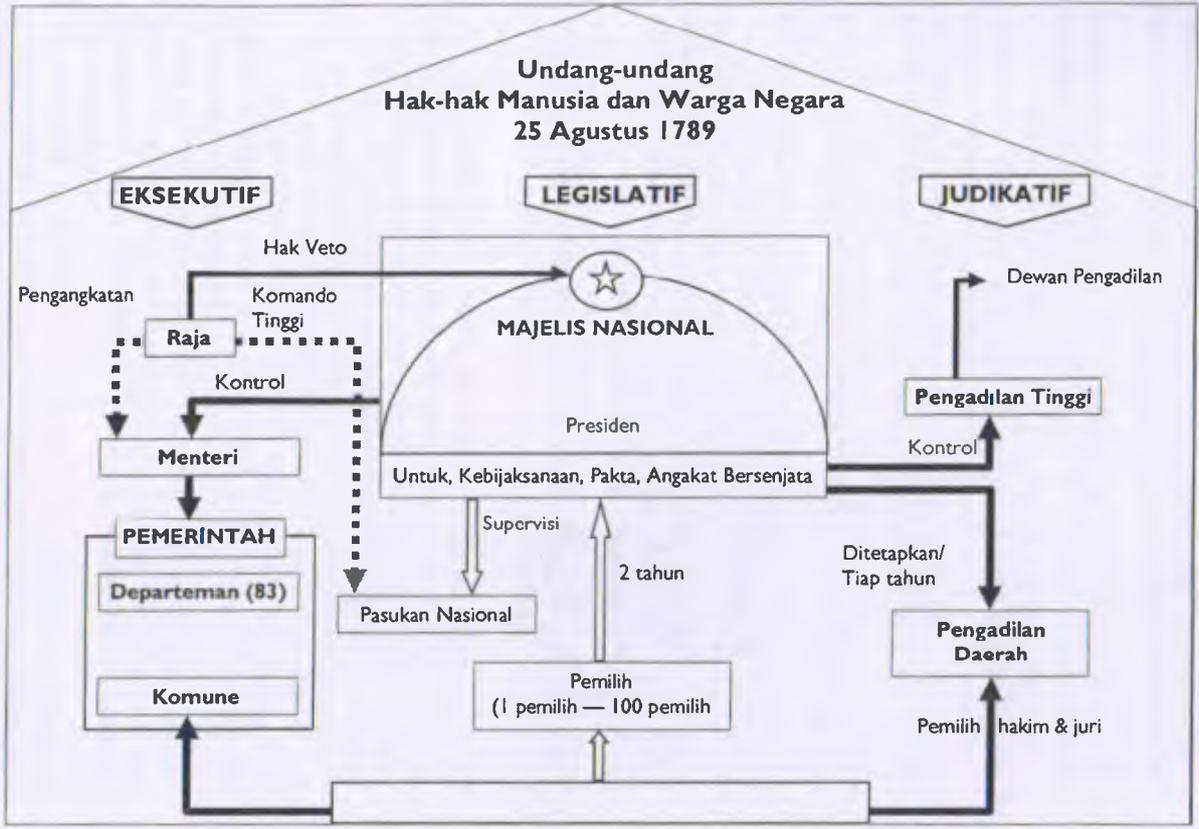
Sumber: Thomson, J.M. (1955). *The French Revolution*. Oxford. Basil Blacwell.

Lampiran 5: The Declaration of Rights of Man and Citizen

1. Men are born and remain free and equal in rights. Social distinctions may be founded only upon the general good.
2. The aim of all political association is the preservation of the natural and imprescriptible rights of man. These rights are liberty, property, security, and resistance to oppression.
3. The principle of all sovereignty resides essentially in the nation. No body nor individual may exercise any authority which does not proceed directly from the nation.
4. Liberty consists in the freedom to do everything which injures no one else; hence the exercise of the natural rights of each man has no limits except those which assure to the other members of the society the enjoyment of the same rights. These limits can only be determined by law.
5. Law can only prohibit such actions as are hurtful to society. Nothing may be prevented which is not forbidden by law, and no one may be forced to do anything not provided for by law.
6. Law is the expression of the general will. Every citizen has a right to participate personally, or through his representative, in its foundation. It must be the same for all, whether it protects or punishes. All citizens, being equal in the eyes of the law, are equally eligible to all dignities and to all public positions and occupations, according to their abilities, and without distinction except that of their virtues and talents.
7. No person shall be accused, arrested, or imprisoned except in the cases and according to the forms prescribed by law. Any one soliciting, transmitting, executing, or causing to be executed, any arbitrary order, shall be punished. But any citizen summoned or arrested in virtue of the law shall submit without delay, as resistance constitutes an offense.
8. The law shall provide for such punishments only as are strictly and obviously necessary, and no one shall suffer punishment except it be legally inflicted in virtue of a law passed and promulgated before the commission of the offense.
9. As all persons are held innocent until they shall have been declared guilty, if arrest shall be deemed indispensable, all harshness not essential to the securing of the prisoner's person shall be severely repressed by law.
10. No one shall be disquieted on account of his opinions, including his religious views, provided their manifestation does not disturb the public order established by law.
11. The free communication of ideas and opinions is one of the most precious of the rights of man. Every citizen may, accordingly, speak,

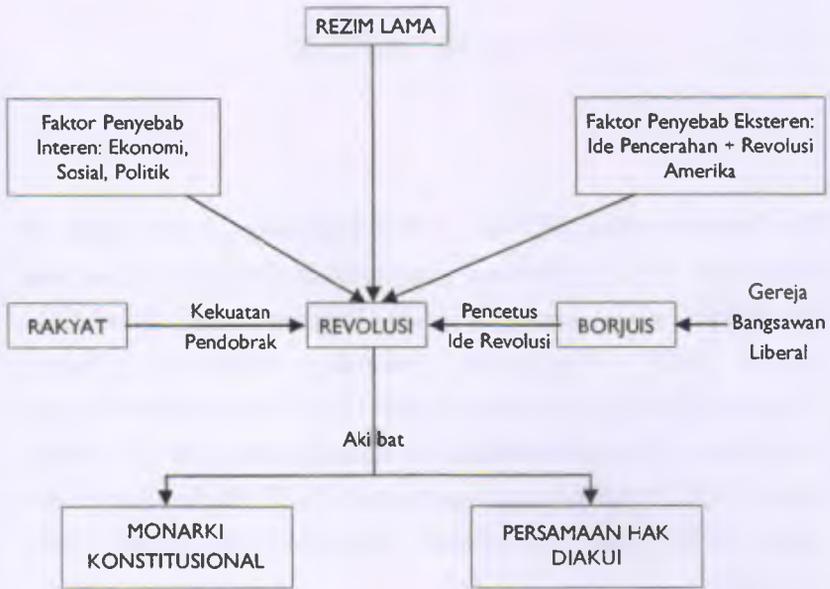
- write, and print with freedom, but shall be responsible for such abuses of this freedom as shall be defined by law.
12. The security of the rights of man and of the citizen requires public military forces. These forces are, therefore, established for the good of all and not for the personal advantage of those to whom they shall be intrusted.
 13. A common contribution is essential for the maintenance of the public forces and for the cost of administration. This should be equitably distributed among all the citizens in proportion to their means.
 14. All the citizens have a right to decide, either personally or by their representatives, as to the necessity of the public contribution; to grant this freely; to know to what uses it is put; and to fix the proportion, the mode of assessment and of collection and the duration of the taxes.
 15. Society has the right to require of every public agent an account of his administration.
 16. A society in which the observance of the law is not assured, nor the separation of powers defined, has no constitution at all.
 17. Since property is an inviolable and sacred right, no one shall be deprived thereof except where public necessity, legally determined, shall clearly demand it, and then only on condition that the owner shall have been previously and equitably indemnified.

Sumber: Gershoy, Leo. (1957). *The Era of The French Revolution 1789-1799*. New York: Van Nostrand.



Sumber: Kincer, Herman and Hilgemann Werner, (1978). The Anchor Atlas of World History. Vol. 1. New York: Anchor Press

Lampiran 7: Skema Proses Revolusi Perancis 1789



TENTANG PENULIS

DR. SUSWANDARI, M.PD., lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 20 November 1966. Pendidikan yang pernah ditempuh antara lain: Pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Sejarah IKIP Yogyakarta (sekarang Universitas Negeri Yogyakarta) yang diselesaikan tahun 1991. Pada perguruan tinggi yang sama, ia menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) dalam tahun 2000. Pendidikan program doktor (S3) diselesaikan dalam tahun 2008 pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung.

Saat ini ia menjadi salah satu staf pengajar pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP-UHAMKA. Di tengah kesibukannya sebagai staf mengajar, ia juga aktif dalam Pusat Studi Wanita (PSW) UHAMKA, pemerhati masalah perempuan dengan berbagai kajian dan penelitian, serta menjadi instruktur dalam Program Pemberdayaan Perempuan.

Revolusi Prancis tahun 1789 merupakan salah satu revolusi terbesar dalam panggung sejarah dunia. Terbentuknya Negara-Negara modern, konsep kedaulatan rakyat, dan konsep Negara kebangsaan (nation state), merupakan sumbangan sangat penting dari Revolusi Prancis tersebut. Revolusi Prancis dengan sembojannya yang terkenal, yakni kebebasan, persamaan, dan persaudaraan (liberte, egalite, fraternite) juga memberikan kontribusi terhadap penghargaan hak-hak manusia yang lebih demokratis.

Buku ini memuat secara komprehensif tentang Revolusi Prancis. Dimulai dengan terbentuknya Monarki Absolut, pengaruh Pencerahan bagi Golongan Ketiga, Berlangsungnya Revolusi Prancis, dan Berakhirnya Pemerintahan Monarki Absolut. Sedikitnya ada dua pelajaran penting yang kita peroleh setelah membaca buku ini, yaitu: pertama, agar penguasa tidak sewenang-wenang memerintah dan memperlakukan rakyatnya, dan kedua, kekuatan rakyat tetap menjadi kekuatan yang ampuh untuk menumbangkan penguasa yang sewenang-wenang.



SUSWANDARI, lahir di Purworejo, 20 November 1966, adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Program Studi PGSD, Jurusan Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka Jakarta. Mengajar di FKIP UHAMKA sejak tahun 1994. Pendidikan sarjana diselesaikan pada Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP Yogyakarta tahun 1991, serta pendidikan Magister pada Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2000. Tahun 2005, melanjutkan studi pada Program PIPS Sekolah Pasca Sarjana UPI, di Bandung, lulus Februari 2009.